

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Illahirobbby atas karunianya, kami dapat menyelesaikan laporan akhir pekerjaan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional. Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) ini dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan industri daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam laporan akhir ini menyampaikan Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, Program dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan selama 20 (Dua puluh) tahun, yaitu 2016 – 2035.

Demikian laporan akhir ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, November 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	7
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1. KONDISI UMUM.....	10
2.1.1. Keadaan Umum Wilayah.....	10
2.1.2. Demografi.....	23
2.1.3. Struktur Perekonomian.....	30
2.1.4. Sektor Unggulan Provinsi.....	35
2.1.4.1. Analisis <i>Shif Share</i>	36
2.1.4.2. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	39
2.1.4.3. Indeks RCA.....	41
2.1.4.4. Summary Hasil-Hasil Analisis Sektoral.....	42
2.1.5. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah.....	44
2.1.5.1. Jalan Darat.....	44
2.1.5.2. Pelabuhan Laut.....	45
2.1.5.3. Bandar Udara.....	46
2.1.6. Telekomunikasi.....	46
2.1.7. Listrik, Air dan Bahan Bakar.....	47
2.1.8. Penataan Wilayah.....	50
2.2. KONDISI INDUSTRI SECARA UMUM.....	74
2.2.1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri.....	74

2.2.2. Jumlah Unit Usaha Industri.....	78
2.2.3. Ekspor dan Impor Produk Industri.....	84
2.3. SUMBER DAYA INDUSTRI.....	87
2.3.1. Sumber Daya Manusia.....	87
2.3.2. Sumber Daya Alam (SDA).....	88
2.3.3. Unsur Penunjang.....	101
2.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN UMUM.....	
PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	116
2.6.1. Identifikasi Potensi Umum dalam Pembangunan Industri Provinsi.....	116
2.6.2. Identifikasi Permasalahan Umum dalam Pengembangan Industri Provinsi.....	116
BAB 3 VISI, MISI, STRATEGI DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.....	119
3.1. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.....	119
3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Dalam RPJM Provinsi.....	119
3.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional.....	120
3.1.3. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan.....	122
3.1.3.1. Visi.....	122
3.1.3.2. Misi.....	123
3.1.3.3. Strategi Pembangunan Industri Provinsi.....	123
3.2. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.....	
SUMATERA SELATAN.....	124
BAB 4 PROGRAM DAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI.....	129
4.1. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	129
4.1.1. Pengembangan Perwilayahan Industri.....	131
4.1.2. Pengembangan Sumberdaya Industri.....	141
4.1.2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.....	141

4.1.2.2.....	Pemanfaat	
	an, Penyediaan dan Penyaluran	
	Sumber Daya Alam.....	142
4.1.2.3.	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi	
	Industri.....	142
4.1.2.4.	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas	
	Dan Inovasi.....	143
4.1.2.5.	Penyediaan Sumber Pembiayaan.....	144
4.1.2.6.	Kerjasama antar Lembaga dan Antar.....	
	Pemerintah Daerah.....	145
4.1.2.7.	Perijinan dan Pajak Daerah Yang Menunjang	
	Pembangunan Industri.....	146
4.1.3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.....	147
4.1.3.1.	Transportasi (Jalan, Pelabuhan, Airport,.....	
	Kereta Api, dan ASDP).....	148
4.1.3.2.	Jaringan Air, Listrik dan Telekomunikasi.....	148
4.1.3.3.	Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan.....	149
4.1.3.4.	Penyediaan Lahan Untuk Industri.....	150
4.1.3.5.	Penyediaan Sistem Informasi Untuk.....	
	Industri.....	150
4.1.4.	Pemberdayaan IKM.....	151
4.2.	INDUSTRI UNGGULAN PRIORITAS PROVINSI.....	
	SUMATERA SELATAN.....	152
4.2.1.	Penetapan Komoditas Unggulan.....	152
4.2.1.1.	Analisis Komoditas Unggulan Provinsi.....	152
4.2.1.2.	Long List Komoditas Unggulan Provinsi.....	156
4.2.2.	Penetapan Industri Unggulan.....	158
4.2.3.	Rencana Aksi Pembangunan Industri Unggulan.....	161
4.2.3.1.	Industri Pengolahan Industri Aneka.....	
	(Pengolahan Karet), Industri Pengolahan.....	
	Karet dan Barang dari Karet.....	161
4.2.3.2.	Industri Pengolahan Industri Kopi.....	170

4.2.3.3. Industri Pengolahan Industri Pakan.....	180
4.2.3.4. Industri Pengolahan Industri Kelapa Sawit.....	186
4.2.3.5. Industri Pengolahan Industri Batubara.....	192
BAB 5 PENUTUP.....	198

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Isu Strategi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013.....	2
Tabel 2.1. Ketinggian Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	11
Tabel 2.2. Sub DAS Pada Wilayah DAS Musi Provinsi Sumatera Selatan.....	13
Tabel 2.3. Nama Sungai di Provinsi Sumatera Selatan.....	14
Tabel 2.4. Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan.....	15
Tabel 2.5. Sebaran Tipe Iklim Berdasarkan Sub DAS pada DAS Musi Provinsi Sumatera Selatan.....	15
Tabel 2.6. Wilayah Administrasi di Sumatera Selatan, 2011, 2012, 2013, dan 2014.....	17
Tabel 2.7. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Juni 201.....	17
Tabel 2.8. Pulau Bernama dan Belum Bernama Menurut Provinsi Sumatera dan Indonesia, 2009.....	22
Tabel 2.9. Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Laki-laki + Perempuan), 2010-2020.....	26
Tabel 2.10. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Kabupaten Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2014.....	27
Tabel 2.11. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) di Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2013.....	33
Tabel 2.12. Jumlah Ekspor Non Migas Tahun 2014.....	35
Tabel 2.13. Analisis Shift share, Provinsi Sumatera Selatan.....	36
Tabel 2.14. Nilai Rata-Rata Location Quotient (LQ) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2000-2014.....	39
Tabel 2.15. Industri Unggulan Atas Dasar LQ.....	40

Tabel 2.16. Nilai Indeks RCA Komoditas Ekspor Sumatera Selatan,.....	
2011-2012.....	41
Tabel 2.17. Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan.....	42
Tabel 2.18. Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan.....	45
Tabel 2.19. Bandar Udara di Povinsi Sumatera Selatan.....	46
Tabel 2.20. Jumlah dan Persentasi Desa yang menerima Telepon Kabel.... dan HP, Provinsi Sumatera Selatan, 2011.....	47
Tabel 2.21. Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik..... Masyarakat, Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera, 2011.....	48
Tabel 2.22. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi..... Sumatera Selatan.....	51
Tabel 2.23. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional di..... Provinsi Sumatera Selatan.....	53
Tabel 2.24. Rencana Sistem Pusat-Pusat Permukiman Provinsi..... Sumatera Selatan Tahun 2010-2030.....	54
Tabel 2.25. Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	55
Tabel 2.26. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.....	56
Tabel 2.27. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Tahun 2030.....	59
Tabel 2.28. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Tahun 2030.....	60
Tabel 2.29. Penetapan dan Arahkan Penanganan Kawasan Strategis..... Provinsi Sumatera Selatan Terkait Kawasan Tanjung Api Api.....	62
Tabel 2.30. Rencana Tata Jenjang Fungsi Kegiatan & Pelayanan.....	66
Tabel 2.31. Rencana Perwilayahan Kawasan Penyangga Pelabuhan Tanjung Api Api.....	67
Tabel 2.32. Komposisi Rencana Penggunaan Lahan Kawasan.....	70
Tabel 2.33. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi..... Sumatera Selatan.....	70
Tabel 2.34. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional di..... Provinsi Sumatera Selatan.....	72
Tabel 2.35. Rencana Sistem Pusat-Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2030.....	73

Tabel 2.36. Kontribusi Masing-Masing Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB Sektor Industri Tanpa Migas Tahun 2014.....	77
Tabel 2.37. Unit Usaha, Tenaga Kerja (orang) dan Investasi (Rp. 000)..... Industri Kecil dan Menengah, Provinsi Sumatera Selatan,..... 2005-2014.....	78
Tabel 2.38. Distribusi Penduduk menurut Lapangan Kerja dan Jenis..... Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2014.....	79
Tabel 2.39. Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013.....	80
Tabel 2.40. Ekspor Beberapa Jenis Barang Utama Bukan Minyak bumi dan Gas Alam 2013-2014 (dolar AS).....	86
Tabel 2.41. Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Selatan, 2000 - 2014 (Juta dolar AS).....	87
Tabel 2.42. Tenaga Kerja Sektor Industri, Provinsi Sumatera Selatan,..... 2005-2014 (orang).....	88
Tabel 2.43. Potensi SDA Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan,..... 2009.....	88
Tabel 2.44. Produksi Bahan Tambang dan Galian menurut Jenis Barang dan Lokasi, Provinsi Sumatera Selatan, 2009-2013.....	89
Tabel 2.45. Luas Tanam Perkebunan Karet Rakyat (%), Provinsi..... Sumatera Selatan, 2011.....	90
Tabel 2.46. Produksi Karet menurut Kabupaten/Kota (Ton), Provinsi..... Sumatera Selatan, 2011.....	90
Tabel 2.47. Produksi Kelapa menurut Kabupaten/Kota (Ton), Provinsi..... Sumatera Selatan, 2011.....	91
Tabel 2.48. Luas Lahan Perkebunan Kelapa menurut Kabupaten/Kota,.... Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	92
Tabel 2.49. Produksi Kelapa Sawit menurut Kabupaten/Kota (Ton),..... Provinsi Sumatera Selatan, 2011.....	93
Tabel 2.50. Populasi Kerbau menurut Kabupaten/Kota (ekor),..... Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	94

Tabel 2.51. Populasi Sapi menurut Kabupaten/Kota (ekor), Provinsi.....	
Sumatera Selatan, 2013.....	95
Tabel 2.52. Luas Lahan Perkebunan Kopi menurut kabupaten/kota,.....	
Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	96
Tabel 2.53. Luas Panen, Rata-rata Produksi per Ha, dan Produksi.....	
Jagung (ton), Provinsi Sumatera Selatan, 2009-2013.....	97
Tabel 2.54. Populasi Ayam Buras menurut kabupaten/Kota, Provinsi.....	
Sumatera Selatan, 2013.....	97
Tabel 2.55. Populasi Ayam Petelur menurut kabupaten/Kota, Provinsi.....	
Sumatera Selatan, 2013.....	98
Tabel 2.56. Populasi Ayam Pedaging menurut kabupaten/Kota,.....	
Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	99
Tabel 2.57. Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut.....	
Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	100
Tabel 2.58. Lokasi Usulan Pengembangan Kawasan Industri, Provinsi.....	
Sumatera Selatan.....	102
Tabel 2.59. Tempat Pengolahan Sampah, Provinsi Sumatera Selatan,.....	
2012.....	111
Tabel 2.60. Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah.....	
Terpadu, Provinsi Sumatera Selatan. 2013-2014.....	113
Tabel 2.61. Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera selatan.....	
2014.....	114
Tabel 2.62. IKM di Provinsi Sumatera Selatan, 2014.....	115
Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan.....	
Tahun 2016-2035.....	128
Tabel 4.1. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun.....	
2016 -2020, 2021 - 2035.....	137
Tabel 4.2. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2016 -2020,.....	
2021 - 2035.....	141
Tabel 4.3. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber...	
Daya Alam Tahun 2016 -2020, 2021 - 2035.....	142
Tabel 4.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	

	Tahun 2016 -2020, 2021 - 2035.....	143
Tabel 4.5.	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan..... Inovasi Tahun 2016 -2020, 2021 - 2035.....	144
Tabel 4.6.	Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun..... 2016 -2020, 2021 - 2035.....	144
Tabel 4.7.	Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2016 – 2020; 2021- 2035.....	145
Tabel 4.8.	Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang..... Pembangunan Industri Tahun 2016 –2020; 2021- 2035.....	147
Tabel 4.9.	Program Pembangunan Transportasi Tahun 2016 – 2020;..... 2021 - 2035.....	148
Tabel 4.10.	Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik dan..... Telekomunikasi Tahun 2016 – 2035.....	148
Tabel 4.11.	Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 – 2035.....	149
Tabel 4.12.	Program Penyediaan Lahan Untuk Industri Tahun 2016 – 2020; 2021- 2035.....	150
Tabel 4.13.	Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri tahun 2016 – 2035.....	151
Tabel 4.14.	Program Pemberdayaan IKM Tahun 2016 – 2035.....	151
Tabel 4.15.	Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri.... Unggulan Provinsi.....	152
Tabel 4.16.	<i>Long list</i> Komoditas Unggulan Argo, Prov. Sumatera Selatan....	157
Tabel 4.17.	<i>Long list</i> Komoditas Bahan Tambang, Prov. Sumatera Selatan.....	158
Tabel 4.18.	Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan.....	158
Tabel 4.19.	Industri Prioritas dan Jenis Industrinya di Sumatera Selatan.....	159
Tabel 4.20.	Lokus Pembangunan Industri Karet Prov. Sumatera Selatan....	161
Tabel 4.21.	Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Karet.....	162
Tabel 4.22.	Analisis SWOT Industri Karet.....	166
Tabel 4.24.	Rencana Aksi Pengembangan Industri Karet Tahun..... 2016 – 2035.....	167
Tabel 4.25.	Lokus Pembangunan Industri Kopi, Prov. Sumatera Selatan....	170

Tabel 4.26. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Kopi.....	171
Tabel 4.27. Analisis SWOT Industri Kopi.....	175
Tabel 4.28 Sasaran Pembangunan Industri Kopi, Prov. Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	177
Tabel 4.29. Rencana Aksi Pengembangan Industri Kopi, Provinsi..... Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	177
Tabel 4.30. Lokus Pembangunan Industri Pakan, Provinsi Sumatera..... Selatan.....	180
Tabel 4.31. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Pakan.....	180
Tabel 4.32. Analisis SWOT Industri Pakan, Provinsi Sumatera Selatan.....	182
Tabel 4.33. Sasaran Pembangunan Industri Pakan, Provinsi Sumatera..... Selatan, Tahun 2016 - 2035.....	183
Tabel 4.34. Rencana Aksi Pengembangan Industri Pakan, Provinsi..... Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	184
Tabel 4.35. Analisis SWOT Industri Kelapa Sawit.....	187
Tabel 4.36. Sasaran Pembangunan Industri Kelapa Sawit, Provinsi..... Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	188
Tabel 4.37. Rencana Aksi Pengembangan Industri Kelapa Sawit,..... Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	189
Tabel 4.38. Produksi Batu Bara Di Provinsi Sumatera Selatan,..... 2008-2012.....	192
Tabel 4.39. Analisis SWOT Industri Kelapa Batubara.....	194
Tabel 4.40. Rencana Aksi Pengembangan Industri Batubara, Provinsi..... Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035.....	196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Provinsi Sumatera Selatan.....	18
Gambar 2.2.	Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Sumatera Selatan, 2004-2012.....	19
Gambar 2.3.	Garis Kemiskinan (Rp.) dan Angka Kemiskinan (%),..... Provinsi Sumatera Selatan, 2004-2013.....	19
Gambar 2.4.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional, 2004-2012.....	20
Gambar 2.5.	Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional, 2004-2012.....	21
Gambar 2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera..... Selatan terhadap Nasional, 2004-2012.....	22
Gambar 2.7.	Angka dan Trend Pertumbuhan Provinsi Sumatera selatan, tahun 1978 – 2014.....	24
Gambar 2.8.	Angka Ketergantungan dan Penduduk Usia 15-64 tahun, Provinsi Sumatera Selatan, 205-2025.....	28
Gambar 2.9.	Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2016.....	29
Gambar 2.10.	PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB, Juta Rupiah),..... Provinsi Sumatera Selatan, 1976-2013.....	30
Gambar 2.11.	PDRB Menurut Lapangan Usaha (ADHK, juta Rupiah),..... Provinsi Sumatera Selatan, 2000-2012.....	31
Gambar 2.12.	Distribusi Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan..... Menurut Kabupaten/Kota, 2013.....	32
Gambar 2.13.	Distribusi Persentase PDRB Sumatera Selatan..... menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000: Tahun 2008- 2012.....	32
Gambar 2.14.	Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas, Kabupaten/Kota..... Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	34

Gambar 2.15. Peta dan Lokasi Industri berbasis Argo, Provinsi Sumatera Selatan.....	43
Gambar 2.16. Peta dan Lokasi Industri berbasis Batubara, Provinsi Sumatera Selatan.....	44
Gambar 2.18. Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS, Menurut Provinsi, Sumatera 2011.....	46
Gambar 2.19. Volume Air Minum yang Disalurkan, Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	49
Gambar 2.20. Konsumsi BBM Provinsi Sumatera Selatan 2011-2013.....	50
Gambar 2.21. Skematik Struktur Ruang Kawasan.....	65
Gambar 2.22. Rencana Pola Penggunaan Lahan Kawasan Tanjung Api.....	69
Gambar 2.23. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Nonmigas Tahun 2011-2015.....	74
Gambar 2.24. Grafik Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB menurut Kabupaten Kota, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2014.....	75
Gambar 2.25. Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2014.....	76
Gambar 2.26. Grafik Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB Tahun 2014.....	77
Gambar 2.27. Desa/Kelurahan menurut keberadaan jenis Industri Kecil dan Mikro, Sumatera Selatan, 2013.....	81
Gambar 2.28. Ekspor Menurut Komoditas, Provinsi Sumatera Selatan (%), 2013.....	85
Gambar 2.29. Import menurut Komoditas, Provinsi Sumatera Selatan, 2013.....	85
Gambar 2.30. Peta Lokasi Usulan Kawasan Industri di Sumatera Selatan.....	102
Gambar 2.31. Kawasan Industri di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.....	104
Gambar 2.32. Kawasan Industri Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.....	105

Gambar 2.33. Kawasan Industri di Kota Palembang Provinsi Sumatera.....	
Selatan.....	106
Gambar 2.34. Kawasan Industri Industri di Kabupaten Banyuasin.....	
Provinsi Sumatera Selatan.....	107
Gambar 2.35. Kawasan Industri di Kabupaten Penukal Abab Lematang....	
Iilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan.....	108
Gambar 2.36. Zona KEK Tanjung Api-api Provinsi Sumatera Selatan.....	109
Gambar 2.37. Jumlah Industril Kecil dan Menengah Formal dan.....	
Non-Formal, Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera	
Selatan, 2014.....	115
Gambar 3.1. Thema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Tahun..	
2014-2018.....	119
Gambar 3.2. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, 2003 – 2023.....	120
Gambar 3.3. Proyeksi Kontribusi Industri tanpa Migas terhadap PDRB....	
dan Pertumbuhan sektor Industri Tanpa Migas, Provinsi.....	
Sumatera Selatan, 2016-2015 – 2023.....	124
Gambar 3.4. Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa.....	
Migas dan Nilai Ekspor Industri Tanpa Migas, Provinsi.....	
Sumatera Selatan, 2016– 2023.....	125
Gambar 3.5. Proyeksi Penanaman Modal Asing dan Penanamam Modal..	
Dalam Negeri, Provinsi Sumatera Selatan, 2016– 2035.....	126
Gambar 3.6. Proyeksi Penambahan Populasi Industri Skala Besar yang	
Diciptakan, Provinsi Sumatera Selatan, 2016– 2035.....	126
Gambar 4.1. Gambaran Rencana Induk Pembangunan Industri, RIPIN,...	
KIN dan RPIDA.....	132
Gambar 4.2. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan..	136

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kinerja perekonomian nasional terlihat masih terjaga baik dengan pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 persen; sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhannya mencapai 6,5 persen.

Di saat kondisi ekonomi global mulai pulih, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Selanjutnya, ekspor dan investasi harus didorong untuk tumbuh tinggi, agar ekonomi nasional dapat meningkat dengan lebih baik, terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif padat karya agar dapat memperluas kesempatan kerja. Hal ini sangat penting karena perluasan kesempatan kerja akan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-

growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment).

Tabel 1.1. Isu Strategi dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Provinsi
1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi.	1. Tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi
2. Percepatan pembangunan infrastruktur domestic connectivity	2. Pengembangan SDM, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan sasaran meningkatnya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatnya mutu serta relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja dan meningkatnya penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu
3. Percepatan pengurangan kemiskinan	3. Pengembangan agribisnis dengan sasaran penguatan ekonomi kerayatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir

4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia	4. Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan
	5. Percepatan penyediaan infrastruktur strategis, dengan sasaran percepatan realisasi pembangunan dan berfungsinya pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api, jaringan rel kereta api, monorel, jalan dan jembatan.
	6. Pembangunan pusat olah raga nasional, dengan sasaran pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas olah raga, Jakabaring <i>sport city</i> dan Sekolah Tinggi Olahraga
	7. Keberlanjutan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Sumber: Bappenas: Memantapkan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014.

Dalam buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014, Bappenas menuliskan isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang industri adalah Pengembangan agribisnis dengan sasaran penguatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan mendorong pertumbuhan industri hilir dan Pengembangan sumber daya energi, dengan sasaran

meningkatnya pemanfaatan dan produksi batubara, geothermal, CBM dan energi terbarukan

Sesuai amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang dibuat harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPN) dan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional. Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Evaluasinya dilakukan oleh Pemerintah.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Industri Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota; serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana itu selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun paling sedikit memperhatikan:

- Potensi sumber daya Industri daerah.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri.

Sehubungan hal tersebut, maka Ditjen PPI memberikan fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) untuk daerah-daerah di Sumatera. Untuk kegiatan fasilitasi tersebut maka diperlukan kajian dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebagai rancangan bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah.

RIPIN membagi Indonesia atas 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Provinsi Sumatera Selatan terletak pada WPI Sumatera Bagian Selatan. WPI Sumatera Bagian Selatan meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung.

Selanjutnya RIPIN menetapkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi dalam WPI. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 (dua) WPI, yakni Muara Enim dan Banyuasin.

Pengembangan Industri Propinsi Sumsel memerlukan rumusan Visi, Misi, dan sebuah skenario pembangunan yang terukur (kegiatan, jadwal, sumberdaya, penanggung jawab, program, sasaran, output yang jelas), dan ini dapat dilakukan dengan metodologi Perancangan *Apresiasi-Appreciative Inquiry* (merancang dengan mendaya gunakan otak kanan), yakni dimulai dengan membayangkan/menghadirkan Pembangunan Cluster Industri di Propinsi Sumsel pada suatu waktu tertentu misalnya 2035, serta

dengan menetapkan situasi fundamental hari ini (2015), yakni peta pilihan Industri Propinsi Sumsel beserta seluruh potensinya. Proses penyusunan skenario ini digambarkan dalam bagan sederhana berikut :

Pentahapan Pembangunan Industri Sumsel

Pentahapan pembangunan industri prioritas dilakukan dalam jangka menengah (sesuai periode perencanaan pemerintah) dan jangka panjang (sesuai dengan periode berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Sumsel diuraikan sebagai berikut:

Tahap I (2015-2020)

Arah rencana pembangunan industri Sumsel pada tahap ini dimaksudkan untuk "meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, hasil laut, dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi industri."

Tahap II (2020-2025)

Arah rencana pembangunan industri Sumsel pada tahap ini dimaksudkan untuk "mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi industri, serta didukung oleh SDM yang berkualitas."

Tahap III (2025-2035)

Arah rencana pembangunan industri Sumsel pada tahap ini dimaksudkan untuk "menjadikan Sumsel sebagai Provinsi yang mempunyai Industri Tangguh dan dalam yang bercirikan struktur industri berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi industri."

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- 6) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan 2016-2035 adalah untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan diturunkan dengan dan dari Visi dan Misi pembangunan industri nasional. Kemudian dijabarkan ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan pada periode

2016-2035. Tujuan penyusunan naskah akademis RPIP ini adalah menjadi pedoman pembangunan sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan periode 2016-2035.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi di Wilayah Sumatera dimaksudkan dan ditujukan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam draft Peraturan Daerah. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan pengkajian Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan ini adalah :

1. Terpetakannya kondisi aktual Pembangunan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan
2. Hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk masukan dan rujukan dalam Penyusunan Rancangan Bahan Masukan Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Sumatera Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2035 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, sistematika penulisan dan maksud/tujuan;

Bab II Gambaran Umum Provinsi Aceh, menguraikan Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Sumberdaya Alam dan Daya Saing Daerah; Aspek Perkembangan Sektor Industri; dan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah;

Bab III Visi, Misi, Strategi dan Sasaran Pembangunan Industri DaerahPenjelasan secara rinci mengenai visi,misi dan strategi pembangunan industri Aceh beserta sasaran pembangunan industri di Aceh;

Bab IV Program dan Rencana Aksi Pembangunan Industri Provinsi Aceh, menguraikan program dan rencana aksi yang mendukung pembangunan industri dari berbagai aspek meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan IKM, perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri, serta pembangunan industri unggulan Provinsi Sumatera Selatan;

Bab V Penutup, yang merupakan ringkasan keterkaitan Bab I sampai dengan Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan tahun tahun 2016-2020 dan lima tahunan pada periode 2021-2025, periode 2025-2030, dan periode 2031-2035.

BAB 1

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM

2.1.1. Keadaan Umum Wilayah

Provinsi Sumsel terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan antara 102 derajat dan 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 8.702.742 hektar.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan :

- sebelah Utara berbatasan dengan Prov. Jambi
- sebelah Timur berbatasan dengan Prov. Kep. Bangka Belitung
- sebelah Selatan berbatasan dengan Prov. Lampung, dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Prov. Bengkulu

A. Topografis

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah pantai timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Vegetasinya berupa tumbuhan *palmasae* dan kayu rawa (*bakau*). Sedikit ke arah barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih jauh masuk ke dalam wilayah daratan bagian barat semakin berbukit-bukit konturnya.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat-Timur dengan ketinggian antara 400-1.700 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara 400-500 mdpl mencakup areal seluas 37 %. Wilayah barat merupakan wilayah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 900-1.200 mdpl. Sedangkan kearah timur lahannya berbukit dan bergelombang. Pegunungan Bukit Barisan ini terdiri dari Puncak Gunung Seminung (1.964 mdpl) kab. OKU Selatan, Gunung Dempo (3,159 mdpl) Kota Pagar Alam, Gunung Patah (1.107 mdpl), dan Gunung Bungkok (2.125 mdpl). Disebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng. Sepanjang wilayah ini terdapat daerah-daerah perkebunan karet, kelapa sawit dan pertanian seperti kopi, teh dan berbagai macam sayuran.

Tabel 2.1. Ketinggian Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Ketinggian (m dpl)
1	Ogan Komering Ulu	Baturaja	70
2	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	18
3	Muara Enim	Muara Enim	45
4	Lahat	Lahat	102
5	Musi Rawas	Muara Beliti	120
6	Musi Banyuasin	Sekayu	15
7	Banyuasin	Pangkalan Balai	63
8	OKU Selatan	Muara Dua	133
9	OKU Timur	Martapura	83
10	Ogan Ilir	Indralaya	25
11	Empat Lawang	Tebing Tinggi	130
12	Kota Palembang	Palembang	8
13	Kota Prabumulih	Prabumulih	95
14	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	289
15	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	120

Sumber : BPS Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka Tahun 2015. (kabupaten/Kota belum tercantum)

B. Keadaaan Tanah

Keadaan tanah di Sumatera Selatan terdiri atas 11 jenis, yaitu:

1. Organosol : di sepanjang pantai dan dataran rendah.
2. Litosol : di pinggiran pegunungan terjal wilayah Danau Ranau dengan patahan di sepanjang Bukit Barisan.
3. Alluvial : di sepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering dan punggung Bukit Barisan.
4. Hidromorf : di dataran rendah Musi Rawas dan Muara Enim.
5. Klei Humus : lihat Organosol.
6. Regosol : di sekeliling Pantai Timur, di pinggiran pegunungan terjal Danau Ranau dan kerucut vulkan.
7. Andosol : di semua kerucut vulkan muda dan tua, umumnya jenis tanah ini ditemui di wilayah dengan ketinggian hingga 100 meter di atas permukaan laut.
8. Redzina : di sekitar kota Baturaja.
9. Latosol : umumnya terdapat di wilayah tanah kering.
10. Lateritik : merupakan dataran rendah di sekitar Martapura.
11. Podzolik : merupakan dataran rendah dan di pegunungan Bukit Barisan.

C. Hidrologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sungai-sungai besar yang dapat dilayari. Namun saat ini karena proses pendangkalan sungai, sungai-sungai tersebut tidak dapat dilayari lagi oleh Kapal-kapal besar. Kebanyakan sungai-sungai tersebut bermata air dari Bukit

Barisan, kecuali sungai Mesuji, sungai Lalan dan sungai Banyuasin. Diantara sungai tersebut yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi. Sedangkan sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi. (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3). Tabel 2.3. menunjukkan Sub DAS dengan panjang sungai dan anak sungai di Provinsi Sumatera Selatan. Diperlihatkan bahwa Sub Das Komering mempunyai sungai terpanjang sebesar 360 Km dengan anak sungai Way Hitam, Sungai Belitang, Sungai Macak, Sungai Selangis, dan Sungai Endikat.

Tabel 2.2. Sub DAS Pada Wilayah DAS Musi Provinsi Sumatera Selatan

No	SUB DAS	Panjang Sungai (Km)	Anak Sungai
1	Komering	360	Way Hitam, S. Belitang, S. Macak
2	Lematang	300	S. Selangis, S. Endikat
3	Musi Hulu	33	-
4	Rawas	230	S. Landai, S. Palau
5	Lakitan	150	-
6	Ogan	350	S. Randu
7	Kelingi	80	A. Satan, A. Beliti, A. Kesei, A. Milang, A. Selat
8	Kikim	41	S. Suban, S. Resik, S. Kemumu, S. Bulu
9	Semangus	100	S. Teras, A Keruh, S. Hitani, S. Nau
10	Batanghari Leko	200	S. Kapas, S. Meranti, S. Rampasan, S. Angit
11	Banyuasin	186	S. Senda, S. Ibul, S. Kepahiang, S. Mangsang, S. Kendawang, S. Titikan, S. Mendes, S. Kandang
12	Sugihan	132	S. Simpang, S. SUjan
PROVINSI SUMATERA SELATAN		2.162	

Sumber : BPS Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka Tahun 2014.

Tabel 2.3. Nama Sungai Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Sungai
1	Ogan Komering Ulu	Sungai Ogan
2	Ogan Komering Ilir	Sungai Komering
3	Muara Enim	A. Lematang, A. Enim
4	Lahat	A. Lematang, A. Kikim
5	Musi Rawas	A. Rawas, Anak Musi
6	Musi Banyuasin	A. Musi, A. Batanghari Leko
7	Banyuasin	A. Musi, A. Banyuasin
8	OKU Selatan	A. Komering
9	OKU Timur	A. Komering
10	Ogan Ilir	A. Ogan
11	Empat Lawang	A. Musi, A. Lintang Kiri
12	Kota Palembang	Air Musi
13	Kota Prabumulih	Air Lambang
14	Kota Pagar Alam	Air Cowong
15	Kota Lubuk Linggau	Air Kelingi, Sungai Belaki

Sumber : BPS Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka Tahun 2014.

D. Klimatologi

Musim yang terdapat di Sumatera Selatan sama seperti umumnya yang terjadi di bagian lain dari Indonesia. Di Indonesia, hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia. Angin ini tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra pasifik mengakibatkan musim hujan. Keadaan seperti itu terjadi setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan suhu udara bervariasi 26,5°C sampai 28,4°C dan tingkat kelembaban 72 - 89 persen. Pada Tahun 2012 musim hujan relatif tinggi terjadi pada bulan November curah hujan berkisar 1/3 – 650/24 mm³/hari. Musim panas atau kemarau biasanya dimulai bulan Juni sampai September setelah masa transisi bulan Mei.

Tabel 2.4. Klimatologi Provinsi Sumatera Selatan

No	Bulan	Suhu Udara Rata-Rata (°C)	Kelembapan Udara (%)	Banyak Hari Hujan	Curah Hujan (mm)
1	Januari	27,2	85	19	201,4
2	Februari	26,5	89	25	347,9
3	Maret	27,2	86	19	245,9
4	April	27,2	85	25	405
5	Mei	27,9	83	18	204,8
6	Juni	27,7	81	10	199,3
7	Juli	27,2	80	1	85,9
8	Agustus	27,6	76	7	500,9
9	September	28,4	72	3	1
10	Oktober	27,9	80	16	226
11	November	27,2	86	24	650
12	Desember	26,9	88	27	465

Sumber : BPS Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka Tahun 2015.

Tipe iklim dilihat dari sub DAS pada wilayah DAS Musi merupakan iklim Tipe A dan Tipe B, dimana Iklim A merupakan iklim tropis dan iklim Tipe B merupakan iklim gurun tropis/iklim kering. Rata-rata Sub DAS yang ada di Prov. Sumatera Selatan bervariasi iklim tipe A dan B. Daerah dengan iklim tipe A pada Sub DASKSemangus, Batanghari Leko, Musi Hilir, Banyuasin, Batang Peledas, Baung, Bungin, Calik, Deras, Macan, dan Medak.

Daerah dengan iklim tipe A dan B adalah Komering, Lematang, Musi Hulu, Rawas, Lakitan, Ogan, Kelingi, Saleh, dan Sugihan (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. Sebaran Tipe Iklim Berdasarkan Sub DAS pada DAS Musi
Provinsi Sumatera Selatan

No	Sub DAS	Luas Sub DAS (Ha)	Tipe Iklim
1	Komering	915.379,82	Tipe A & B
2	Lematang	877.281,35	Tipe A & B
3	Musi Hulu	345.165,47	Tipe A & B
4	Rawas	586.837,81	Tipe A & B

No	Sub DAS	Luas Sub DAS (Ha)	Tipe Iklim
5	Lakitan	298.175,61	Tipe A & B
6	Ogan	936.847,52	Tipe A & B
7	Kelingi	172.519,93	Tipe A & B
8	Kikim	151.326,09	Tipe A
9	Semangus	271.844,95	Tipe A
10	Batanghari Leko	400.426,46	Tipe A
11	Musi Hilir	224.638,63	Tipe A
12	Banyuasin	157.742,29	Tipe A
13	Batang Peledas	84.456,05	Tipe A
14	Baung	69.014,40	Tipe A
15	Bungin	52.717,57	Tipe A
16	Calik	414.231,95	Tipe A
17	Deras	86.596,98	Tipe A
18	Macan	167.353,82	Tipe A
19	Medak	152.744, 98	Tipe A
20	Saleh	302.089,31	Tipe A & B
21	Sugihan	303.402,36	Tipe A & B

Sumber : BPS Sumatera Selatan, Sumsel Dalam Angka Tahun 2015. Tipe A : Iklim Tropis, Tipe B: Iklim gurun tropis atau iklim kering.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam, Kota Lubuklinggau. Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 17 Kabupaten/Kota terbagi atas 231 Kecamatan, 3234 desa pada tahun 2014 (Tabel 2.6).

Tabel 2.6. Wilayah Administrasi di Sumatera Selatan, 2011, 2012, 2013, dan 2014

Nomor	Wilayah Administrasi	tahun			
		2011 (*)	2012 (**)	2013 (***)	2014 (****)
1	kabupaten/Kota	15	15	15	17
2	Kecamatan	220	225	231	231
3	Desa/kelurahan	3.183	3.206	3.219	3.234

Sumber : *Masterfile* Desa Provinsi Sumatera Selatan, *) Kondisi akhir Februari 2011, (**) Kondisi akhir Juni 2012, (***) Kondisi akhir Juni 2013, ****) Kondisi akhir Juni 2014

Tabel 2.7. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, Juni 2014

No.	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/kelurahan
1	Ogan Komering Ulu	12	157
2	Ogan Komering Ilir	18	327
3	Muara Enim	20	255
4	Lahat	22	376
5	Musi Rawas	14	199
6	Musi Banyuasin	14	240
7	Banyuasin	19	304
8	Ogan Komering Ulu Selatan	19	259
9	Ogan Komering Ulu Timur	20	309
10	Ogan Ilir	16	241
11	Empat Lawang	10	156
12	Penukal Abab Lematang Ilir	5	71
13	Musi Rawas Utara	7	89
14	Kota Palembang	16	107
15	Kota Prabumulih	6	37
16	Kota Pagar Alam	5	35
17	Kota Lubuklinggau	8	72
Jumlah		231	3234

Sumber : Master file Desa Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Kabupaten dengan jumlah kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 2.7) mulai dari kecamatan dengan jumlah teebanyak hingga tersedikit berturut-turut adalah Lahat, Muara Enim, Ogan Komering, Ulu Timur, Banyuasin, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Palembang, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Empat Lawang, Kota Lubuklinggau, Musi Rawas Utara, Kota Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Pagar Alam.

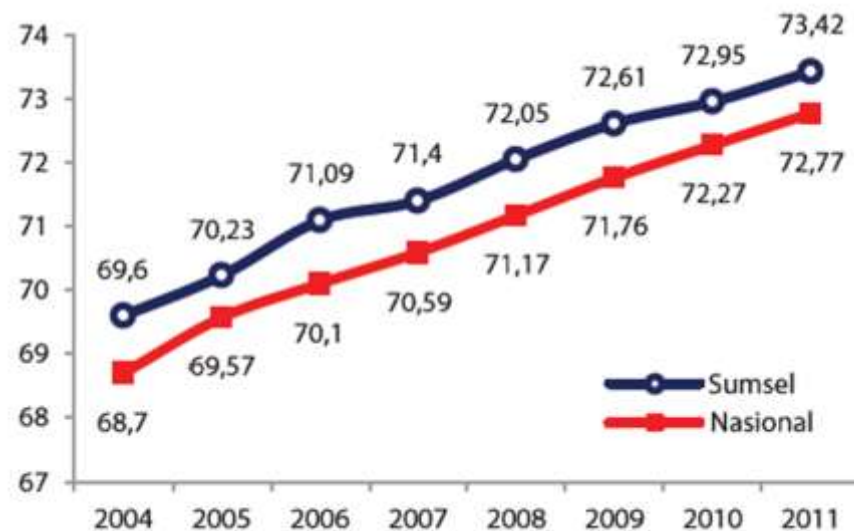


Gambar 2.1. Provinsi Sumatera Selatan

Berikut diberikan beberapa kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

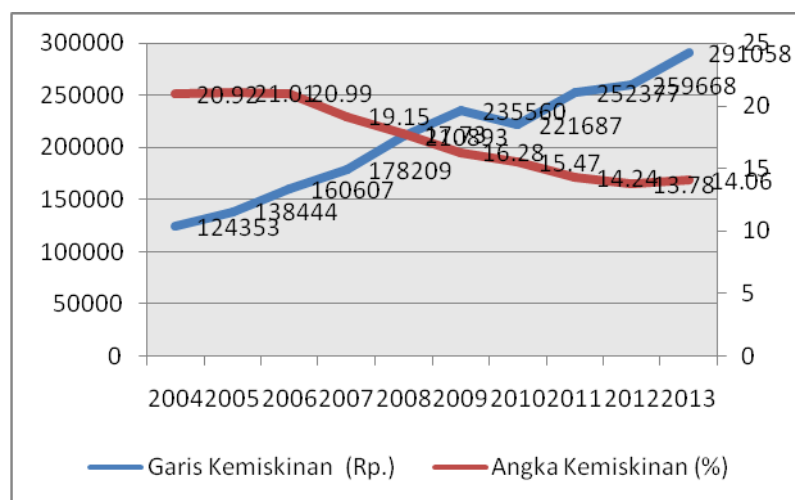
Dalam hal pembangunan manusia, yang diproxi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia pada umumnya pada periode 2004-2011. Pada periode ini IPM Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten berada di atas IPM Indonesia. Pada tahun 2004, IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,6 sementara itu pada tahun yang sama IPM Indonesia sebesar 68,7. Pada tahun 2005 trend IPM Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia membaik

dengan peningkatan IPM. IPM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005 sebesar 70,23 dan IPM Indonesia sebesar 69,57. Pada tahun 2011, IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 73,42 dan IPM Indonesia sebesar 72,77. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan terus menerus membenahi pembangunan berbasis pemberdayaan Sumber Daya Manusia.



Sumber : BPS, diolah

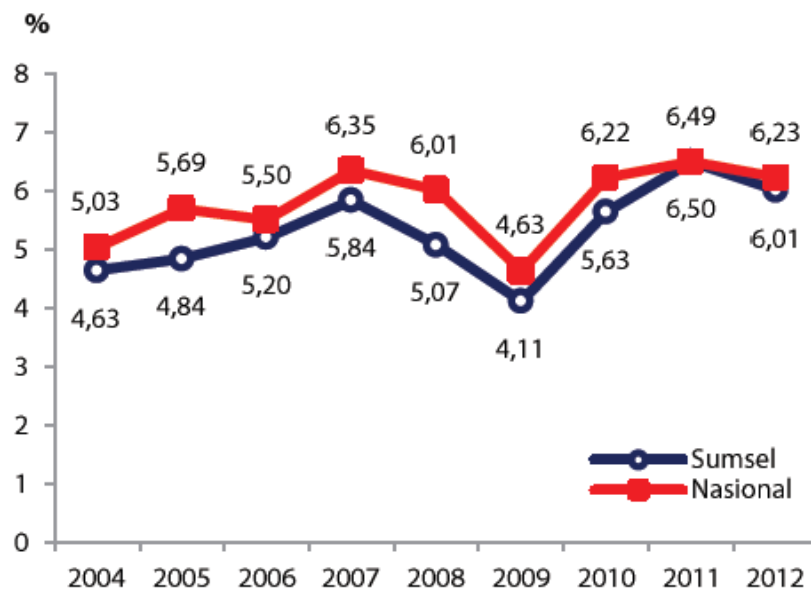
Gambar 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Nasional, 2004-2011



Sumber: World Bank, 2015

Gambar 2.3. Garis Kemiskinan (Rp.) dan Angka Kemiskinan (%), Provinsi Sumatera Selatan, 2004-2013

Pada Gambar 2.3 diperlihatkan Garis Kemiskinan (Rp.) dan Angka Kemiskinan (%) di Provinsi Sumatera Selatan. Garis kemiskinan pada tahun 2004 sebesar Rp. 124.353/kapita/bulan, dan meningkat hingga sebesar Rp. 291.058/kapita/bulan pada tahun 2013. Pada sisi lain terlihat bahwa persentase penduduk miskin menurun terus dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Pada tahun 2004, di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebanyak 20,92 % penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walau naik sedikit pada tahun 2005 dan tahun 2006, Angka Kemiskinan terus menurun hingga menjadi 14,06 % tahun 2013

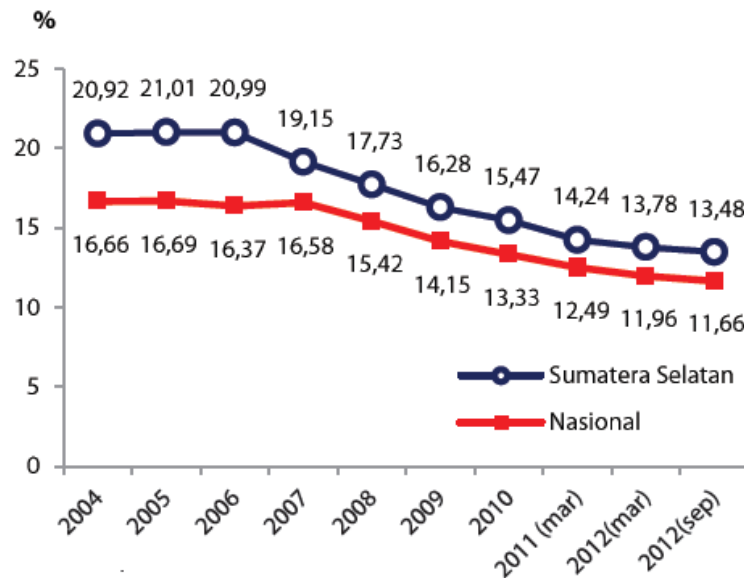


Sumber : BPS, diolah

Gambar 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional, 2004-2012

Trend angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan dalam gambar 2.4. pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan secara umum berada di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2004, angka pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 4,63 dan pada saat yang sama angka

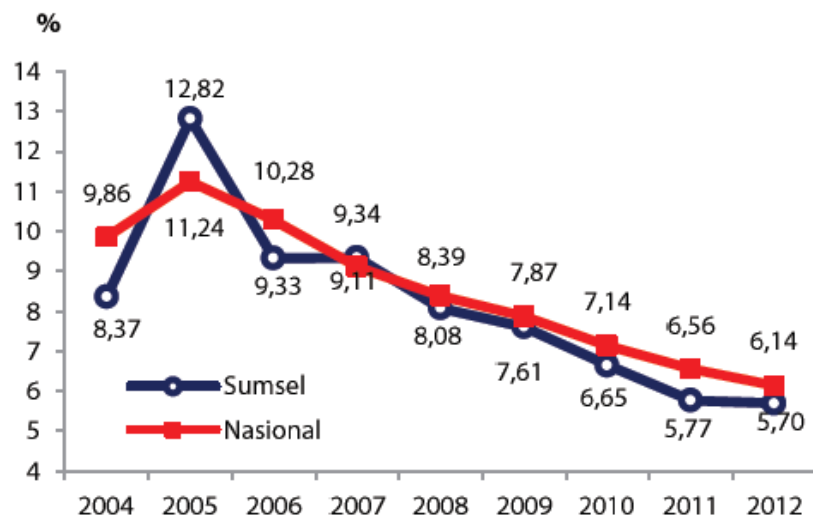
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03. Pada tahun 2012, angka pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,01 dan Indonesia sebesar 6,23.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 2.5. Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Nasional, 2004-2012

Gambar 2.5 memeplihatkan perbandingan Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan dengan Indonesia, 2004-2012. Ditunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan di atas persentase penduduk miskin nasional.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi
 Sumatera Selatan terhadap Nasional, 2004-2012

Gambar 2.6. membandingkan TPT Provinsi Sumatera Selatan dengan TPT nasional. Terlihat bahwa TPT Provinsi Sumatera Selatan tidak jauh berbeda dengan TPT Nasional. Terlihat juga bahwa trend TPT Provinsi Sumatera Selatan dan TPT Nasional tidak jauh berbeda.

Tabel 2.8. Pulau Bernama dan Belum Bernama Menurut Provinsi
 Sumatera dan Indonesia, 2009

Provinsi	Pula Bernama	Pulau Belum Bernama	Jumlah
Aceh	205	458	663
Sumatera Utara	250	169	419
Sumatera Barat	210	181	391
Riau	73	66	139
Kep. Riau	1.436	972	2.408
Jambi	16	3	19
Sumatera Selatan	43	10	53
Kep. Bangka Belitung	311	639	950
Bengkulu	23	24	47
Lampung	87	101	188
Sumatera	2.654	2.623	5.277

Provinsi	Pula Bernama	Pulau Belum Bernama	Jumlah
Indonesia	8.651	8.853	17.504

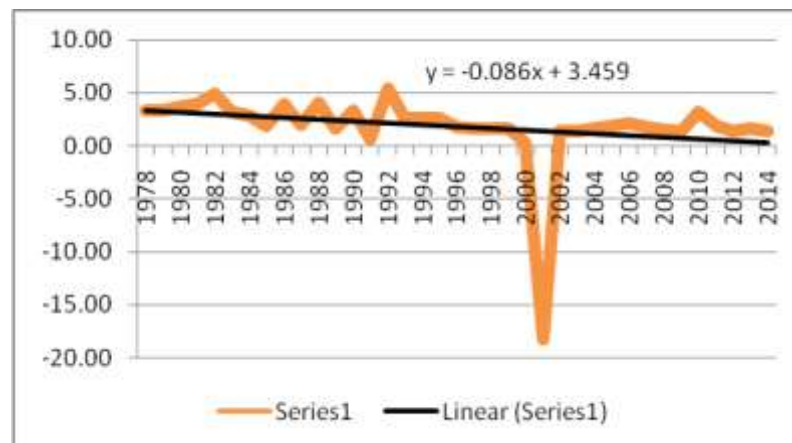
Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

Pada tahun 2009, di Pulau Sumatera terdapat sebanyak 5.277 pulau (2.654 pulau yang sudah diberi nama dan 2.523 pulau belum bernama. Sementara itu, pada tahun yang sama terdapat sebanyak 8.651 pulau di Indonesia yang sudah diberi nama dan sebanyak 8.853 pulau yang belum mempunyai nama. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 43 pulau yang sudah mempunyai nama dan 10 pulau yang belum mempunyai nama. Dengan demikian, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 53 pulau.

2.1.2. Demografi

Dengan luas wilayah 91.774,99 Km² (Permendagri Nomor 39 Tahun 2015) maka kepadatan penduduk provinsi Sumatera Selatan adalah 89.10 (Tabel 2.10) jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 1,348%/tahun (2016).

Menurut kelompok umur, penduduk provinsi/kabupaten/ Sumatera Selatan tahun 2010 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar.



Sumber : Data Series Sumatera Selatan, 2015

Gambar 2.7. Angka dan Trend Pertumbuhan Provinsi Sumatera selatan, tahun 1978 – 2014

Gambar 2.7 memperlihatkan Angka dan Trend Pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat dari Trend linier bahwa setiap tahun Angka Pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Selatan berkurang sebesar 0,0865. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, penduduk Sumatera Selatan mengalami laju pertumbuhan yang semakin mengecil.

Tabel 2.9 memperlihatkan proyeksi penduduk (Laki-laki + Perempuan) Provinsi Sumatera Selatan 2010-2010. Pada tahun 2010 penduduk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 7,481,604 jiwa, tahun 2011 sebanyak 7.598.529, tahun 2012 sebanyak 7.714.326, tahun 2013 sebanyak 7.828.740, tahun 2014 sebanyak 7.941.495 orang, tahun 2015 sebanyak 8.052.315 orang, tahun 2016 sebanyak 8.160.901, tahun 2017 sebanyak 8.266.983 orang, tahun 2018 sebanyak 8.370.320, tahun 2019 sebanyak 8.470.683, dan tahun 2020 sebanyak 8.567.923 orang.

Pada tahun 2010, kabupaten/Kota dengan penduduk terbesar adalah Kota Palembang dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kota Pagar Alam. Pada tahun 2020, Kota Palembang akan mempunyai jumlah penduduk terbanyak (1,681,374 jiwa) dan Kota

Pagar Alam akan mempunyai jumlah penduduk terkecil (140,402 jiwa).

Tabel 2.10 memperlihatkan kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 adalah sebesar 89,1 jiwa/km persegi. Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah Kota Palembang (4.283,27 jiwa/km persegi), Kota Lubuklinggau (530,9 jiwa/km persegi), Kota Prabumulih (425,89 jiwa/km persegi), Kota Pagar Alam (233,66 jiwa/km persegi), Ogan Komering Ulu Timur (192,53 jiwa/km persegi), Ogan Ilir (164,94 jiwa/km persegi), Ogan Komering Ulu (127,86 jiwa/km persegi), Penukal Abab Lematang Ilir (99,03 jiwa/km persegi), Lahat (97,5 jiwa/km persegi), Empat Lawan (72,49 jiwa/km persegi), Muara Enim (70,98 jiwa/km persegi), Banyuasin (67,74 jiwa/km persegi), Ogan Komering Ulu Selatan (63,45 jiwa/km persegi), Ogan Komering Ilir (46,81 jiwa/km persegi), Musi Banyuasin 42,88 jiwa/km persegi, Musi Rawas (32,08 jiwa/km persegi), dan yang penduduknya paling jarang adalah kabupaten Musi Rawas Utara (14,99 jiwa/km persegi).

Tabel 2.9. Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Laki-laki + Perempuan) , 2010-2020

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ogan Komering Ulu	324,917	330,025	335,094	339,973	344,932	349,787	354,488	359,092	363,617	367,865	372,123
Ogan Komering Ilir	729,415	741,294	753,310	764,880	776,263	787,513	798,482	809,203	819,570	829,800	839,625
Muara Enim	552,778	562,411	571,986	581,587	590,975	600,398	609,607	618,762	627,818	636,815	645,600
Lahat	370,790	375,582	380,119	384,633	389,034	393,235	397,424	401,494	405,524	409,382	413,206
Musi Rawas	357,112	362,608	368,111	373,696	378,987	384,333	389,239	394,384	399,075	403,819	408,282
Musi Banyuasin	562,979	572,911	582,718	592,422	602,027	611,506	620,738	629,791	638,625	647,075	655,401
Banyu Asin	752,193	764,392	776,393	788,291	799,998	811,501	822,575	833,625	844,175	854,628	864,510
Ogan Komering Ulu Selatan	319,418	324,711	329,683	334,709	339,424	344,074	348,574	352,926	357,105	361,085	364,982
Ogan Komering Ulu Timur	611,479	619,391	627,086	634,675	642,206	649,394	656,568	663,481	670,272	676,797	683,332
Ogan Ilir	382,014	387,487	392,896	398,275	403,828	409,171	414,504	419,773	425,032	430,095	435,092
Empat Lawang	221,583	225,090	228,416	231,726	234,880	238,118	241,336	244,312	247,285	250,209	253,272
Penukal Abab Lematang Ilir	166,006	168,729	171,514	174,184	176,936	179,529	182,219	184,671	187,281	189,764	192,199
Musi Rawas Utara	169,891	172,620	175,282	177,820	180,266	182,828	185,315	187,635	189,895	192,199	194,405
Kota Palembang	1,468,007	1,490,576	1,513,424	1,535,936	1,558,494	1,580,517	1,602,071	1,623,099	1,643,488	1,662,893	1,681,374
Kota Prabumulih	163,506	166,312	169,104	171,804	174,477	177,078	179,563	182,128	184,425	186,834	188,929
Kota Pagar Alam	126,512	127,971	129,597	131,111	132,498	133,862	135,328	136,605	137,909	139,194	140,402
Kota Lubuklinggau	203,004	206,419	209,593	213,018	216,270	219,471	222,870	226,002	229,224	232,229	235,189
Jumlah	7,481,604	7,598,529	7,714,326	7,828,740	7,941,495	8,052,315	8,160,901	8,266,983	8,370,320	8,470,683	8,567,923

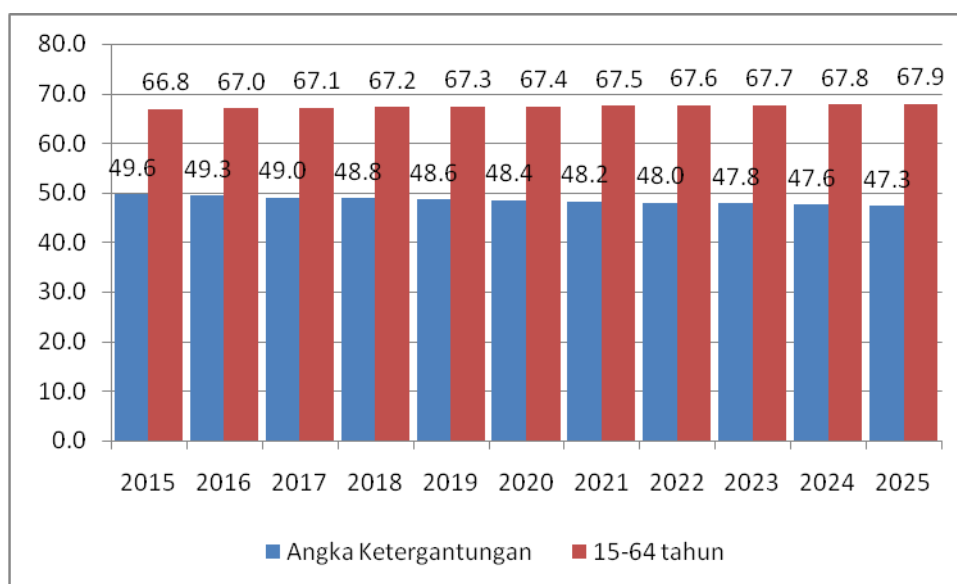
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.10. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Kabupaten Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2014

No.	Kab/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/km ²)
		Lk	Pr				
1	Ogan Komering Ulu	181,108	173,380	354,488	1,34	4.797,06	127,86
2	Ogan Komering Ilir	408,282	390,200	798,482	1,39	18.359,04	46,81
3	Muara Enim	310,098	299,509	609,607	1,53	7.383,90	70,98
4	Lahat	202,796	194,628	397,424	1,07	5.311,74	97,50
5	Musi Rawas	199,108	190,131	389,239	1,28	6.350,10	32,08
6	Musi Banyuasin	317,725	303,013	620,738	1,51	14.266,26	42,88
7	Banyuasin	419,567	403,008	822,575	1,36	11.832,99	67,74
8	Ogan Komering Ulu Selatan	182,924	165,650	348,574	1,31	3.370,00	63,45
9	Ogan Komering Ulu Timur	335,283	321,285	656,568	1,10	5.493,94	192,53
10	Ogan Ilir	207,798	206,706	414,504	1,30	2.666,09	164,94
11	Empat Lawang	123,133	118,203	241,336	1,36	2.256,44	72,49
12	Penukal Abab Lematang Ilir	91,592	90,627	182,219	1,39	1.840,00	99,03
13	Musi Rawas Utara	93,325	91,990	185,315	1,28	6.008,55	14,99
14	Kota Palembang	802,990	799,081	1,602,071	1,36	369,22	4.283,27
15	Kota Prabumulih	90,403	89,160	179,563	1,40	633,66	425,89
16	Kota Pagar Alam	69,304	66,024	135,328	1,10	401,5	233,66
17	Kota Lubuklinggau	111,704	111,166	222,870	1,55	251,94	530,90
	Sumatera Selatan	4.147.140	4.013.761	8.160.901	1,348	91.592,43	89,10

Sumber : BPS, Bappenas, dan UNFPA (2015) Proyeksi Penduduk Indonesia dan Sumatera Selatan dalam Angka 2014.

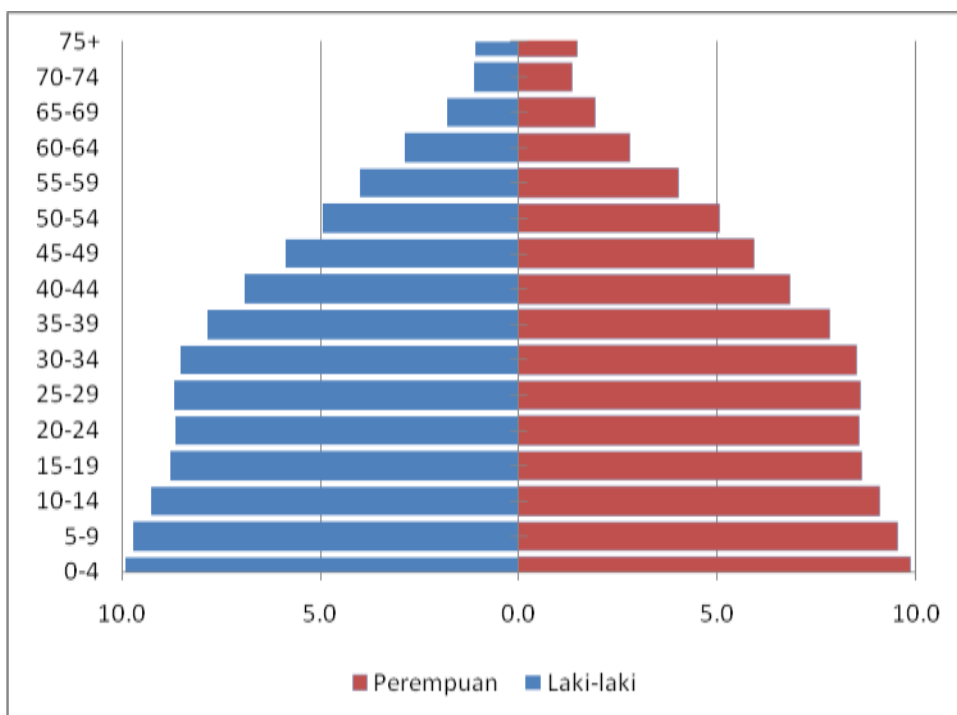
Gambar 2.8 memperlihatkan Proyeksi Angka Ketergantungan dan Proyeksi Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Proporsi Penduduk Umur 15-64 pada Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 (66,8%), tahun 2016 (67,0%) tahun 2017 (67,1%), tahun 2018 (67,2%), tahun 2019 (67,3%), tahun 2020 (67,4%), dan tahun 2025 (69,9%). Makna dibalik angka ini adalah bahwa hingga tahun 2025, Proporsi Penduduk usia kerja di Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami peningkatan dari 66,8% tahun 2015 menjadi 69,9% tahun 2025.



Sumber: BPS, Bappenas, dan UNFPA (2015) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Diolah

Gambar 2.8. Angka Ketergantungan dan Penduduk Usia 15-64 tahun, Provinsi Sumatera Selatan, 2015-2025

Angka ketergantungan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015 (49,6%), 2016 (49,3%), tahun 2017 (49,0%), tahun 2018 (48,8%), tahun 2019 (48,6%), tahun 2020 (48,4%) dan tahun 2025 (47,3%). Hingga tahun 2025, Provinsi Sumatera Selatan masih mengalami penurunan dalam proporsi angka ketergantungan. Hal ini mengindikasikan peluang besar yang masih dimiliki Provinsi Sumatera Selatan.



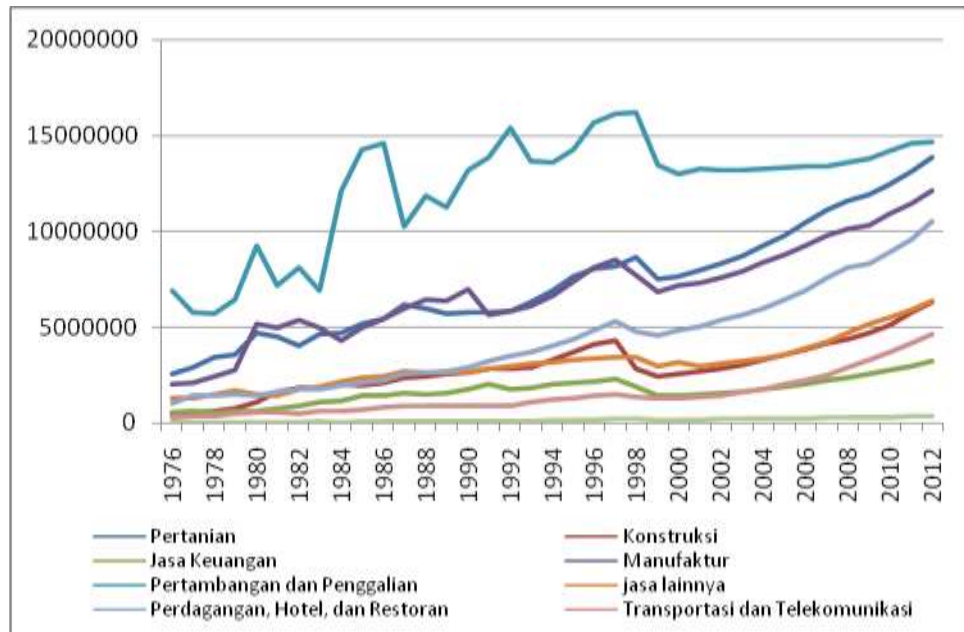
Sumber: BPS, Bappenas, dan UNFPA (2015) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, diolah

Gambar 2.9. Piramida Penduduk Provinsi Sumatera Selatan, 2016

Pada tahun 2016, menurut struktur umur diperlihatkan dalam piramida penduduk (Gambar 2.9). Penduduk Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi penduduk usia 0-4 tahun hingga 35-39 tahun. Pada tahun 2016, Provinsi Sumatera Selatan masih mempunyai proporsi penduduk balita, penduduk 5-9 tahun, dan 10-14 tahun yang cukup besar. Penduduk usia 15-34 tahun cukup konstan dan terjadi penurunan proporsi penduduk mulai umur 40-44 tahun. Hal ini terjadi bagi penduduk Laki-laki maupun pada penduduk Perempuan.

Sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Sumatera Selatan adalah 3.692.806 orang pada tahun 2014 masih didominasi penduduk yang bekerja di sektor Primer (pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan) sebesar 43,37%.

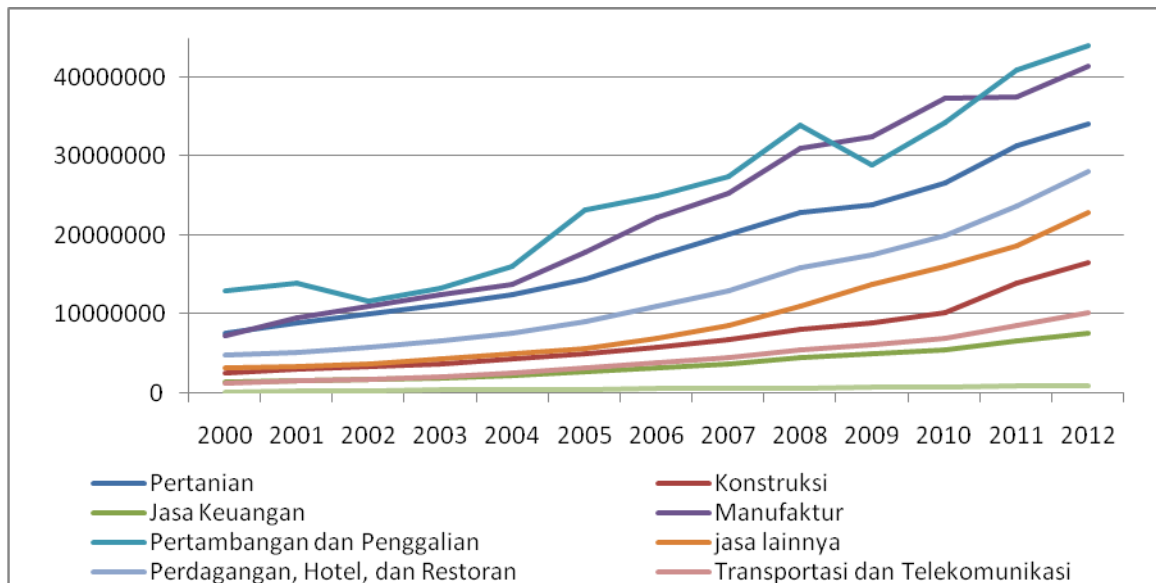
2.1.3. Struktur Perekonomian



Sumber : World Bank, Indodapoer, 2015

Gambar 2.10. PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB, Juta Rupiah), Provinsi Sumatera Selatan, 1976-2013

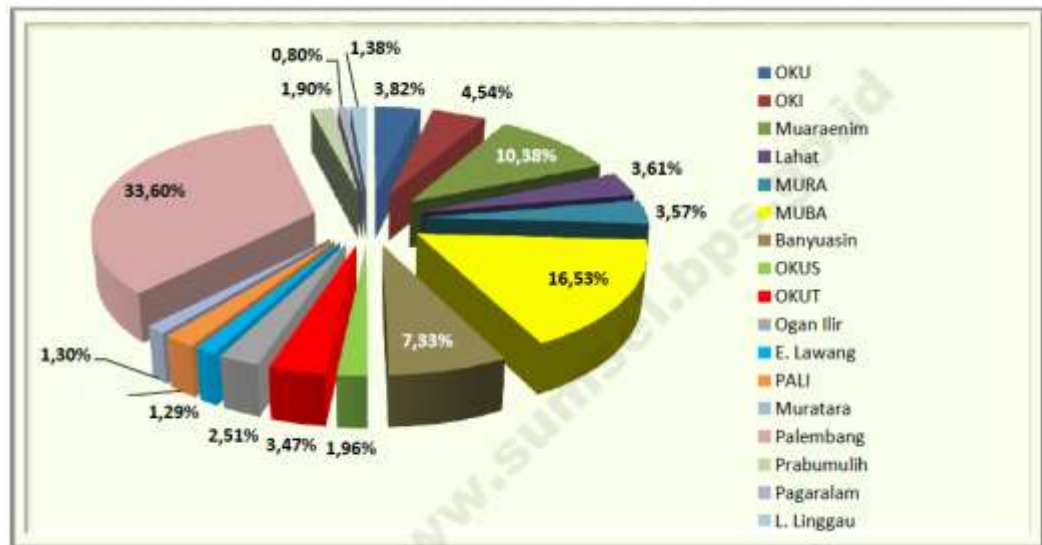
Dinamika ekonomi Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan melalui Gambar 2.10. PDRB menurut Lapangan Usaha (Adhb, Juta Rupiah) tahun 1976-2013. Terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun-tahun awal menjadi penyumbang PDRB terbesar. Akan tetapi sejak tahun 2000 an, kontribusi sektor ini semakin dikejar oleh sektor lainnya. Bahkan pada tahun 2012, sektor Pertanian sudah mendekati sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor yang pertumbuhannya cukup menjanjikan adalah sektor Manufaktur dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.



Sumber : World Bank, Indodapoer, 2015

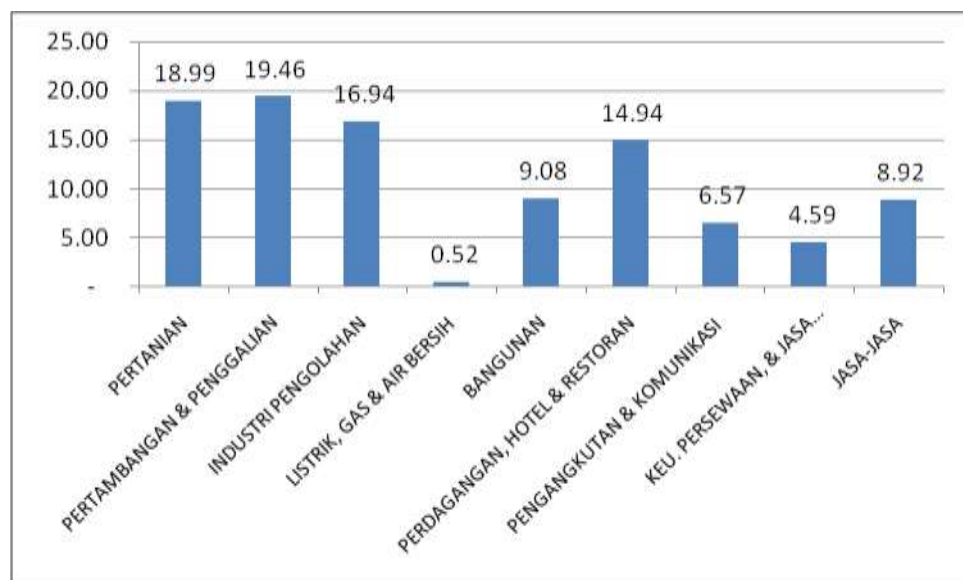
Gambar 2.11. PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHK juta Rupiah),
Provinsi Sumatera Selatan, 2000-2012

Menurut Harga Konstan, PDRB Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2000 – 2012 (Gambar 2.11). Akan tetapi sektor Manufaktur terus mendekati sektor pertambangan dan penggalian. Sektor Pertanian secara konstan bertumbuh dalam memberi kontribusi pada perekonomian Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.12. Distribusi Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota, 2013

Gambar 2.12 memperlihatkan bahwa perekonomian Sumatera Selatan. Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh Kota Palembang sebanyak 33,6%, kemudian oleh MUBA sebesar 16,53% , disusul oleh OKUS sebesar 10,38%.



Sumber: BPS Prov. Sumatera Selatan (diolah)

Gambar 2.13. Distribusi Persentase PDRB Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2000: tahun 2008- 2012

Dari Gambar 2.11 pada tahun 2008-2012 diperlihatkan bahwa PDRB Provinsi Sumatera Selatan disumbang dari terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian (19,46%), Pertanian (18,99%), Industri Pengolahan (16,94%), kemudian disusul oleh sektor Perdagangan Hotel & Restoran (14,94%), Bangunan (9,08%), Jasa-jasa (8,92%), Pengangkutan dan Komunikasi (6,57%), Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan (4,59%), dan terakhir Listrik, Gas dan Air Bersih (0,52%).

Secara sektoral, Sembilan sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif (2011). Pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi (14.07%), Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (12.47%), Bangunan (11.84%), Jasa-jasa (8.83%), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (8.17%), Listrik, Gas, dan Air Bersih (8.01%), Industri Pengolahan (5.9%), Pertanian (5.16 %), dan sektor Pertambangan dan penggalian (2.18 %).

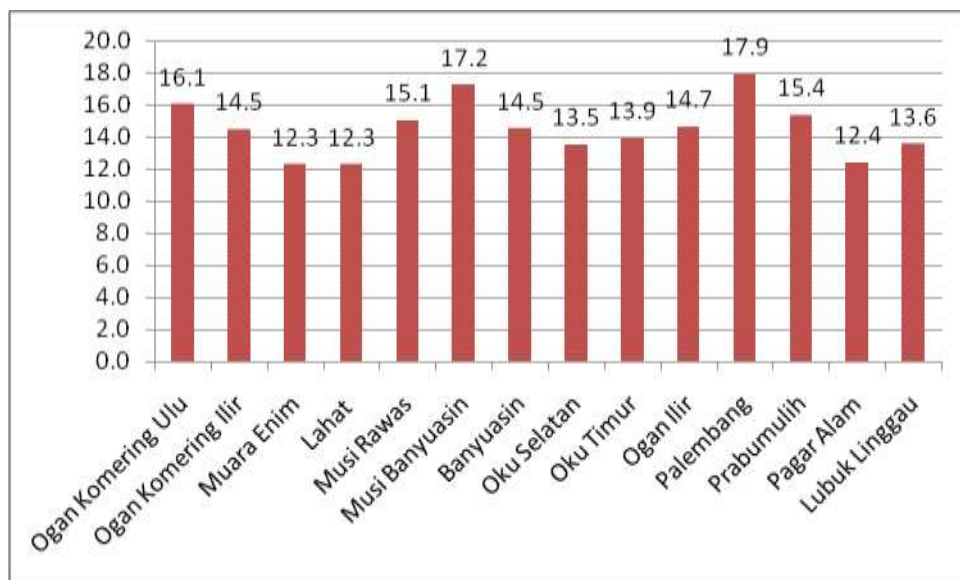
Sektor-sektor yang memiliki peranan cukup besar sebagai penggerak utama (*primemover*) perekonomian provinsi Sumatera Selatan (tahun 2013, Tabel 2.11) adalah sektor Pertambangan & Penggalian (20.06 %), Sektor Industri Pengolahan (19.96%), Sektor Pertanian (16.28%), sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (14.27%), sektor Jasa-Jasa (11.54%), sektor Bangunan (8.36 %).

Tabel 2.11. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%) di
Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2013

No.	Sektor	Persentase
1	Pertanian	16,28
2	Pertambangan & Penggalian	20,06
3	Industri Pengolahan	19,96
	a. Migas	7,15
	b. Non Migas	12,80

No.	Sektor	Persentase
4	Listrik,Gas & Air Minum	0,50
5	Bangunan	8,36
6	Perdagangan,Hotel & Restoran	14,27
7	Pengangkutan & Komunikasi	5,17
8	Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan	3,87
9	Jasa-Jasa	11,54
	Pertumbuhan	7,3

Sumber : Sumatera Selatan dalam Angka 2014.



Gambar 2.14. Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas, Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Gambar 2.14 memperlihatkan pertumbuhan PDRB tanpa Migas Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Terlihat bahwa pertumbuhan PDRB tanpa Migas tertinggi terdapat pada Kota Palembang (17,9%), kemudian disusul Kabupaten Musi Banyuasin (17,2%), Kabupaten Ogan Komering Ulu (16,1%), Kota Prabumulih (15,4%).

Ekspor dari Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 lebih banyak didominasi oleh ekspor yang berasal dari Industri, dengan nilai

809,24 Juta US \$ atau sekitar 89,03 % dari total ekspor tanpa migas.

Tabel 2.12. Jumlah Ekspor Non Migas Tahun 2014

No.	Kelompok Komoditi	Nilai (Juta US \$)	Persentase
1	Pertanian	7,63	0,84
2	Industri	809,24	89,03
3	Pertambangan	92,06	10,13
4	Lainnya	-	-
Jumlah		908,93	100

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2015

2.1.4. Sektor Unggulan Provinsi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak bahan baku industri dari komoditas yang dimiliki. Komoditas itu terdiri atas komoditas berbahan baku agro dan komoditas berbahan tambang atau penggalan.

Pada bagian ini dilakukan analisis untuk memilih industri unggulan di Provinsi Sumatera Selatan atas dasar komoditas yang ada. Analisis yang dilakukan adalah *Shift Share*, Analisis *Location Quotient* (LQ), dan Analisis *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Ketiga analisis ini mempunyai keterbatasan dan kelebihan. Untuk mengeliminir keterbatasan masing-masing analisis, maka untuk mendapatkan industri unggulan di Provinsi Sumatera Selatan ketiga analisis digunakan secara simultan. Kemudian keputusan akhir juga mengakomodir hasil dari Focus Group Discussion (FGP) yang telah dilakukan bersama dengan para pemangku kepengingan di Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.4.1. Analisa Shift Share

Tabel 2.13. Analisis Shift share, Provinsi Sumatera Selatan

Lapangan Usaha	Rn	RiN (nas)	RiJ	Eij	Cij	Mij	Nij	Dij
				(rata rata)	EiJ(Rij-Rin)	Eij(Rin-Rn)	(Eij * Rn)	(Cij+Mij+Nij)
				(juta)	(juta)	(juta)	(juta)	(juta)
1. PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN		0,1008	0,0520	42.397.215,79	(2.069.092,54)	1.805.167,7754	2.466.561,5064	2.202.636,7411
a. Tanaman Bahan Makanan		0,0850	0,0267	9.864.782,14	(574.325,47)	264.265,6765	573.907,7775	263.847,9826
b. Tanaman Perkebunan		0,0916	0,0661	17.393.120,09	(444.333,84)	581.268,0746	1.011.887,2120	1.148.821,4433
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya		0,1148	0,0821	3.234.784,43	(105.622,66)	183.108,4957	188.191,4790	265.677,3152
d. Kehutanan		0,0597	0,0031	4.358.322,15	(246.717,49)	6.561,9820	253.556,0283	13.400,5156
e. Perikanan		0,1431	0,0735	6.600.084,21	(459.356,16)	560.640,4003	383.976,0075	485.260,2524
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		0,1036	0,0413	49.552.515,19	(3.087.450,33)	2.250.501,3763	2.882.838,5126	2.045.889,5626
a. Minyak dan gas bumi		0,0966	0,0008	26.923.109,72	(2.577.167,02)	1.033.444,3589	1.566.317,6185	22.594,9539
b. Batubara dan Lignit		0,0988	0,1316	11.892.306,05	389.466,14	483.633,6692	691.863,9295	1.564.963,7368
c. Penggalan.		0,1452	0,0589	10.737.099,42	(927.091,76)	934.508,2151	624.656,9646	632.073,4230
3. INDUSTRI PENGOLAHAN		0,1063	0,0510	40.747.708,87	(2.250.338,29)	1.959.346,8941	2.370.597,4153	2.079.606,0212
a. Industri Migas		0,0805	0,0053	12.547.683,81	(943.606,68)	280.601,7808	729.992,1306	66.987,2354
b. Industri tanpa Migas		0,1103	0,0725	28.200.025,06	(1.065.909,45)	1.468.916,8595	1.640.605,2847	2.043.612,6897
1). Makanan, Minuman dan Tembakau		0,1372	0,0925	11.794.655,68	(527.473,89)	932.035,5513	686.182,8812	1.090.744,5436
2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki		0,1071	0,0887	71.619,83	(1.318,96)	3.504,4500	4.166,6582	6.352,1489
3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.		0,0742	(0,0067)	483.426,00	(39.093,63)	7.743,5326	28.124,4875	(3.225,6075)
4). Kertas dan Barang cetakan		0,0533	0,0174	3.085.520,45	(110.797,86)	(15.025,3822)	179.507,6828	53.684,4440

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet	0,0838	0,0745	11.113.336,25	(103.590,49)	284.458,8353	646.545,4601	827.413,8041
6). Semen & Brg. Galian bukan logam	0,1057	0,0660	745.321,59	(29.569,16)	35.412,0153	43.360,9025	49.203,7546
7). Logam Dasar Besi & Baja	0,0956	0,0563	533.389,92	(20.991,94)	19.987,2689	31.031,2604	30.026,5928
8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0,1096	0,0213	80.345,82	(7.092,23)	4.131,7341	4.674,3140	1.713,8203
9). Barang lainnya	0,0680	0,0148	292.409,53	(15.551,15)	2.871,9722	17.011,6380	4.332,4616
4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH	0,1338	0,0654	429.994,81	(29.373,37)	32.496,5730	25.015,9976	28.139,2011
5. B A N G U N A N	0,1134	0,0852	30.531.538,64	(859.242,81)	1.684.809,6113	1.776.246,7777	2.601.813,5840
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	0,1368	0,0662	23.625.076,82	(1.668.659,87)	1.858.313,7398	1.374.446,5049	1.564.100,3782
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,1523	0,0752	10.239.961,42	(790.119,36)	964.111,7346	595.734,7477	769.727,1212
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.	0,1342	0,0974	5.689.762,02	(209.359,95)	432.579,4788	331.015,7924	554.235,3251
9. JASA – JASA	0,1387	0,0601	16.036.495,49	(1.259.671,00)	1.290.935,7228	932.962,2647	964.226,9921

Hasil dari analisis Shift Share menunjukkan bahwa Industri Unggulan di provinsi Sumatera Selatan adalah : Industri Tanaman Perkebunan, Batubara dan Lignit, industri Makanan, Minuman dan Tembakau, dan Pupuk, Kimia & Barang dari karet.

2.1.4.2. Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengetahui sektor basis dan sektor non basis yang ada di suatu Kabupaten/Kota . digunakan model analisis *Location Quotient* (LQ). Dalam studi ini dilakukan metode perhitungan dengan metode Nilai Tambah Metode perhitungan dengan Nilai Tambah dilakukan dengan rumus berikut.

$$LQ = \frac{V_i / V_t}{Y_i / Y_t}$$

Dimana V_i = jumlah PDRB suatu sektor i di Kabupaten/Kota. V_t = Total PDRB sektor I di Kabupaten/Kota. Y_i = JUmlah PDRB sektor i Provinsi.

Y_t = Total PDRB sektor i Provinsi

Tabel 2.14. Nilai rata-rata Location Quotient (LQ) Provinsi Sumatera Selatan. tahun 2000-2014

No.	Sektor	Rata-rata LQ	Keterangan
1	Pertanian	1.3944	Sektor Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	2.7706	Sektor Basis
3	Industri	0.6439	Sektor Non Basis
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.6804	Sektor Non Basis
5	Bangunan	1.2396	Sektor Basis
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.7882	Sektor Non Basis
7	Angkutan dan Komunikasi	0.6391	Sektor Non Basis
8	Keuangan, Sewa dan jasa	0.4305	Sektor Non Basis

	Perusahaan		
9	Jasa lainnya	0.8506	Sektor Non Basis

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2000-2014, diolah

Terdapat 3 (tiga) sektor ekonomi basis di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sektor pertambangan dan penggalan; pertanian; dan bangunan. Ketiga sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan guna merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah karena memiliki keunggulan komparatif dan daya saing yang tinggi dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Sektor industri memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian Sumatera Selatan. namun dengan nilai LQ yang rendah. potensi ekonomi sektor ini masih kalah bersaing dibandingkan produk industri dari provinsi-provinsi lainnya. Untuk itu. guna mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap sektor primer dan untuk menuju struktur perekonomian yang modern dan lebih maju. sektor ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam pengembangannya. terutama guna menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi menengah yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

Tabel 2.15. Industri Unggulan atas dasar LQ

No.	Industri Unggulan
1	Industri berbasis Karet
2	Industri berbasis Batu Bara
3	Industri berbasis kelapa sawit

2.1.4.3. Indeks RCA

Indeks RCA merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif disuatu wilayah (kawasan, negara, propinsi). Konsep Dasar dari indeks RCA adalah bawah perdagangan antar wilayah menunjukkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Rumus RCA

$$RCA = \frac{X_{ij} / X_j}{X_{iw} / X_w}$$

Dimana X_j = total nilai ekspor negara j, X_{ij} = nilai ekspor komoditi I dari negara j X_{iw} = Nilai Ekspor komoditi I dari dunia, X_w = total nilai ekspor dunia

Kinerja ekspor suatu produk dari suatu negara diukur dgn menghitung pangsa nilai ekspor suatu produk terhadap total ekspor suatu negara dibandingkan dengan pangsa nilai produk tersebut dalam perdagangan dunia.

Tabel 2.16. Nilai Indeks RCA Komoditas Ekspor Sumatera Selatan, 2011-2012

Komoditas	Volume (KG)		Harga Internasional	Ekspor Pasar Dunia Nilai (US \$)	RCA	
	2011	2012			2011	2012
1. Karet	732.978.000	696.975	2,37 US/kg	1.737.157.860,0	1,21	0,16
3. Kelapa Sawit	369.310.062	-	US\$ 100 per ton	36.931.006,2	3,41	-
4. Pulp	231.294.070	-	900/ton	208.164.663,0	0,38	-
5. Urea	75.533.659	-	400/ton	30.213.463,60	0,70	-
6. Udang	1.384.291	914	7/kg	9.690.037,00	0,76	0,04
7. Amonia	31.671.067	-	US\$ 500/ ton	15.835.533,50	0,60	-

Komoditas	Volume (KG)		Harga Internasional	Ekspor Pasar Dunia Nilai (US \$)	RCA	
	2011	2012			2011	2012
8. Kopi	6.178.440	4.814	8/kg	49.427.520,00	0,14	0,04
9. Produk Kayu	21.949.022	-	US\$ 200 – 250 / ton	5.487.255,50	1,47	-
10.Teh	432.515	397	2,92 dollar AS / kg	1.262.943,80	0,37	0,12
11.Kelapa	19.074.692	9.905	US\$ 1.800 / ton	34.334.445,60	0,10	0,11

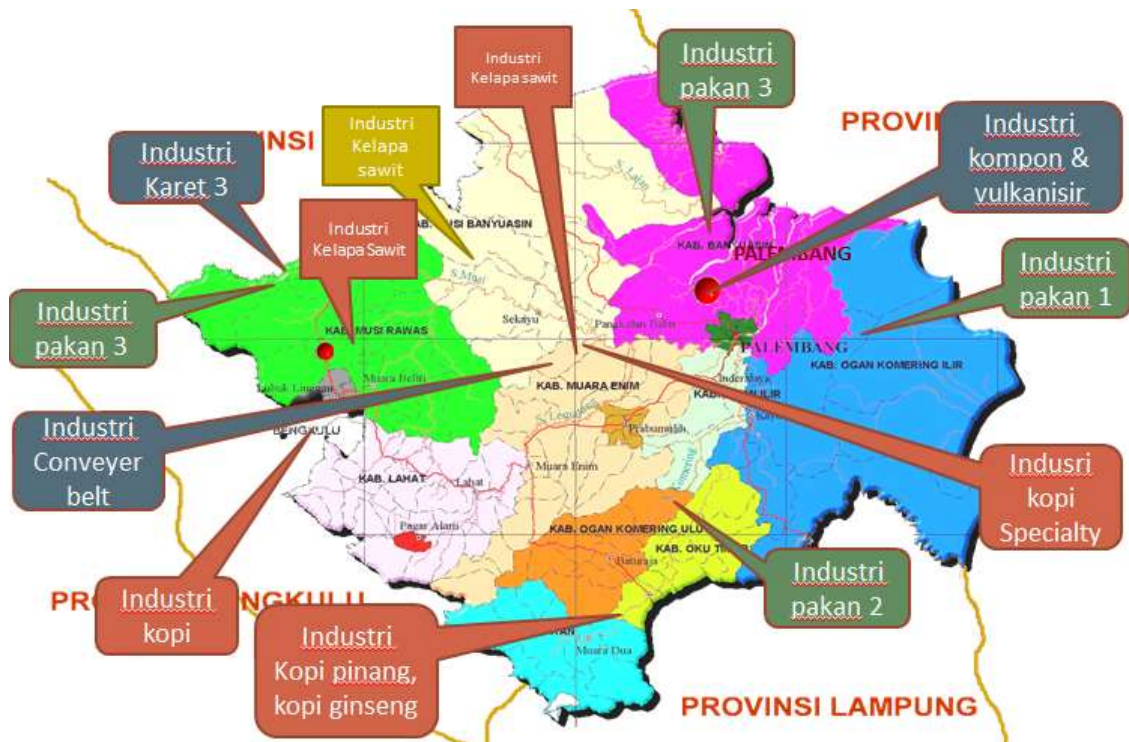
2.1.4.4. Summary Hasil-Hasil Analisis Sektoral

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode LQ, RCA, Dukungan Kebijakan Pemerintah melalui hasil Focus Group Discusstion (FGD pertama dan kedua) untuk komoditi yg sulit diperoleh data kuantitatifnya dan memerlukan alasan yg bersifat subjektif, maka didapat unggulan industri agro Sumsel :

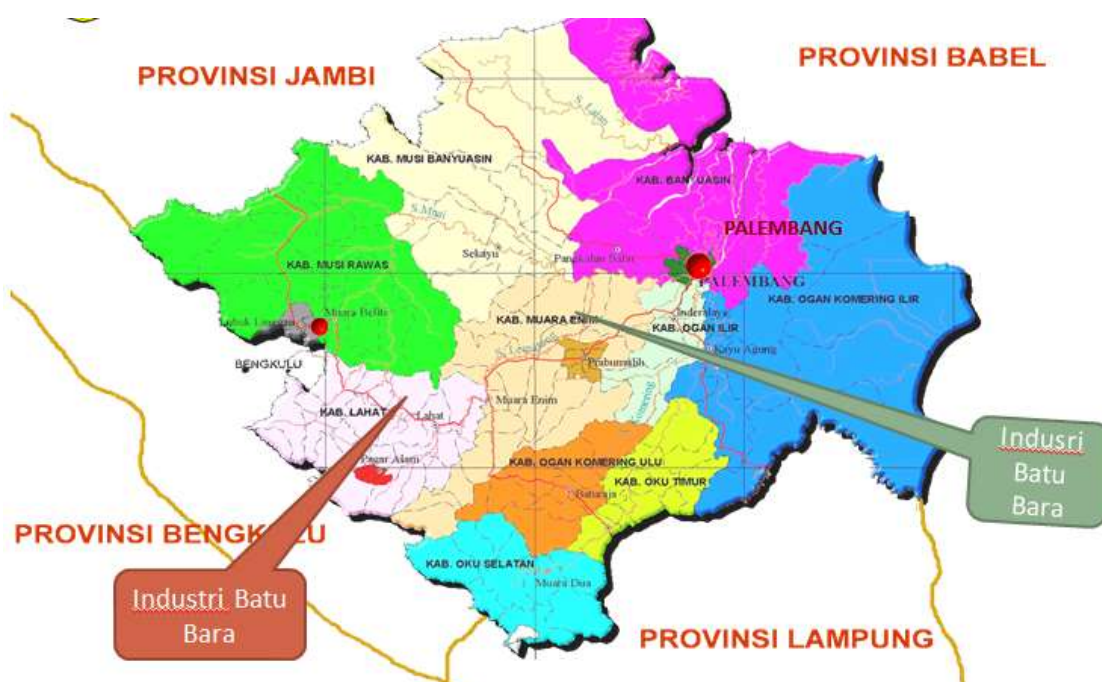
Tabel 2.17. Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Industri Perkebunan :	
1.	Industri Karet	
2.	Industri Kopi	
3.	Industri Kelapa Sawit	
	Industri Pertanian Tanaman Pangan	
1.	Industri Jagung	
2.	Industri Ubi kayu	Industri pakan
3.	Industri Kedelai	

Pada gambar ditunjukkan peta dan lokasi Industri berbasis Argo, dan Industri berbasis Batu Bara di Provinsi Sumatera Selatan.



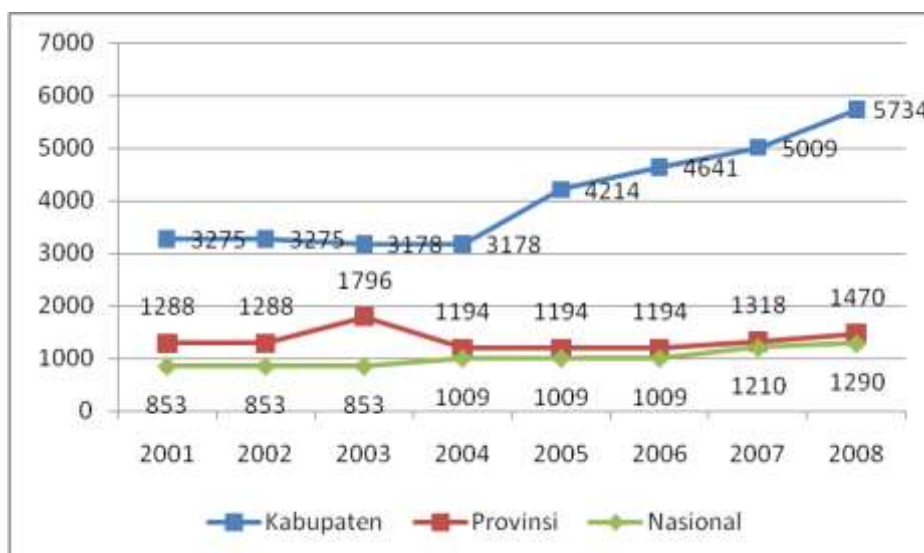
Gambar 2.15. Peta dan Lokasi Industri berbasis Argo, Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.16. Peta dan Lokasi Industri berbasis Batubara, Provinsi Sumatera Selatan

2.1.5. Infrastruktur Dasar dan Penataan Wilayah

2.1.5.1. Jalan Darat



Sumber: Badan Pusat Statistik dan World Bank 2015

Gambar 2.17. Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupate (Km), Provinsi Sumatera Selatan, 2001-2008

Gambar menunjukkan perkembangan jalan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001 hingga tahun 2008. Jalan negara sepanjang 853 Km pada tahun 2001 dan bertambah hingga menjadi 1290 Km pada tahun 2008. Sedangkan Jalan Provinsi sepanjang 1288 Km pada tahun 2001 dan menjadi 1470 Km pada tahun 2008. Jalan Kabupaten sepanjang 3275 Km pada tahun 2001 dan menjadi 5734 Km pada tahun 2008.

2.1.5.2. Pelabuhan Laut

Tabel 2.18. Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Pelabuhan	Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan
1	Palembang - Kertapati	Dermaga 35 Ilir
2	Palembang - Plaju	Dermaga Boom Baru
3	SM. Badaruddin (U)	Dermaga Sungai Lumpur
4	Musi River/Boom Baru	Dermaga Keramasa
5		Dermaga Kenten
6		Dermaga Parit VIII
7		Dermaga Muara Padang
8		Dermaga Sungai Lais
9		Dermaga Lematang
10		Dermaga Tulung Selapan

Sumber : Badan Pusat Statistik. Sumatera Selatan, 2014

Pada tahun 2014, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 Pelabuhan Laut, yakni pelabuhan Palembang – Kertapati, pelabuhan Palembang – Plaju, pelabuhan SM. Badaruddin (U), dan Pelabuhan Musi River/Boom Baru. Untuk angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan terdapat 10 dermaga.

2.1.5.3. Bandar Udara

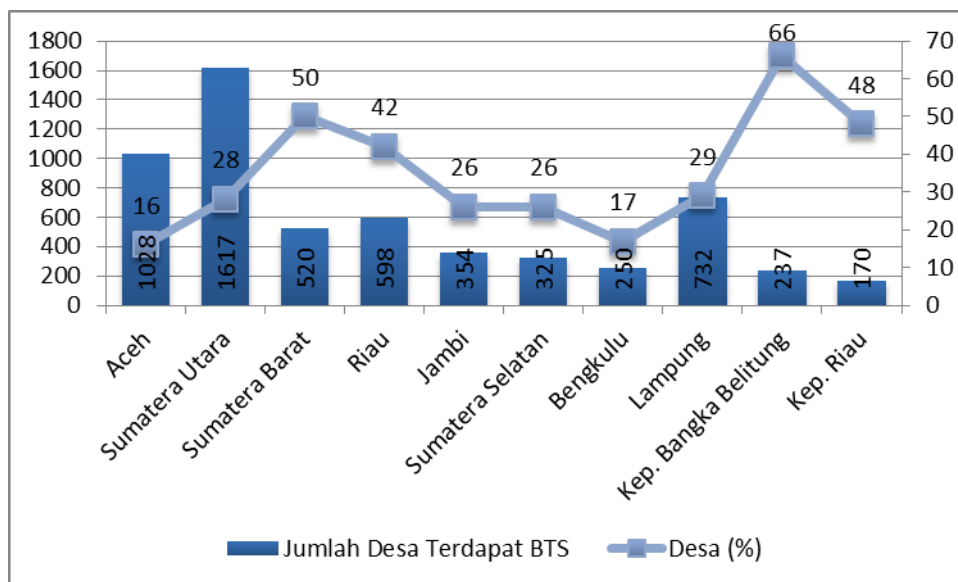
Tabel 2.19. Bandar Udara di Povinsi Sumatera Selatan

Nomor	Bandara	Kategori
1	Pagar Alam	Domestik
2	Silampari	Domestik
3	Sultan Mahmud Badaruddin II	Internasional, Embarkasi Haji

Sumber: direktorat Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2015

Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 buah, yakni Banda Udara Pagar Alam, Bandar udara Silampari, dan Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II.

2.1.6. Telekomunikasi



Sumber: PODES 2011, BPS dalam PPDA 2013, Bappenas, diolah

Gambar 2.18. Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS, Menurut Provinsi, Sumatera 2011

Kondisi telekomunikasi di Wilayah Sumatera digambarkan dengan persentase dan jumlah desa yang memperoleh pelayanan telepon kabel dan kemampuan menerima sinyal telepon seluler. Untuk mendukung jangkauan sinyal telepon seluler dapat diindikasikan oleh adanya base transceiver Station (BTS) atau Menara Telepon Seluler di wilayah tersebut. Sebanyak 825 desa telah dibangun BTS dan sebesar 25% desa di Provinsi Sumatera Selatan telah terdapat BTS.

Tabel 2.20. Jumlah dan Persentasi Desa yang menerima Telepon Kabel dan HP, Provinsi Sumatera Selatan, 2011

Provinsi/Pulau	Telepon Kabel		Jumlah Desa Penerimaan Sinyal HP						Jumlah Desa/ke- urahan
	Jumlah Desa	%	Lemah	%	Kuat	%	Lemah-Kuat	%	
Sumatera Selatan	480	12,36	994	31,2	2119	66,51	3113	97,71	3186
P. Sumatera	3.884	100,00	6.197	25,59	17.091	70,59	23.315	96,29	24.213

Sumber: Podes 2011, BPS dalam PPDA 2013, Bappenas

Pada tahun 2011, sejumlah 480 desa (12,36%) telah menerima telepon kabel, dan sejumlah 994 desa (31,2%) menerima sinyal HP Lemah, 2119 desa (66,51%) desa menerima sinyal HP Kuat dan 3113 desa (97,71%) desa menerima sinyal HP Lemah-Kuat di Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.7. Listrik, Air dan Bahan Bakar

A. Listrik

Sebelum tahun 2005, PLN Wilayah IV Sumatera Selatan menggunakan tenaga Diesel, uap dan gas sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Sejak tahun 2005, PLN hanya memanfaatkan pembangkit listrik tenaga diesel (Sumatera Selatan dalam Angka 2014). Jumlah tenaga listrik yang diproduksi dari mesin diesel

sebesar 1.480.847 Kwh dari sebanyak 10 pembangkit listrik (2013). PLN menyalurkan listrik kepada kelompok rumah tangga, usaha, industry, instansi pemerintah dan lainnya. Total energy listrik yang disalurkan 4.036.669.756 Kwh. Sebesar 58,28 % dari jumlah tersebut disalurkan ke konsumen rumah tangga, 14,45 % kepada kelompok usaha, 17,12 % ke pelanggan industry, 4,47 % ke instansi pemerintah, dan sisanya sebanyak 2,64 % kepada pelanggan kategori lainnya.

Jumlah pelanggan PLN tahun 2013, sebanyak 1.382.534 pelanggan. Meningkat 10.46% dibandingkan pelanggan tahun 2012 (1.250.761 pelanggan). Daya listrik yang tersambung untuk tiap-tiap kelompok rumah tangga, usaha, industry, instansi pemerintah, dan lain masing masing sebesar 1.205.749 Kva, 306.958 Kva, 249.843 Kva, 78,119 Kva, dan 109.435 Kva.

B. Air

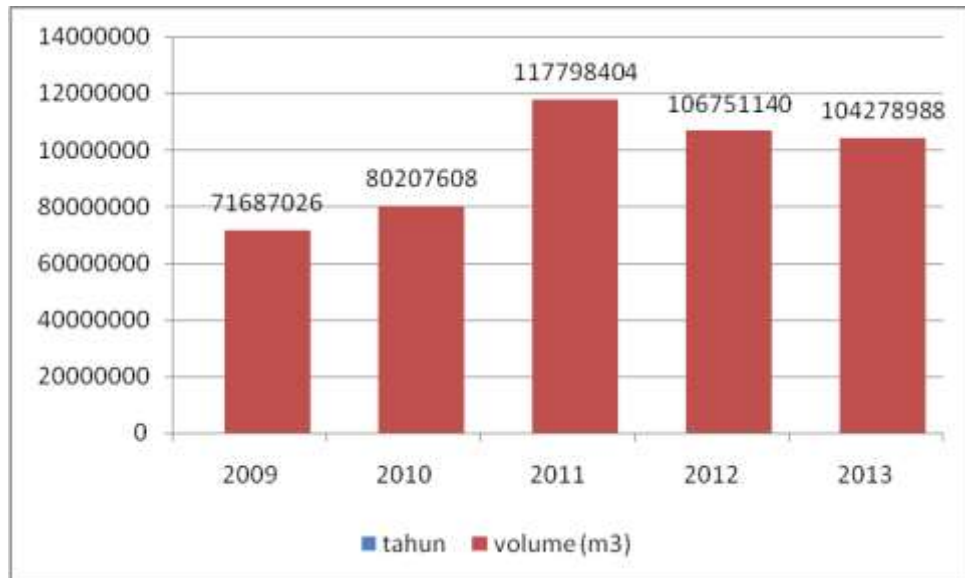
Tabel 2.21. Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat, Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera, 2011

Provinsi / Pulau	PAM/PDAM		Pompa listrik/tangan /sumur		Mata air		Sungai/danau		Air Hujan		Air kemasan/ lainnya		Total	
	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
Sumatera Selatan	284	8,91	2058	64,60	176	5,52	361	11,33	245	7,69	62	1,95	3.186	100
P. Sumatera	2.431	10.04	15.104	62,38	3.156	13	1.569	6.48	1.165	4.81	788	3.25	24.213	100

sumber: Podes 2011, BPS dalam PPDA 2013, Bappenas

Jumlah desa dan persentase yang telah disalurkan air bersih (tahun 2013) menurut sumber ditunjukkan dalam tabel (2.21) Sebanyak 284 desa (8,91%) mendapat air bersih melalui PAM/PDAM, 2058 desa (64,60%) mendapat air bersih dari Pompa

Listrik/tangan/sumur, 176 desa (5,52%) mendapat air bersih dari mata air, 361 desa (11,33%) mendapat air bersih dari Sungai/danau, 245 desa (7,69%) mendapat air bersih dari air hujan, dan 62 desa (1,95%) mendapat air bersih dari air kemasan/lainnya.

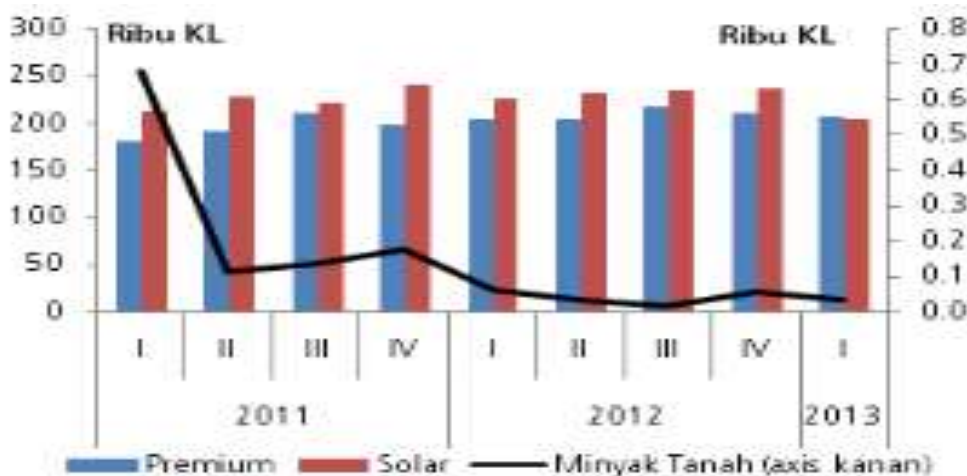


Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka 2014.

Gambar 2.19. Volume Air Minum yang Disalurkan, Provinsi
 Sumatera Selatan, 2013

Pada tahun 2009 - 2013 (gambar) ditunjukkan volume air bersih yang disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2009 sebanyak 71.687.026 meter kubik (m³) air bersih disalurkan di Provinsi Sumatera Selatan. Angka ini meningkat menjadi 117798404 m³ tahun 2011 dan sebesar 104278988 m³ pada tahun 2013.

C. Energi



Sumber: Pertamina dalam Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia 2013

Gambar 2.20. Konsumsi BBM Provinsi Sumatera Selatan 2011-2013

Pada tahun 2011 hingga 2013, konsumsi premium, Solar, dan Minyak Tanah di Provinsi Sumatera Selatan ditunjukkan dalam gambar. Konsumsi Solar berkisar pada angka 200 ribu Kilo liter (KL) pada tahun 2011-2013. Sedangkan konsumsi premium sedikit di bawah konsumsi Solar. Konsumsi Minyak Tanah menurun dari tahun 2011 – 2013.

2.1.8. Penataan Wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Wilayah Palembang dan sekitarnya ditetapkan sebagai kegiatan strategis nasional, diantaranya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sebagai Kawasan Andalan Nasional. Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional merupakan wilayah dengan potensi yang sangat baik untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu syarat/kriteria Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan yang telah memiliki

sarana dan prasarana yang memadai. Tanjung Api Api sebagai bagian dari PKN Palembang memiliki indikasi sebagai Kawasan yang laik untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

A. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan memiliki 1 (satu) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 7 (tujuh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Palembang dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan di Muara Enim, Kayuagung, Baturaja, Prabumulih, Lubuk Linggau, Sekayu dan Lahat. Banyaknya PKW yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang strategis untuk mendukung perkembangan dan perekonomian Indonesia.

Tabel 2.22. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

No	Struktur Ruang	Arahan	Kebijakan
1	Sistem Perkotaan Nasional	PKN : Palembang PKW : <ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Enim 2. Kayuagung 3. Baturaja 4. Prabumulih 5. Lubuk Linggau 6. Sekayu 7. Lahat 	Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I) Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Pengembangan atau peningkatan fungsi (II/C/I) Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B)
2	Jalan bebas hambatan	Palembang-Muara Enim	Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan

No	Struktur Ruang	Arahan	Kebijakan
		Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau	
		Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu	
		Palembang-Indralaya (Tol dalam kota)	
3	Pelabuhan	Tanjung Api Api (satu sistem dengan Palembang)	Pemantapan pelabuhan internasional (I/I)
4	Bandar Udara	Pusat pengembangan sekunder Sultan Mahmud Badaruddin II	Pengembangan Bandara Sekunder (I/4)
5	Wilayah Sungai	Strategis Nasional Banyuasin	Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air (I-IV/A/I)

Sumber : PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pengembangan sistem jaringan diantaranya;

1. Jalan bebas hambatan: Palembang-Muara Enim
2. Pelabuhan : Pelabuhan Internasional Tanjung Api Api
3. Bandar Udara : Pusat pengembangan sekunder Sultan Mahmud Badaruddin II
4. Wilayah Sungai : Strategis Nasional Banyuasin

Sistem pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan yang ditetapkan di PKN Palembang merupakan infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan optimal.

B. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008 - 2028

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Wilayah Palembang dan sekitarnya ditetapkan sebagai kegiatan strategis nasional, diantaranya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sebagai Kawasan Andalan Nasional. Palembang sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional merupakan wilayah dengan potensi yang sangat baik untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu syarat/kriteria Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan yang telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tanjung Api Api sebagai bagian dari PKN Palembang memiliki indikasi sebagai Kawasan yang laik untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.

C. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah nasional di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan andalan. Kawasan lindung yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 (lima) kawasan diantaranya adalah Suaka Margasatwa Gumai Pasemah, Suaka Margasatwa Gunung Raya, Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah, Suaka Margasatwa Bentayan dan Suaka Marga Satwa Dangku. Kawasan Andalan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 (empat) kawasan diantaranya adalah Kawasan Muara Enim dsk, Kawasan Lubuk Linggau dsk, Kawasan Palembang dsk, Kawasan Laut Bangka dsk.

Tabel 2.23. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

No	Penggunaan Ruang	Arahan	Kebijakan
1	Kawasan Lindung	1. Suaka Margasatwa Gumai Pasemah	Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Lindung Nasional (II/B/2)
		2. Suaka Margasatwa Gunung Raya	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (I/B/2)

No	Penggunaan Ruang	Arahan	Kebijakan
		3. Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (II/B/2)
		4. Suaka Margasatwa Bentayan	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (I/B/2)
		5. Suaka Marga Satwa Dangku	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (II/B/2)
2	Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan	1. Kawasan Muara Enim dsk	Pertanian, pertambangan dan perkebunan
		2. Kawasan Lubuk Linggau dsk	Pertanian, perkebunan dan industri
		3. Kawasan Palembang dsk	Pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan
		4. Kawasan Laut Bangka dsk	Perikanan dan pariwisata

Sumber : PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Provinsi Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung yang memiliki cakupan pelayanan yang luas menjadi potensi dalam melakukan konsentrasi dan distribusi kegiatan perekonomian, seperti pengumpulan bahan mentah untuk dikelola menjadi bahan baku/bahan jadi, yang selanjutnya dapat di distribusikan baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan internasional.

Besarnya keterkaitan Kota Palembang dengan kota-kota lainnya, menunjukkan peranan yang sangat strategis dari Kota Palembang dalam menunjang perkembangan Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera. Dorongan perkembangan Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting untuk menciptakan dampak penetesan pada wilayah-wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera.

Tabel 2.24. Rencana Sistem Pusat-Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2030

No	Sistem Pusat Permukiman	Kota-Kota	
1	Pusat Kegiatan	Kota	melayani kegiatan skala internasional,

	Nasional (PKN)	Palembang	nasional, atau beberapa Provinsi, khususnya pada kawasan Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung);
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Prabumulih, (Kota Prabumulih) 2. Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau) 3. Pagar Alam (Kota Pagar Alam) 4. Muara Enim (Kabupaten Muara Enim) 5. Baturaja (Kabupaten OKU) 6. Lahat (Kabupaten Lahat) 7. Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir) 8. Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin) 9. Kayu Agung (Kabupaten OKI) 10. Sungsang (Kabupaten Banyuasin) 11. Martapura (Kabupaten OKU Timur)	
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin) 2. Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang) 3. Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas) 4. Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan) 5. Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin) 6. Gumawang (Kabupaten OKU Timur) 7. Tugumulyo (Kabupaten OKI) 8. Talang Ubi (Kabupaten Muara Enim) 9. Peninjauan (Kabupaten OKU) 10. Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas) 11. Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin) 12. Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir) 13. Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas) 14. Pangadonan (Kabupaten OKU)	

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

Tabel 2.25. Rencana Sistem Jaringan Transportasi

No	Sstem Jaringan	Fungsi	Rencana Pengembangan
1	Jalan Raya	arteri primer:	1. Lintas Timur Sumatera (Menggala-Kayu Agung-Indralaya-Palembang-Jambi) 2. Lintas Tengah Sumatera (Kotabumi-Baturaja-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau – Sarolangun). 3. Lintas Indralaya-Muara Enim (Lintas Timur Sumatera dengan Lintas Tengah Sumatera) 4. Lubuk Linggau – Curup - Bengkulu (Lintas Tengah Sumatera dengan Lintas Barat Sumatera) 5. Simpang Betung-Sekayu-Lubuk Linggau 6. Palembang-Tanjung Api-Api. 7. Lahat-Pagar Alam-Kaur.
		jalan tol/ bebas hambatan	Kotabumi-Baturaja-MuaraEnim-Lahat-Lubuk Linggau-Sarolangun
		Kolektor	1. Sekayu-Simpang Belimbing

No	Sstem Jaringan	Fungsi	Rencana Pengembangan
		primer	2. Palembang-Rambutan-Kayu Agung 3. Palembang-Rambuan-Tulung Selapan 4. Prabumulih-Baturaja 5. Tanjung Raja-Lubuk Batang 6. Kayu Agung-Martapura 7. Martapura-Gumawang-Tugumulyo 8. Martapura-Muara Dua-Liwa 9. Baturaja-Simpang 10. Muara Dua-Batas Bengkulu 11. Tebingtinggi-Kepahiang 12. Pagar Alam-Pendopo 13. Mangunjaya-Nibung 14. Tugumulyo-Cengal-Tanjung Api-Api 15. Pangkalan Balai-Rantau Bayur-Penukal-Simpang Belimbing 16. Tugumulyo-Gumawang-Martapura 17. Palembang - Mariana - Muara padang - Air Sugihan 18. Pangkalan Balai - Rantau Bayur - Penukal - Simpang 19. Simpang Meranjat - Muara Kuang - Cempaka 20. Lubuk Linggau-Musi Rawas
		jalan khusus	Pengembangan jalan untuk pengangkutan batubara dari tempat penambangan ke pelabuhan/terminal khusus batubara
2	Jalan Kereta Api	Internal	1. Tanjung Enim-TAA 2. Lubuk Linggau-Simpang-TAA 3. Muara Enim-Prabumulih 4. Lahat-Patratani (Kab.OI)-TAA
		Regional	1. Tanjung Enim-Pelabuhan Linau 2. Lubuk-Linggau-Kota Padang- Pelabuhan Pulau Balai 3. Palembang-Betung-Batas Jambi 4. Tanjung Enim-Srengsem (Prov. Lampung) 5. Lahat-Muara Belida (Dermaga)

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

Tabel 2.26. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

No	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Rencana Pengembangan
1	Pelabuhan	Pelabuhan Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin yang pada saat ini sedang dalam tahap pembangunan dengan luas 13.000 ha
2	Bandara	1. Bandara Sultan M. Badaruddin, penambahan rute penerbangan dalam negeri terutama rute penerbangan antar Provinsi di Pulau Sumatera (prioritas Kawasan BELAJASUMBA) dan rute penerbangan ke Pulau Jawa. Selain itu juga diperlukan perluasan area dan penambahan runway sehingga minimal bisa didarati oleh pesawat besar sekelas Airbus 330.

No	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah	Rencana Pengembangan
		2. Bandara Silampari, peningkatan pelayanan melalui pengembangan sarana dan prasarana bandara berupa perpanjangan <i>runway</i> dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Bandara Atung Bungsu, percepatan pembangunan bandara sebagai upaya untuk mengatasi hambatan aksesibilitas Kota Pagar Alam dengan ibukota Provinsi dan wilayah lain.
3	Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dermaga 35 Ilir ▪ Dermaga Boom Baru ▪ Dermaga Sungai Lumpur ▪ Dermaga Keramasan ▪ Dermaga Kenten ▪ Dermaga Parit VIII ▪ Dermaga Muara Padang ▪ Dermaga Sungai Lais ▪ Dermaga Lematang ▪ Dermaga Tulung Selapan
4	Sistem Prasarana Energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalur transmisi gas (jaringan transmisi PGN) : ▪ Peningkatan kapasitas produksi pada power plant: ▪ PLTU Mulut Tambang dalam proses kajian, yaitu : ▪ jaringan transmisi interkoneksi Sumatera-Jawa dan Sumatera Lintas Timur
5	Prasarana Air Limbah Industri/Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan kegiatan yang ramah lingkungan, seperti halnya pendekatan pembentukan <i>Eco-Industrial Park/ Esatate</i>.

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 - 2030

A. Rencana Struktur Ruang

Dalam rangka mewujudkan sistem pusat-pusat permukiman, jaringan prasarana wilayah yang dibangun meliputi;

- 1) Pengembangan jaringan transportasi wilayah, yang meliputi jaringan jalan raya dan jaringan jalan kereta api.

Jaringan jalan raya yang dikembangkan meliputi jaringan jalan arteri primer, jalan tol/bebas hambatan, Kolektor primer dan jalan khusus dan rencana jaringan jalan kereta api yang meliputi jaringan Internal dan Regional.

- 2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi Pelabuhan, Bandara, Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan, Sistem Prasarana Energi dan Prasarana Air Limbah Industri/Pertambangan

Rencana struktur ruang yang meliputi rencana pengembangan sistem prasarana wilayah, mengarahkan pembangunan pada infrastruktur-infrastruktur penting yang menambah peranan yang semakin penting Provinsi Sumatera Selatan dalam zona pengembangan Sumatera. Infrastruktur yang lengkap merupakan penunjang utama Kawasan Ekonomi Khusus dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan konsep sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UU No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

B. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Rencana pola pemanfaatan ruang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung ditetapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, agar kehidupan berjalan secara teratur dan kerusakan/degradasi lingkungan dapat terhindar. Kawasan budidaya adalah ruang yang dipersiapkan untuk menampung aktivitas sosial –ekonomi.

Kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dalam Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030 terdiri dari Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya, Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Rawan Bencana. Proporsi Kawasan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan adalah 63,80% dari total luas lahan Provinsi.

Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus berada di Kawasan Budidaya dan kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus tidak mengganggu atau merusak lingkungan sekitar. Tanjung Api Api yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berada di Kabupaten Bayuasin untuk dikembangkan menjadi KEK berada di Kabupaten Banyuasin. Merujuk pada RTRWP 2010-2030 Kabupaten Banyuasin memiliki bagian lahan yang harus dilindungi meliputi Kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan hutan mangrove, kawasan sempadan pantai, dan rawan bencana alam banjir.

Tabel 2.27. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Tahun 2030

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas	%	Lokasi
1	Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya	1.408.681,64	15,34	
	a. Kawasan Hutan Lindung	760.523,00	8,28	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Rawas, OKI, OKU, OKU Selatan, Pagar Alam
	b. Kawasan Bergambut	617.415,00	6,73	Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim
	c. Kawasan Hutan Mangrove	30.743,64	0,33	Banyuasin dan Ogan Komering Ilir
2	Kawasan Pelestarian Alam, Suaka Alam dan Cagar Budaya	714.416	7,78	SM Gunung Raya, SM Padang Sugihan, SM Isau-isau, SM Gumai Pasemah, SM Dangku dan Bentayan, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Sembilang, Taman Hutan Raya Kemampo, TWA Pundi Kayu, Cagar Budaya Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya, Megalith, Situs Candi Bumiayu, Perlindungan Buaya Senyulong.
3	Kawasan Perlindungan Setempat	94.396,39	1,03	
	a. Kawasan Sempadan Pantai**	-	-	Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.
	b. Kawasan Sempadan Sungai	93.976,02	1,02	Sungai Besar : Batangharileko, Rawas, Lakitan, Kelingi, Musi, Semangus, Lematang, Ogan, Komering, Sugihan. Sungai Kecil : Kapas, Menanti, Lain, Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam, Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai, Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling, Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman,

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas	%	Lokasi
				Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan, Padi, Saleh Upang, Padang, Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta, Enim, Selangis, Endikat, Lengi, Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye, Saka, Penaku, Gilas, Lempuing, Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebusus.
	c. Kawasan Sempadan Danau/Situ	420,37	0,005	Danau Ranau, Lebak Deling, Air Itam, Teloko (OKU Selatan). Rakihan (OKU). Danau Teluk Rasau, Danau Teluk Gelam (OKI). Danau Ulak Lia (Musi Banyuasin).
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	Tentatif		Tersebar di seluruh kabupaten/kota.
4	Kawasan Rawan Bencana*	3.640.184,30	39,65	
	a. Gempa Bumi*	300.812,39	3,28	Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam
	b. Gerakan Tanah/Longsor*	958.469,61	10,44	Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Rawas, OKU, Pagar Alam, OKU Selatan
	c. Banjir*	1.001.838,30	10,91	Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Palembang.
	d. Kawasan Bahaya Gunung Dempo*	36.850,00	0,40	Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan (Kota Pagar Alam); Kecamatan Jarai dan Tanjung Sakti (Lahat); Kecamatan Lintang Kanan (Empat Lawang).
	e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan	1.342.214	14,62	Tersebar di seluruh kabupaten/kota
Total		5.857.678,33	63,80	

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

Tabel 2.28. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Tahun 2030

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (%)	%	Lokasi
1	Kawasan Budidaya Hutan	2.941.898	32,05	
	a. Hutan Produksi Tetap	2.293.083	24,98	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Pagar Alam, Palembang.
	b. Hutan Produksi Terbatas	217.370	2,37	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Pagar Alam, Palembang
	c. Hutan Produksi Konversi	431.445	4,70	Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir.
2	Kawasan Budidaya Pertanian	3.826.321,54	41,68	
	a. Pertanian Lahan Basah	909.254,42	9,90	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyuasin,

No	Jenis Pemanfaatan Ruang	Luas (%)	%	Lokasi
				Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Palembang, Prabumulih
	b. Pertanian Lahan Kering	360.868,27	3,93	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, LubukLinggau, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKI, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Palembang, Prabumulih
	c. Tanaman Perkebunan	2.544.821,17	27,72	Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, Lubuk Linggau, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, OKU, OKU Selatan, OKU Timur, Pagar Alam, Prabumulih.
	e. Perikanan	11.377,68	0,12	Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Timur, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi, Banyuasin, Banyuasin dan Kota Pagar Alam, OKI.
3	Kawasan Budidaya Non Pertanian	2.957.147,03	32,21	
	a. Kawasan Permukiman	181.646,43	1,98	Tersebar di setiap Kabupaten/Kota
	b. Kawasan Pertambangan*	2.719.500,60	29,62	Tersebar di setiap Kabupaten/Kota
	c. Kawasan Tanjung Api-api	13.000,00	0,14	Banyuasin
	d. Kawasan Pariwisata	Tentatif		Tersebar di seluruh kabupaten/kota.
	e. Kawasan Militer (Omiba)**	43.000,00	0,47	
	f. Kawasan Peruntukan Energi Panas Bumi (Geothermal)*	Tentatif		Semendo Darat Laut dan Semendo Darat Ulu (Kabupaten Muara Enim); Pulau Beringin, Way Selabung, Margabayur (OKUS)
Total		6.993.885,61	76,18	

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

C. Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Selatan

Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030, dimana Palembang dan Tanjung Api Api ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi, meliputi;

1. Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang.
2. Kawasan Tanjung Api Api.

3. Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung).

Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan yang dapat memberikan kontribusi langsung terhadap penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api Api. Dimana kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan strategis, sebagai berikut;

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
3. Sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
4. Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
5. Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
6. Sebagai kawasan andalan nasional.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29. Penetapan dan Arahan Penanganan Kawasan Strategis
Provinsi Sumatera Selatan Terkait Kawasan Tanjung Api Api

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Penanganan
1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang.	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi dalam aspek: 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan • Pengembangan pembangunan vertikal • Berpotensi sebagai kawasan

No	Kawasan Strategis	Kriteria	Arahan Penanganan
			ekonomi untuk persaingan di tingkat regional <ul style="list-style-type: none"> • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah
2	Kawasan Tanjung Api Api.	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi dalam aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan industri • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan • Mengembangkan pelabuhan internasional • Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya • Kerjasama dengan pihak swasta
3	Kawasan Palembang dan sekitarnya (termasuk Sekayu dan Kayuagung).	Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi dalam aspek: <ol style="list-style-type: none"> 1) Potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) Sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 3) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 4) Mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau 5) Mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; 6) Sebagai kawasan andalan nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional • Perlu sinergitas infrastruktur • Perlu sinergitas pembangunan antar daerah • Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan pertanian/hutan • Pengembangan kawasan agribisnis;

Sumber : Revisi RTRW Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030

2. Rencana Tata Ruang Kawasan Tanjung Api Api

Dalam rangka meninjau kebijakan detail pelaksanaan pembangunan Kawasan Tanjung Api Api rujukan utamanya adalah rencana Masterplan Kawasan Tanjung Api Api. Komponen penting kebijakan rencana tata ruang adalah terdiri dari rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang.

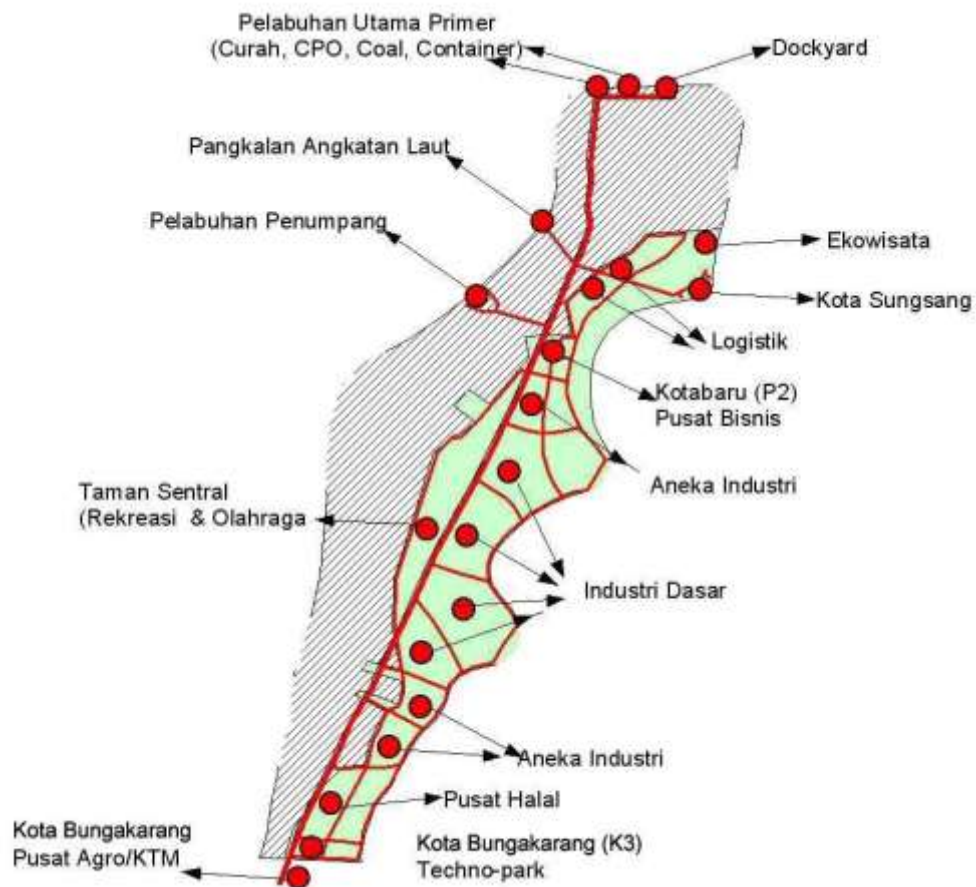
A. Rencana Struktur Ruang

Kawasan Tanjung Api Api diarahkan sebagai kawasan industri dengan dukungan pelabuhan internasional. Perencanaan ini telah sejalan dengan seluruh kebijakan pembangunan yang ada seperti RTRWN, RTRWP, RTRWK. Adapun hirarkhi pusat-pusat hirarkhi sebagaimana pada rencana struktur ruang masterplan Kawasan Tanjung Api Api yang merujuk pada rencana struktur ruangdi tingkat Provinsi maupun kabupaten adalah sebagai berikut:

- Kawasan Pelabuhan Utama Primer (PUP) Tanjung Api-api merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Subpusat Provinsi (P2), mendukung Palembang Metropolitan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau Pusat Provinsi (P1). Titik ini terdiri atas pelabuhan komoditas ekspor-import di ujung semenanjung serta pelabuhan penumpang dan penyeberangan di estuaria Sungai Banyuasin.
- Kotabaru sebagai pendukung dan menjadi satu kesatuan fungsi dengan Pelabuhan dengan demikian juga berada pada hirarkhi yang sama dengan titik pelabuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat kendali bisnis, komersial, jasa dan perdagangan, serta permukiman. Artinya titik ini menjadi Subpusat Provinsi (P2).
- Sungsang merupakan Kota Orde II atau Subpusat Kabupaten (K2) dengan fungsi kegiatan utama jasa dan perdagangan, kawasan perikanan dan pelabuhan pendaratan ikan, industri pengolahan hasil laut, pintu kawasan dari jalur perairan Palembang dan kepulauan, serta pemerintahan tingkat kecamatan dan pelayanan umum. Pada jangka panjang Sungsang akan berkembang dan menggabung dengan kota baru dan pelabuhan tersebut di atas sebagai PKW.

- Bungakarang merupakan Kota Orde III atau Subsub pusat Kabupaten (K3) dengan fungsi kegiatan utama penyiapan sumberdaya (SDM, teknologi industri, dan utilitas), transportasi, pelayanan umum dan pemerintahan. Kota ini diprediksikan tumbuh sepasang, seberang-menyeberang Saluran Sebalik, di dalam dan di luar batas kawasan perencanaan, sekaligus menjadi pintu yang menghubungkan dengan kawasan agropolitan.

Gambar 2.21. Skematik Struktur Ruang Kawasan



Tabel 2.30. Rencana Tata Jenjang Fungsi Kegiatan & Pelayanan

No	Fungsi Kegiatan & Pelayanan	Kapasitas Pelayanan	Jenis/Besaran Pelayanan	Jenjang	Lokasi
1	Industri	Skala besar	Kawasan peruntukan industri	F1	Jalur poros
		Skala menengah	Sentra/lingkungan/kawasan industri	F2.1	Sungsang, Kotabaru, Bungakarang
2	Perdagangan & Jasa	Skala regional	Tempat Pelelangan Ikan(TPI), pasar besar/grosir, pusat pertokoan, bank	F1	Kotabaru, Sungsang
		Skala kawasan	Pasar, Pertokoan, bank	F2.1	Sungsang, Bungakarang
		Skala lingkungan	Toko lingkungan, warung	F2.2	Semua lingkungan
3	Perkantoran Pemerintah	Skala regional	Kompleks kecamatan, instansi vertikal	F1	Sungsang, Kotabaru, Bungakarang
		Skala kawasan	Kantor desa, Pos	F2.1	Sungsang, Bungakarang
		Skala lingkungan	Balai	F2.2	Semua lingkungan
4	Pendidikan	Skala regional	SMA, SMK, vokasional, BLK, PT	F2.1	Sungsang, Bungakarang
		Skala kawasan	SMP	F2.1	Idem
		Skala lingkungan	SD, TK	F.2.2	Semua lingkungan
5	Kesehatan	Skala regional	RS	F1	Kotabaru
		Skala kawasan	Puskesmas	F2.1	Sungsang, Bungakarang
		Skala lingkungan	PusTu, Klinik	F2.2	Semua lingkungan
6	Olahraga & rekreasi	Skala regional	Sport venue dengan stadion&sporthall, golfcourse, taman sentral	F1	Kotabaru
		Skala kawasan	Lapangan bola, taman kota	F2.1	Sungsang, Kotabaru, Bungakarang
		Skala lingkungan	Lapangan (ukuran voli), taman main	F2.2	Semua lingkungan
7	Transportasi	Skala regional	Dermaga, Terminal Multi-moda, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), pergudangan	F1	Sungsang, Kotabaru, Bungakarang
		Skala kawasan	Subterminal	F2.1	Kotabaru
		Skala lingkungan	Halte, perhentian	F2.2	Setiap lingkungan

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Pendukung Kawasan Tanjung Api Api, Tahun 2008..

Tabel 2.31. Rencana Perwilayahan Kawasan Penyangga Pelabuhan
Tanjung Api Api

Wilayah	Lokasi Pusat	Fungsi Dominan Kawasan	Pengelompokan Fasilitas di Pusat
Kawasan (total)	Kotabaru	Pengelola ekspor, industri, pergudangan/logistik, techno-park	Central Business District (pusat kendali bisnis & komersial), jasa-perdagangan, perbelanjaan, entertainment, kesehatan
Subkawasan Utara	Sungsang	Industri, pergudangan, transportasi, ekonomi-bisnis, jasa komersial, administrasi, pelayanan umum, permukiman perkotaan, hutan/konservasi	Perdagangan, perbelanjaan, perkantoran, jasa, terminal, pendidikan, kesehatan, olahraga & rekreasi
Subkawasan Selatan	Bungakarang	Transportasi, pendidikan tinggi & khusus, instalasi utilitas, pelayanan umum, pelayanan sosial, permukiman perkotaan	Perkantoran, fasilitas pelayanan umum & sosial, perbelanjaan, pendidikan & techno-park, kesehatan, olahraga, terminal

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Pendukung Kawasan Tanjung Api Api, Tahun 2008..

B. Rencana Pola Tata Ruang Kawasan

Pada intinya konsep pengembangan lahan kawasan dapat dirinci sebagai berikut:

- Menetapkan jalur sempadan Sungai Telang sebagai kawasan lindung terhadap pembangunan fisik;
- Menetapkan jalur penyangga (*buffer strip*) kawasan Hutan Lindung Air Telang untuk membatasi desakan pembangunan dari Kawasan Perencanaan;
- Membuka ruang kegiatan industri dan pergudangan skala besar yang setingkat dengan derajat Pelabuhan Tanjung Api-api, dengan memanfaatkan areal semak belukar, alih fungsi lahan

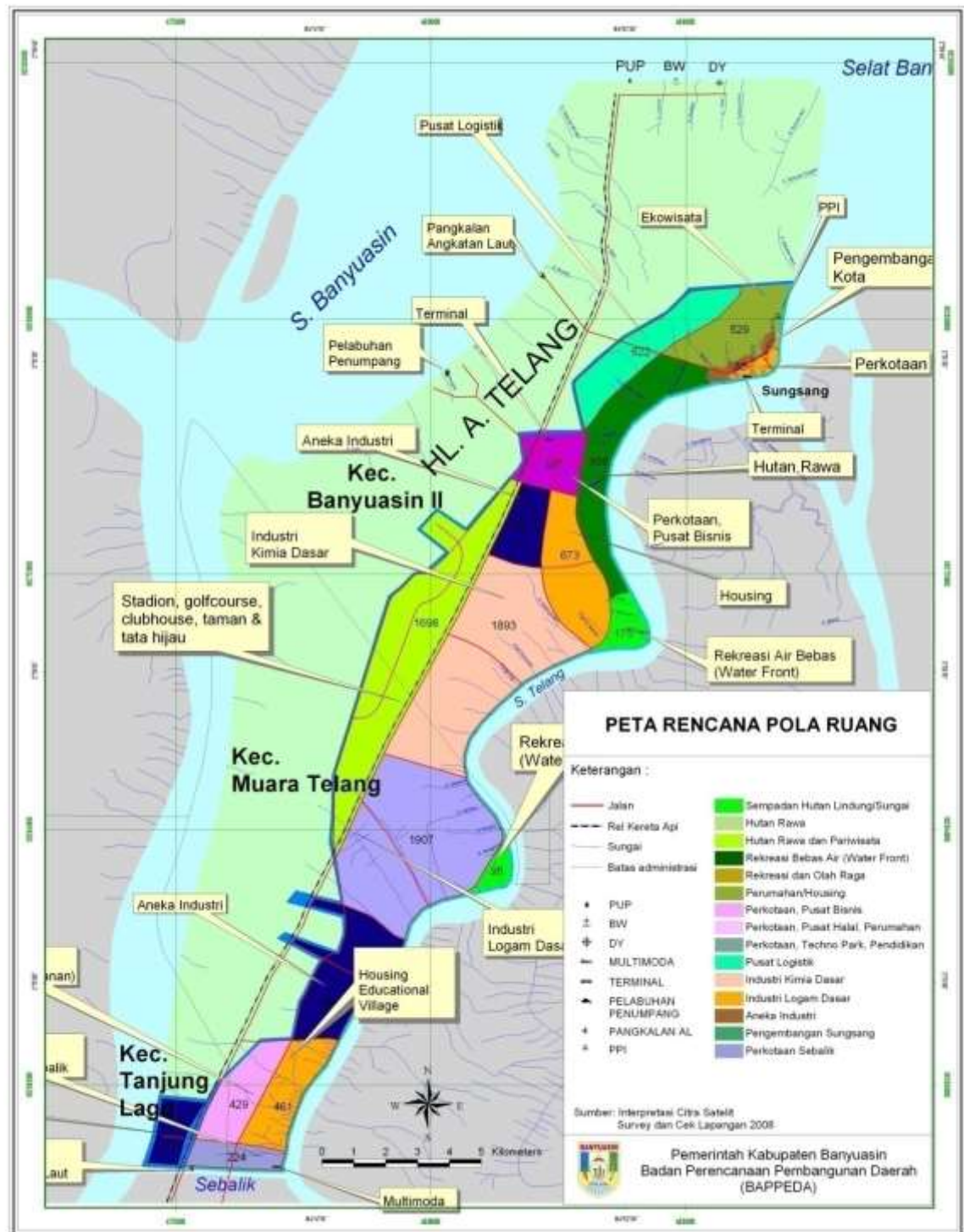
perkebunan kelapa rakyat dan sawah pasang-surut di sepanjang tepian Sungai Telang;

- Mengisi ruang antara dan ruang pengikat dengan jasa komersial, pelayanan umum, dan permukiman perkotaan yang terkait;
- Mengendalikan skala pengembangan zona industri dan permukiman baru dengan sistem blok yang terkendali, dan melingkupinya dengan buffer strip berupa penghijauan atau hutan bakau yang dapat berfungsi lindung maupun penyangga;
- Mengembangkan permukiman darat (*landed*) dengan variasi kepadatan, atau semi-darat (perumahan panggung dan infrastruktur darat) sebagai alternatif ekstensifikasi permukiman asli ke arah daratan.

Di dalam Kawasan Perencanaan akan dibangun sejumlah zona eksklusif yang mampu mengakomodasi berbagai fungsi kegiatan yang akan dikembangkan, meliputi:

- zona pengolahan ekspor;
- technological park;
- zona logistik;
- zona industri;
- zona permukiman;
- zona pusat jasa komersial;
- zona olahraga dan rekreasi; dan
- zona pariwisata.

Gambar 2.22. Rencana Pola Penggunaan Lahan Kawasan Tanjung Api



Sumber : Bappeda Kabupaten Banyuasin

Tabel 2.32. Komposisi Rencana Penggunaan Lahan Kawasan

No	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	(%)	Catatan
1	Industri Kimia Dasar	1,893	15.41	
2	Industri Logam Dasar	1,907	15.53	
3	Aneka Industri	1,279	10.41	Kawasan Industri
4	Industri Khusus	429	3.49	Halal Hub, Perikanan, instalasi utilitas, dll
5	Pusat Logistik& Pergudangan	622	5.06	
6	Kota Sungsang	153	1.25	Plus ekstensinya
7	Perkotaan Pusat Bisnis	337	2.74	Kotabaru
8	Perkotaan &Techno Park	224	1.82	Bungakarang
9	Perumahan	673	5.48	Sisi Kotabaru
10	Perumahan& Kampus	461	3.75	Sisi Bungakarang
11	Taman Sentral	1,698	13.83	Stadion, golfcourse, clubhouse, taman rekreasi, hutan kota, dll
12	Rekreasi Air Bebas (Waterfront)	273	2.22	
13	Hutan Rawa Ekowisata	529	4.31	
14	Hutan Rawa	808	6.58	
15	Sempadan Sungai & Buffer-strip	996	8.11	
T o t a l		12.282	100.00	

Sumber : Rencana Detail Tata Ruang Pendukung Kawasan Tanjung Api Api, Tahun 2008.

C. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.33. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

No	Struktur Ruang	Arahan	Kebijakan
1	Sistem Perkotaan Nasional	PKN : Palembang PKW : 1. Muara Enim 2. Kayuagung 3. Baturaja 4. Prabumulih 5. Lubuk Linggau	Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I) Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Pengembangan atau peningkatan fungsi (II/C/I) Pengembangan atau peningkatan fungsi (I/C/I)

No	Struktur Ruang	Arahan	Kebijakan
		6. Sekayu 7. Lahat	Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B) Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi (II/B)
2	Jalan bebas hambatan	Palembang-Muara Enim	Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan
		Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau	
		Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu	
		Palembang-Indralaya (Tol dalam kota)	
3	Pelabuhan	Tanjung Api Api (satu sistem dengan Palembang)	Pemantapan pelabuhan internasional (I/I)
4	Bandar Udara	Pusat pengembangan sekunder Sultan Mahmud Badaruddin II	Pengembangan Bandara Sekunder (I/4)
5	Wilayah Sungai	Strategis Nasional Banyuasin	Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air (I-IV/A/I)

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah nasional di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari rencana kawasan lindung dan rencana kawasan andalan. Kawasan lindung yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 (lima) kawasan diantaranya adalah Suaka Margasatwa Gumai Pasemah, Suaka Margasatwa Gunung Raya, Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah, Suaka Margasatwa Bentayan dan Suaka Marga Satwa Dangku. Kawasan Andalan yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 (empat) kawasan diantaranya adalah Kawasan Muara Enim dsk, Kawasan Lubuk Linggau dsk, Kawasan Palembang dsk, Kawasan Laut Bangka dsk.

Tabel 2.34. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional di
Provinsi Sumatera Selatan

No	Penggunaan Ruang	Arahan	Kebijakan
1	Kawasan Lindung	1. Suaka Margasatwa Gumai Pasemah	Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Lindung Nasional (II/B/2)
		2. Suaka Margasatwa Gunung Raya	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (I/B/2)
		3. Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (II/B/2)
		4. Suaka Margasatwa Bentayan	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (I/B/2)
		5. Suaka Marga Satwa Dangku	Pengembangan dan pengelolaan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut (II/B/2)
2	Kawasan Andalan dan Sektor Unggulan	1. Kawasan Muara Enim dsk	Pertanian, pertambangan dan perkebunan
		2. Kawasan Lubuk Linggau dsk	Pertanian, perkebunan dan industri
		3. Kawasan Palembang dsk	Pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan
		4. Kawasan Laut Bangka dsk	Perikanan dan pariwisata

Sumber : PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Provinsi Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung yang memiliki cakupan pelayanan yang luas menjadi potensi dalam melakukan konsentrasi dan distribusi kegiatan perekonomian, seperti pengumpulan bahan mentah untuk dikelola menjadi bahan baku/bahan jadi, yang selanjutnya dapat di distribusikan baik untuk kepentingan nasional maupun untuk kepentingan internasional.

Besarnya keterkaitan Kota Palembang dengan kota-kota lainnya, menunjukkan peranan yang sangat strategis dari Kota Palembang

dalam menunjang perkembangan Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera. Dorongan perkembangan Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting untuk menciptakan dampak penetesan pada wilayah-wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan dan Pulau Sumatera.

Tabel 2.35. Rencana Sistem Pusat-Pusat Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2030

No	Sistem Pusat Permukiman	Kota-Kota	
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Palembang	melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi, khususnya pada kawasan Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka-Belitung);
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	1. Prabumulih, (Kota Prabumulih) 2. Lubuk Linggau (Kota Lubuk Linggau) 3. Pagar Alam (Kota Pagar Alam) 4. Muara Enim (Kabupaten Muara Enim) 5. Baturaja (Kabupaten OKU) 6. Lahat (Kabupaten Lahat) 7. Indralaya (Kabupaten Ogan Ilir) 8. Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin) 9. Kayu Agung (Kabupaten OKI) 10. Sungsang (Kabupaten Banyuasin) 11. Martapura (Kabupaten OKU Timur)	
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	11. Sungai Lilin (Kabupaten Musi Banyuasin) 12. Tebing Tinggi (Kabupaten Empat Lawang) 13. Muara Beliti (Kabupaten Musi Rawas) 14. Muara Dua (Kabupaten OKU Selatan) 15. Pangkalan Balai (Kabupaten Banyuasin) 16. Gumawang (Kabupaten OKU Timur) 17. Tugumulyo (Kabupaten OKI) 18. Talang Ubi (Kabupaten Muara Enim) 19. Peninjauan (Kabupaten OKU) 20. Muara Rupit (Kabupaten Musi Rawas) 12. Bayung Lencir (Kabupaten Musi Banyuasin) 15. Tanjung Raja (Kabupaten Ogan Ilir) 16. Muara Lakitan (Kabupaten Musi Rawas) 17. Pangadonan (Kabupaten OKU)	

Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010-2030.

2.2. KONDISI INDUSTRI SECARA UMUM

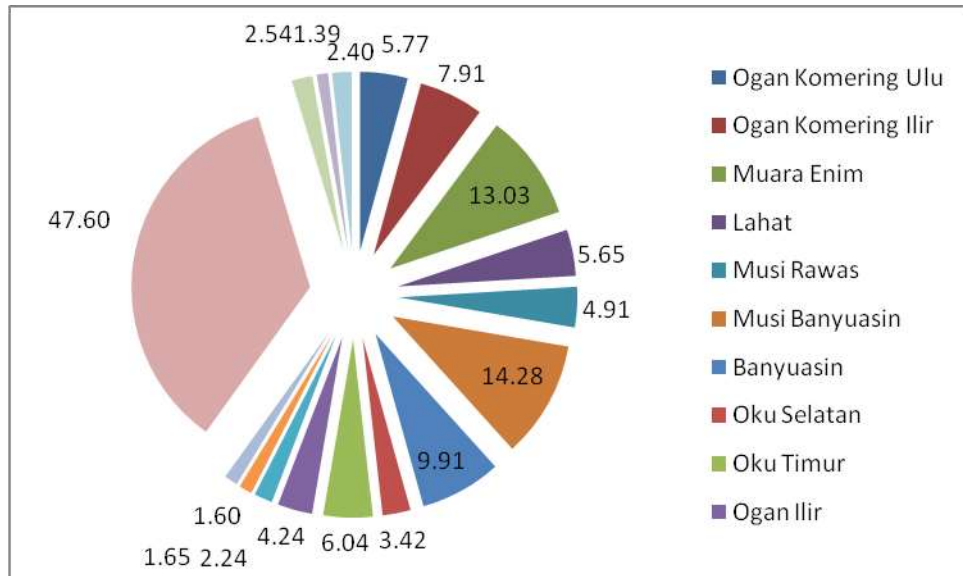
2.2.1. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Pada periode 2012-2015, Industri Pengolahan tanpa Migas, untuk Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 14,9%. Dan terendah terjadi pada tahun 2012 (5,5%). Secara umum, jika ditarik trend dari angka pertumbuhan ini, maka Industri Pengolahan tanpa Migas Provinsi Sumatera Selatan masih bernilai positif (Gambar 2.23).



Sumber: BPS.Go.Id, diolah

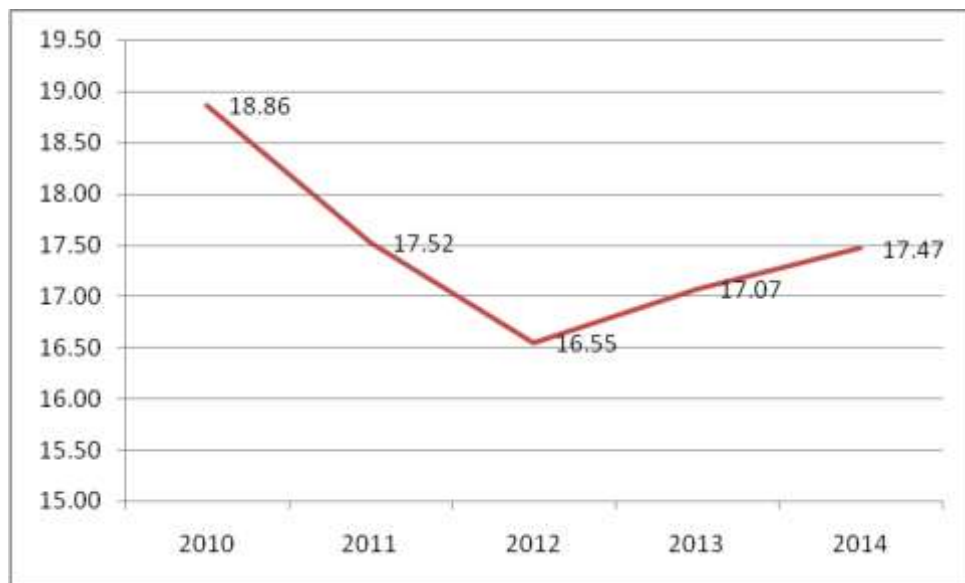
Gambar 2.23. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Nonmigas Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, 2015. Diolah

Gambar 2.24. Grafik Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB menurut Kabupaten Kota, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2014

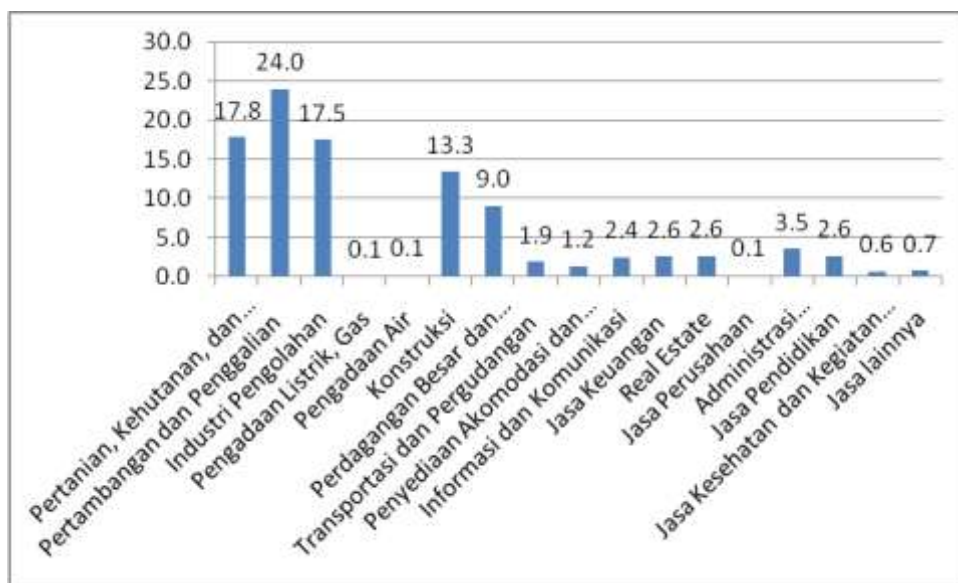
Sektor industri pengolahan tanpa migas memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 secara berturut-turut sebesar 47,6% pada Kota Palembang, kemudian disusul Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 14,28%, Kabupaten Muara Enim sebesar 13,03%.



Sumber: Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, 2015. Diolah

Gambar 2.25. Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB,
 Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2014

Persentase Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 sebesar 18,86%; sebesar 17,52% pada tahun 2011, 16,55% tahun 2012, 17,07% tahun 2013, dan 17,47% tahun 2014. (Gambar 2.25) Kontribusi sektor industri tanpa migas mengalami penurunan dikarenakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir industri di Provinsi Sumatera Selatan terjadi peningkatan proporsi yang cukup signifikan pada sector konstruksi.



Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Gambar 2.26. Grafik Kontribusi Sektor Industri Nonmigas terhadap PDRB Tahun 2014

Sektor industri tanpa migas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 didominasi oleh industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, disusul dengan industri Pengolahan dan industri Konstruksi berturut-turut masing-masing industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 17,8 % dan Industri Pengolahan 17,5%, dan Industri Konstruksi sebesar 13,3%. (Gambar 2.26).

Tabel 2.36. Kontribusi Masing-Masing Cabang Industri dalam Pembentukan PDRB Sektor Industri Tanpa Migas Tahun 2014

No.	Kelompok Industri	Nilai Tambah (Milyar Rp)	Persentase (%)
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	319.103	27,34
2	Tekstil, Barang Kulit dan Alas kaki	85.106	7,29
3	Barang. kayu dan Hasil hutan lainnya.	17.169	1,47

No.	Kelompok Industri	Nilai Tambah (Milyar Rp)	Persentase (%)
4	Kertas dan Barang cetakan	60.235	5,16
5	Pupuk, Kimia dan Barang dari karet	225.146	19,29
6	Semen dan Barang Galian bukan logam	39.507	3,38
7	Logam Dasar Besi dan Baja	44.499	3,81
8	Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya	49.865	4,27
9	Barang lainnya	326.594	27,98

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2014 diolah

Jumlah unit usaha industri besar sedang (IBS) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 didominasi oleh industri industri Barang Kayu dan Hasil Hutan, dan industri Makanan, Minuman dan Tembakau, dan industri Tekstil, Barang Kulit dan Hasil Hutan berturut-turut masing-masing 20,35%; 20,35% dan 17,17 dari jumlah unit usaha IBS.

2.2.2. Jumlah Unit Usaha Industri

Untuk meningkat kesejahteraan penduduk, dalam bidang industri yang perlu dilakukan adalah peningkatan dan pembangunan industri kecil dan menengah di semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.37. Unit Usaha, Tenaga Kerja (orang) dan Investasi (Rp. 000)
Industri Kecil dan Menengah, Provinsi Sumatera Selatan, 2005-2014

Tahun	Industri Kecil Formal			Industri Kecil Non-formal		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Ribu Rupiah)	Unit Usaha	Tenaga Kerja (orang)	Investasi (Ribu Rupiah)
2005	5.628	33.863	119.667.249	29.220	95.850	116.661.300
2006	5.895	38.179	133.288.532	29.220	95.850	116.661.300

2007	6.059	38.558	152.208.315	29.850	106.857	118.042.005
2008	6.638	41.734	177.304.768	31.406	110.096	132.617.584
2009	7.642	44.880	243.327.927	32.668	112.992	193.539.195
2010	8.013	46.164	256.607.267	33.300	113.554	200.166.106
2011	8.657	47.729	302.189.064	33.356	114.021	206.268.106
2012	8.657	47.729	302.189.064	35.429	119.109	248.176.389
2013	8.858	48.964	340.842.567	35.700	118.641	263.289.210
2014	10.010	52.916	471.454.286	40.132	126.274	325.002.103

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi Sumatera Selatan, 2015.

Tabel 2.37 memperlihatkan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan Investasi dalam Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM Provinsi Sumatera Selatan dibagi dua yakni, Industri Kecil Formal dan Industri Kecil Non-formal.

Tabel 2.38. Distribusi Penduduk menurut Lapangan Kerja dan Jenis Kelamin, Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2014

	2013			2014		
Lapangan Pekerjaan	Lk.	Pr	Total	Lk.	Pr.	Total
Sektor Primer						
Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan	57.27	50.86	54.86	55.87	49.34	53.37
Pertambangan dan Penggalian	2.24	0.25	1.49	1.58	0.12	1.02
Sektor Sekunder						
industri	4.26	5.88	4.87	4.7	5.62	5.05
Listrik, Gas, Air	0.27	0.06	0.19	0.21	0.12	0.17
Konstruksi	5.86	0.41	3.82	7.19	0.21	4.52
sektor Tersier						
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa	11.51	22.02	15.46	11.79	24.56	16.69
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.59	0.36	3.36	6.29	0.57	4.1
Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.55	1.74	2.24	2.2	1.11	1.78
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	10.44	18.43	13.44	10.17	18.35	13.3
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2014 tenaga kerja Provinsi Sumatera Selatan bekerja pada (dari yang terbesar sektor)

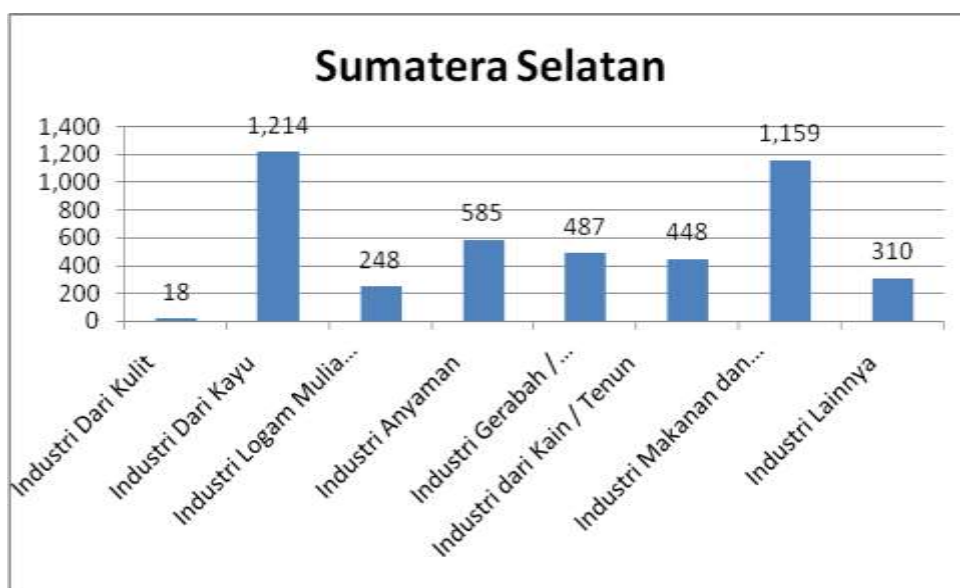
Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan sebanyak 53,37%, kemudian diikuti pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa sebanyak 16,19%, Jasa Kemasyarakatan sebanyak 13,3%, Industri sebanyak 5,05%, Konstruksi sebanyak 4,52%, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebanyak 4,1% dan yang terkecil adalah sektor Listrik, Gas, Air sebanyak 0,17%.

Tabel 2.39. Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar Sedang menurut Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2013

Produksi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dan Kodok	242	483	725
Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO)	7380	1636	9016
Industri Ice Kristal	42	3	45
Industri Penyosohan Beras	353	92	445
Industri Penyosohan Kopi	110	22	132
Industri Produk Roti dan Kue	53	74	127
Industri Gula Kristal Putih	632	28	660
Industri Makaroni, Mie, dan Produk sejenisnya	325	361	686
Industri Pengolahan Kopi dan Teh	489	407	896
Industri Kecap	85	171	256
Industri Saus	68	77	145
Industri Air Mineral	96	14	110
Industri Pakaian Jadi	16	18	34
Industri Penggergajian Kayu	315	16	331
Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	1053	827	1880
Industri Bubur Kertas (Pulp)	1130	64	1194
Industri Peretakan Umum	60	15	75
Industri Briket Batubarra	71	28	99
Industri LPG	90	13	103
Asam Sulfanate & Aluminium Sulfat	117	15	132
Industri Pupuk Urea	2415	204	2619
Industri Farmasi (Obat)	284	330	614
Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	7109	877	7986
Industri Barang dan Plastik untuk Perlengkapan Rumah Tangga	240	294	534
Industri Batu Bara dan Tanah Liat	587	74	661
Industri Genteng dan Tanah Liat/Keramik	88	69	157
Industri Barang dan Batu untuk Perlengkapan	422	49	471

Rumah Tangga			
Industri Baja Lembaran	62	1	63
Industri Barang dari Kawat	462	114	576
Industri Karoseri Mobil	24	2	26
Industri Kasur dan Matras	726	150	876
Jasa Reparasi kapak, Perahu dan Bangunan Terapung	529	42	571

Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Selatan, 2013.



Sumber : BPS, 2014

Gambar 2.27. Desa/Kelurahan menurut keberadaan jenis Industri Kecil dan Mikro, Sumatera Selatan, 2013

Jumlah Perdesaan/Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai industri Kecil dan Mikro sebanyak 4.469. industri kecil dan mikro yang terbanyak dipunyai 1.214 desa/kelurahan, kemudian disusul sebanyak 1.159 desa/kelurahan yang mempunyai industri makanan dan minuman. Sebanyak 18 desa yang mempunyai industri dari Kulit.

Berdasarkan aspek fisik, Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk mendorong

pengembangan industri. potensi fisik yang dimiliki Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. Memiliki ketersediaan lahan potensial bagi pengembangan industri pertanian pangan. Provinsi ini memiliki lahan pertanian tanaman pangan seluas 752.150 ha, yang dapat mendukung swasembada pangan dan meningkatkan pendapatan pendapatan masyarakat tani, mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan ssebagai Lumbung Pangan.

Sentra-sentra produksi tanaman pangan di Wilayah Provinsi Sumatera selatan yaitu:

a) Sentra produksi padi/palawija

- Kawasan Pantai Timur: Kabupaten Ogan Komerint Ilir, Kabupaten Musi banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin.
- Kawasan Upper Komering meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Kawasan Bendungan Kelingi/Tugu Mulyo dan sekitarnya. Meliputi Kabupaten Musi Rawas.
- Kawasan Pegagan. Meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b) Sentra Produksi Sayuran terdapat di daerah

- Kawasan Gunung Dempo. Meliputi Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Lahat.
- Kawasan Semendo, meliputi Kabupaten Muara Enim
- Kawasan Ranau, meliputi Kabupate Ogan Komering Ulu Selatan

- c) Sentra produksi buah-buahan terdapat di Kabupaten Ogan Komerint Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muaraenim, dan Kabupaten Lahat.
2. Memiliki ketersediaan lahan yang potensial bagi pengembangan kegiatan perkebunan. Beberapa komoditi unggulan hasil perkebunan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya melalui optimasi lahan adalah karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa.
 3. Memiliki areal hutan seluar 4.630.717 ha (53,21 % dari luas wilayah). Dari luas tersebut terdapat sebesar 1.810.023 ha merupakan hutan yang berpotensi sebagai hutan produksi dan seluas 214.679 ha merupakan hutan produksi terbatas.
 4. Memiliki wilayah pesisir yang mengandung potensi untuk pengembangan ekonomi, seperti budidaya tambak (5.846 ha).
 5. Memiliki potensi sumber daya wisata, seperti Danau Ranau dan Gunung Dempo, objek wisata sejarah dan budaya di Benteng Kuto Besak Palembang, dan pengembangan wisata Sungai Musi.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 (empat) sektor ekonomi potensial yakni:

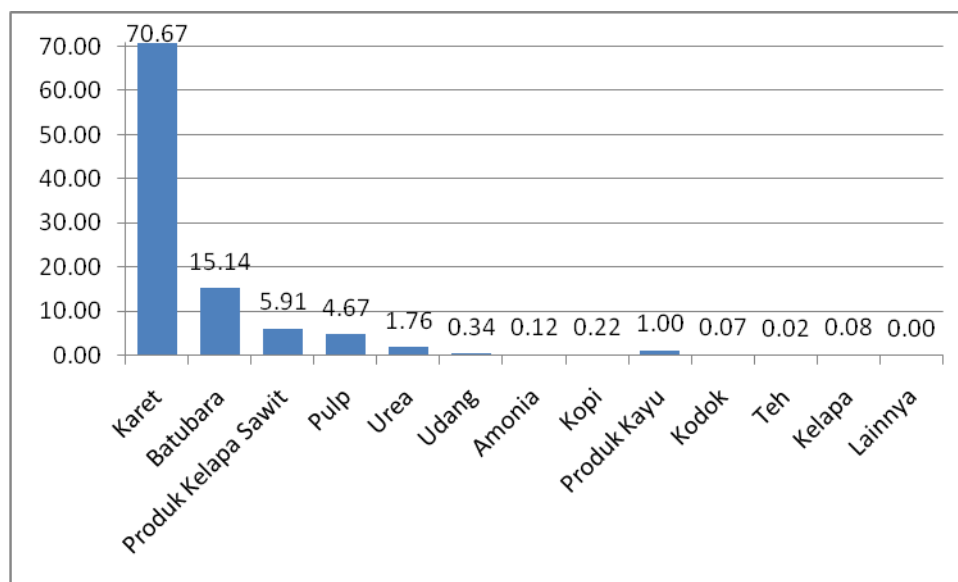
1. Sektor pertambangan.
2. Sektor industri pengolahan,
3. Sektor pertanian, dan
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

Untuk melihat sejauh mana potensi industri secara lengkap, dapat diambil kriteria penilaian antara lain berupa : komoditi unggulan, potensi industri eksisting, produk unggulan, industri terkait, luasan lahan produksi (sumber bahan baku), dan kemungkinan

pengembangan, tenaga kerja yang diserap, teknologi yang dimanfaatkan, pasar dan prospek pasar, serta peluang pengembangan industri kedepan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

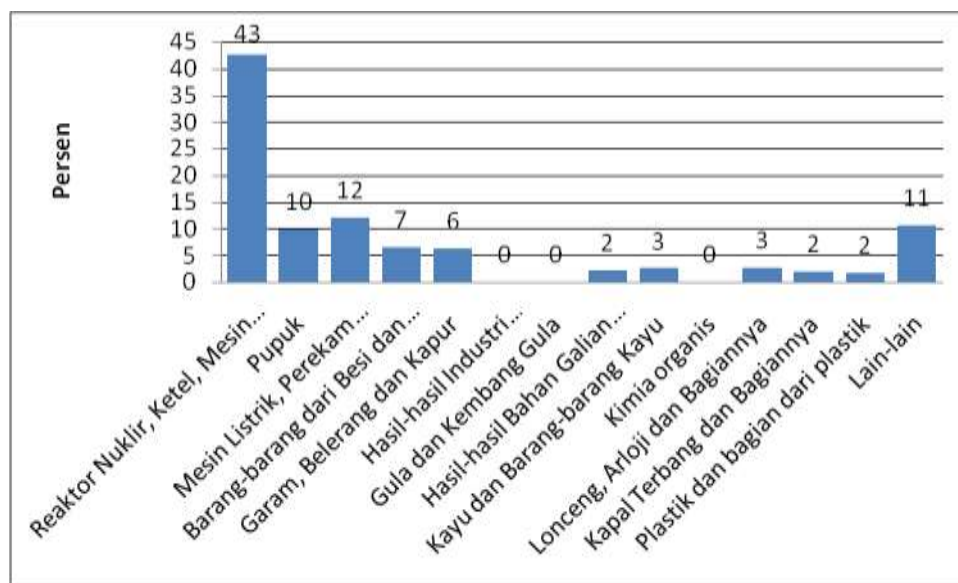
2.2.3. Ekspor dan Impor Produk Industri

Pada tahun 2013, sebesar 70,67 % (dengan nilai 2.705.493 Dolar Amerika Serikat) ekspor Sumatera Selatan terdiri dari produk-produk karet dan barang-barang dari karet (Gambar 2.28). Kemudian diikuti ekspor Batu Bara sebesar 15.14 persen (US\$ 579.595), Produk Kelapa Sawit 5.91 % (US\$ 226.144), Pulp 4.67% (US\$ 178.593), Urea 1.76% (US\$ 67.326) dan komoditas lainnya dengan persentase yang lebih rendah. Tiga Negara tujuan ekspor utama (menurut besar dolar AS) adalah ke Amerika Serikat, Malaysia, Tiongkok.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Gambar 2.28. Ekspor Menurut Komoditas, Provinsi Sumatera Selatan (%),
2013



Sumber: Sumatera Selatan dalam Angka, 2014

Gambar 2.29. Import menurut Komoditas, Provinsi Sumatera Selatan, 2013

Komoditas impor Sumatera Selatan sebagian besar didominasi barang modal seperti mesin dan kendaraan, misalnya reaktor nuklir, ketel, mesin yang digunakan, mesin listrik, perekam suara dan alat penerima gambar, barang-barang kimia organik seperti pupuk dan beraneka ragam hasil kimia (Gambar 2.29). Impor Sumatera Selatan berasal dari negara-negara: China, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Rusia.

Impor utama Provinsi Sumatera Selatan adalah Reaktor Nuklir, Ketel, Mesin sebanyak 43% (US\$ 241.911.151), Pupuk 10% (US\$ 55.838.748). Mesin Listrik, Perekam Suara dan Alat Penerima Gambar 12% (US\$ 68.702.875), Barang-barang dari Besi dan Baja 7% (US\$ 37.751.457), dan Garam, Belerang dan Kapur 6% (US\$ 36.358.819).

Tabel 2.40. Ekspor Beberapa Jenis Barang Utama Bukan Minyak bumi dan Gas Alam 2013-2014 (dolar AS)

Nomor	Sektor	Nilai FOB		Perubahan	
		2013	2014	Absolut	Persent
I	Hasil Sektor Pertanian	36.703.851	31.774.385	-4929466	-13,43
	Buah-buahan	14.006.133	15.069.081	1062948	7,59
	Kopal dan lain-lain	340.564	-	-340564	-100,00
	Kopi	8.491.500	6.859.788	-1631712	-19,22
	Tanaman Obat	499.140	-	-499140	-100,00
	Teh	281.526	790.626	509100	180,84
	Udang segar/beku	12.417.963	8.081.596	-4336367	-34,92
	Ikan dll.	218.385	716.905	498520	228,28
	Rempah-rempat	65.262	386	-64876	-99,41
II	Hasil Sektor Industri	3.058.976.887	2.193.800.324	-865176563	-28,28
	Pupuk	65.588.455	32.913.516	-32674939	-49,82
	Makanan olahan	7.235.665	32.822.030	25586365	353,61
	Minyak Nabati	187.222.537	116.414.073	-70808464	-37,82
	Karet Alam Olahan	2.705.487.572	1.880.629.333	-824858239	-30,49
	Kayu Olahan	36.023.482	58.665.947	22642465	62,85
	Asam Berlemak	16.628.306	20.729.313	4101007	24,66
	Bahan Kimia	4.607.905	20.729.313	16121408	349,86
	Meubel dan bagian-bagiannya	15.766	98.384	82618	524,03
	Industri lainnya	9.515.845	6.328.942	-3186903	-33,49
	Makanan ternak	24.956.891	23.024.070	-1932821	-7,74
	Barang Anyaman	135.232	57.932	-77300	-57,16
	Barang dari logam tidak mulia	705.288	153.690	-551598	-78,21
	Alat listrik, Ukur, Fotografi dll,	816.657	1.170.880	354223	43,37
	Tekstil	37.286	62.901	25615	68,70
III	Hasil Sektor Pertambangan	198.441.578	268.716.455	70.274.877	35,41
	Batubara	198.441.578	268.716.455	70.274.877	35,41

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri: Ekspor Sumatera Selatan, 2014

Tabel 2.41. Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Selatan, 2000 -
2014 (Juta dolar AS)

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca	
	Total	Nonmigas	Total	Nonmigas	Total	Nonmigas
2000	570,9	509,0	213,8	199,9	357,1	309,1
2001	520,9	406,8	112,2	111,3	408,7	295,5
2002	626,7	479,7	154,8	153,2	471,9	326,6
2003	894,5	731,8	112,3	107,1	782,2	624,7
2004	1.153,7	1.006,3	85,8	84,7	1.067,9	921,6
2005	1.241,0	1.050,7	192,4	169,1	1.048,6	881,6
2006	2.390,5	1.882,9	284,0	282,6	2.106,6	1.600,3
2007	2.717,6	2.293,5	167,7	162,9	2.549,9	2.130,6
2008	3.449,4	2.662,5	225,4	210,2	3.223,9	2.452,2
2009	1.994,9	1.599,6	220,0	206,3	1.774,9	1.393,3
2010	3.513,6	3.013,4	365,9	346,8	3.147,8	2.666,6
2011	5.057,4	4.556,0	553,9	532,4	4.503,5	4.023,7
2012	4.371,7	3.722,6	506,7	473,4	3.865,0	3.249,2
2013	3.915,7	3.294,1	566,0	529,6	3.349,7	2.764,5
2014	3.083,9	2.494,1	751,0	708,0	2.332,9	1.786,1

Sumber: Statistik Perdagangan Luar Negeri: Impor Sumatera Selatan, 2014

2.3. SUMBER DAYA INDUSTRI

Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku, lembaga diklat dan litbang serta investasi industri. Perkembangan sumber daya industri tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

2.3.1. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.42 memperlihatkan tenaga kerja dalam sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan. Terlihat terjadi trend positif dalam perkembangan jumlah tenaga kerja dalam sektor Industri. Pada tahun 2005, sektor industri di Provinsi Sumatera Selatan menyerak tenaga kerja sebanyak 198,894 orang dan bertumbuh menjadi 303.902 orang pada tahun 2005- 2014.

Tabel 2.42. Tenaga Kerja Sektor Industri, Provinsi Sumatera Selatan, 2005-2014 (orang)

Tahun	Tenaga Kerja (orang)
2005	198,894
2006	203,338
2007	215,699
2008	223,338
2009	234,619
2010	243,275
2011	224,362
2012	285,745
2013	289,499
2014	303,902

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

2.3.2. Sumber Daya Alam (SDA)

1. SDA Pertambangan

Potensi SDA Provinsi Sumatera disajikan dalam bagian ini. Tabel 2.43 memperlihatkan Potensi SDA Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.43. Potensi SDA Pertambangan Provinsi Sumatera Selatan, 2009

No	Komoditas	Unit	Potensi
1	Minyak Bumi	Metrick Stock Tank Barrel (MSTB)	812960
2	Gas Bumi	Billion Standad Cubic Feet (BSCS)	19149
3	Batu Bara	Milyar ton	22.24
4	<i>Coalbed Methane</i>	Trilyun Standard Cubic Feet (TSCF)	183
5	Panas Bumi	Mega Watt Energy (MW e)	1885

Sumber:Dinas Pertambangan dan Energy Provinsi Sumatera Selatan, 2009-2014

Tabel 2.44. Produksi Bahan Tambang dan Galian menurut Jenis Barang dan Lokasi, Provinsi Sumatera Selatan, 2009-2013

No.	Komoditas	Lokasi	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013
1	Minyak Bumi	Prabumulih,	Barel (ribu)	20.716,76	25.407,06	12.130,04	26.720,00	26.654,30
		Muara Enim,						
		Muba,						
		Lahat, OKU						
2	Gas Bumi	Prabumulih,	MMBTU	389.731,97	569.538,18	578.581,04	605.110,00	609430,346
		Muara Enim,						
		Muba,						
		Lahat,						
3	Batu Bara	OKU	Ton	10.869.870	15.365.659	20.020.669,41	25.300.000,00	23.980.738,71
		Muara Enim,						
		Lahat						

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013. Diolah

Bahan tambang dan galian yang ditemukan di Provinsi Sumatera Selatan adalah Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batu Bara. Minyak bumi ditemukan di Kabupaten/Kota Prabumulih, Muara Enim, Muba, Lahat, dan OKU. Sedangkan Gas Bumi ditemukan di Kabupaten/Kota Prabumulih, Muara Enim, Muba, Lahat, dan OKU. Selanjutnya Batu Bara ditemukan di Kabupaten/Kota Muara Enim, dan Lahat. Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumber daya tambang yang berpotensi sebagai sumber daya energi antara lain:

- Cadangan minyak bumi tercatat sebanyak 26.654,30 ribu Barrel (2013).
- Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 609.430,346 MMBTU (2013)
- Cadangan batu bara sebesar 23.980,74 juta ton. Cadangan ini sama dengan 38% cadangan batu bara nasional.

2. SDA Perkebunan Karet

Tabel 2.45. Luas Tanam Perkebunan Karet Rakyat (%), Provinsi Sumatera Selatan, 2011

NO.	Kabupaten/Kota	Luas Tanam Perkebunan
1	Palembang	0
2	Ogan Ilir	2
3	Oki	12
4	Banyuasin	7
5	Muba	14
6	Prabumulih	2
7	Muara Enim	19
8	Oku	6
9	Oku Timur	7
10	Oku Selatan	0
11	Lahat	2
12	Pagar Alam	0
13	Empat Lawang	0
14	Musi Rawas	28
15	Lubuk Linggau	1
16	Pali	0
Jumlah		100

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013.

Tabel 2.45 memperlihatkan persentase Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan. Persentase berturut-turut mulai dari yang terluas berada di Kabupaten Musi Rawas (28%), kabupaten Muara Enim (19%), Kabupaten Muba (14%), Kabupaten OKI (12%), Kabupaten KU Timur (7%), dan Kabupaten Banyuasin (7%).

Tabel 2.46. Produksi Karet menurut Kabupaten/Kota (Ton), Provinsi Sumatera Selatan, 2011

No.	Kabupaten/Kota	Karet
1	Banyuasin	380362
2	Ogan Komering Ilir	19618
3	Ogan Ilir	19417
4	Muara Enim	4132
5	Musi Banyuasin	1775

No.	Kabupaten/Kota	Karet
6	Lahat	1108
7	Ogan Komering Ulu	678
8	Musi Rawas	0
9	OKU Selatan	0
10	OKU Timur	0
11	Empat Lawang	0
12	Palembang	0
13	Prabumulih	0
14	Pagar Alam	0
15	Lubuk Linggau	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013. diolah

Dalam hal produksi Karet dai Provinsi Sumatera Selatan, ranking tertinggi hingga terendah disajikan dalam tabel 2.46. Kabupaten/Kota mulai dari tertinggi produksi karet adalah Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Lahat, dan Ogan Komering Ulu.

3. SDA Perekebunan Kelapa

Tabel 2.47. Produksi Kelapa menurut Kabupaten/Kota (Ton),
Provinsi Sumatera Selatan, 2011

No.	Kabupaten/Kota	Kelapa
1	Ogan Komering Ulu	0
2	Ogan Komering Ilir	0
3	Muara Enim	0
4	Lahat	0
5	Musi Rawas	0
6	Musi Banyuasin	0
7	Banyuasin	0
8	OKU Selatan	0
9	OKU Timur	0
10	Ogan Ilir	0
11	Empat Lawang	0
12	Palembang	0
13	Prabumulih	0
14	Pagar Alam	0
15	Lubuk Linggau	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013, diolah

Tabel 2.47. Menunjukkan bahwa produksi kelapa tidak tercatat di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013. Tetapi melihat potensi pantai Timur Provinsi Sumatera selatan, daerah ini dapat dikembangkan menjadi sentra industri kelapa. Pantai timur sangat cocok ditanami pohon kelapa dan kemudian industri pengolahan hasil pohon kelapa dapat dikembangkan.

Tabel 2.48. Luas Lahan Perkebunan Kelapa menurut
Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Kelapa (ha)
1	Banyuasin	47351
2	Ogan Komering Ilir	3895
3	OKU Timur	3359
4	Musi Banyuasin	3349
5	Musi Rawas	2499
6	Muara Enim	1590
7	OKU Selatan	1387
8	Ogan Komering Ulu	1111
9	Empat Lawang	748
10	Lahat	654
11	Ogan Ilir	486
12	Lubuk Linggau	221
13	Prabumulih	99
14	Pagar Alam	39
15	Palembang	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013. diolah

Tabel 2.48 menunjukkan luas lahan perkebunan kelapa menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dari yang terluas hinggg seterusnya terdapat di kabupaten/Kota Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, OKU Selatan, Ogan Komering Ulu, Empat Lawang, Lahat, Ogan Ilir, Lubuk Linggau, Prabumulih, Pagar Alam, dan Palembang.

4. SDA Kelapa Sawit

Tabel 2.49. Produksi Kelapa Sawit menurut Kabupaten/Kota (Ton),
Provinsi Sumatera Selatan, 2011

No.	Kabupaten/Kota	Kelapa Sawit
1	Musi Banyuasin	1370128
2	Muara Enim	1155203
3	Musi Rawas	1117250
4	Ogan Komering Ilir	785921
5	Banyuasin	775128
6	Lahat	536843
7	Ogan Komering Ulu	210020
8	OKU Timur	146591
9	Ogan Ilir	110500
10	OKU Selatan	0
11	Empat Lawang	0
12	Palembang	0
13	Prabumulih	0
14	Pagar Alam	0
15	Lubuk Linggau	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013. diolah

Pada tabel 2.49 diperlihatkan produksi Kelapa Sawit Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2011. Mulai dari yang terbesar berturut-turut adalah kabuaptan/ Kota Musi Banyuasin (1.370.128 ton). Muara Enim(1.155.203), Musi Rawas (1.117.250 ton), Ogan omering Ilir (785.921 ton), Banyuasin (775.128), Lahat (536.843), Ogan Komering Ulu (210.020), OKU Timur (146.591 ton) dan Ogan Ilir (110.500 ton).

5. Kerbau

Tabel 2.50. Populasi Kerbau menurut Kabupaten/Kota (ekor),
Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Kerbau
1	Musi Rawas	5068
2	Ogan Komering Ilir	5038
3	Lahat	4330
4	Muara Enim	3352
5	Ogan Ilir	1747
6	Banyuasin	1726
7	Ogan Komering Ulu	1671
8	OKU Timur	1420
9	Empat Lawang	840
10	Musi Banyuasin	560
11	OKU Selatan	265
12	Pagar Alam	148
13	Lubuk Linggau	111
14	Palembang	36
15	Prabumulih	3

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013, diolah

Tabel 2.50 menunjukkan populasi Kerbau. Semua kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan kerbau. Kerbau terbanyak ditemukan dari yang tertinggi dari Kabupaten/Kota Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, OKU Timur, Empat Lawang, Musi Banyuasin, OKU Selatan, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Palembang, dan Prabumulih.

Dilihat dari populasi kerbau, maka industri ternak kerbau dapat dilakukan pengembangannya mulai dari Kabupaten/Kota Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Banyuasin, Ogan Komering Ulu, OKU Timur.

6. Penggemukan Sapi

Tabel 2.51. Populasi Sapi menurut Kabupaten/Kota (ekor), Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Sapi
1	OKU Timur	47253
2	Banyuasin	29905
3	Musi Banyuasin	25905
4	Musi Rawas	23672
5	Ogan Komering Ilir	17407
6	Muara Enim	16017
7	Ogan Ilir	12307
8	OKU Selatan	11054
9	Lahat	10913
10	Ogan Komering Ulu	7461
11	Palembang	6579
12	Empat Lawang	4730
13	Pagar Alam	1550
14	Prabumulih	1163
15	Lubuk Linggau	894

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2013, Diolah

Sedangkan populasi Sapi ditunjukkan dari yang terbanyak pada Tabel 2.51. Urutan terbanyak Kabupaten/Kota menurut besarnya populasi sapi adalah OKU Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Ogan Ilir, OKU Selatan, Lahat, Ogan Komering Ulu, Palembang, Empat Lawang, Pagar Alam, Prabumulih dan yang terakhir Lubuk Linggau.

Industri Penggemukan sapi dapat dilakukan di pada hampir semua kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jika dilihat dari besarnya populasi sapi, maka industri penggemukan sapi dapat dimulai dari OKU Timur, Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir.

7. Kopi

Tabel 2.52. Luas Lahan Perkebunan Kopi menurut kabupaten/kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan (ha)
1	OKU Selatan	70799
2	Empat Lawang	61978
3	Lahat	51148
4	Muara Enim	23444
5	Ogan Komering Ulu	21943
6	Pagar Alam	8323
7	Musi Rawas	3935
8	Banyuasin	2632
9	OKU Timur	2318
10	Lubuk Linggau	1463
11	Ogan Komering Ilir	1115
12	Musi Banyuasin	315
13	Prabumulih	5
14	Ogan Ilir	0
15	Palembang	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Diolah

Tabel 2.52 memperlihatkan luas lahan perkebunan Kopi di Provinsi Sumatera Selatan. Perkebunan Kopi mulai dari yang terluas secara berturut-turut terdapat di Kabupaten/Kota OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Pagar Alam, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Prabumulih, Ogan Ilir dan Palembang.

Dilihat dari luas lahan perkebunan kopi, maka industri kopi dapat dilakukan dan dimulai dari kabupaten/Kota OKU Selatan, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Pagar Alam, Musi Rawas, Banyuasin, OKU Timur, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir.

8. Jagung Pakan dan Ubi Kayu

Tabel 2.53. Luas Panen, Rata-rata Produksi per Ha, dan Produksi Jagung (ton), Provinsi Sumatera Selatan, 2009-2013

Tahun	Luas Panen (ha)	Rata-rata produksi per ha	Produksi (ton)
2009	31693	35,71	113167
2010	33769	37,25	125796
2011	32965	38,13	125688
2012	28617	39,46	112917
2013	32558	51,43	167457

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Diolah

Provinsi Sumatera Selatan memproduksi jagung sebesar 113.167 ton pada tahun 2009 dan menjadi 167.457 ton pada tahun 2013. Industri jagung sebagai pakan ternak untuk menunjang industri perternakan perlu dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan (Tabel 2.53).

9. Unggas (Ayam Ras dan Buras)

Tabel 2.54 hingga Tabel 2.56 menyajikan populasi Ayam Buras, Ayam Petelur, dan Ayam Pedaging di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2013.

Tabel 2.54. Populasi Ayam Buras menurut kabupaten/Kota,
Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Ayam Buras
1	Banyuasin	1.317.408
2	Musi Rawas	949.220
3	Ogan Komering Ilir	582.830
4	Palembang	541.188
5	OKU Timur	441.284
6	Musi Banyuasin	430.731
7	Muara Enim	362.140
8	OKU Selatan	139.700
9	Ogan Ilir	102.500
10	Empat Lawang	101.188
11	Lahat	90.206
12	Pagar Alam	81.153
13	Ogan Komering Ulu	80912
14	Lubuk Linggau	41506

No.	Kabupaten/Kota	Ayam Buras
15	Prabumulih	13617

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Diolah

Tabel 2.54 menyajikan populasi Ayam Buras menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2013. Populasi Ayam Buras mulai dari yang tertinggi terdapat di Kabupaten/Kota Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ilir, Palembang, OKU Timur, Musi Banyuasin, Muara Enim, OKU Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Lubuk Linggau, dan Prabumulih.

Tabel 2.55. Populasi Ayam Petelur menurut kabupaten/Kota,
Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Ayam Petelur
1	Banyuasin	4721000
2	Muara Enim	840785
3	Prabumulih	537350
4	Palembang	377524
5	Ogan Komering Ilir	35628
6	Ogan Ilir	32000
7	Ogan Komering Ulu	14100
8	OKU Selatan	4000
9	Lahat	0
10	Musi Rawas	0
11	Musi Banyuasin	0
12	OKU Timur	0
13	Empat Lawang	0
14	Pagar Alam	0
15	Lubuk Linggau	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Diolah

Tabel 2.55 menyajikan populasi Ayam Petelur menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2013. Populasi Ayam Petelur mulai dari yang tertinggi terdapat di

Kabupaten/Kota Banyuasin, Muara Enim, Prabumulih, Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, dan OKU Selatan.

Tabel 2.56. Populasi Ayam Pedaging menurut kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Ayam Pedaging
1	Banyuasin	9203500
2	Muara Enim	6900367
3	Musi Rawas	1397200
4	Lahat	1343787
5	Ogan Ilir	578000
6	Ogan Komering Ilir	511800
7	Palembang	280944
8	OKU Timur	212094
9	Musi Banyuasin	147711
10	OKU Selatan	124000
11	Lubuk Linggau	96000
12	Prabumulih	51000
13	Ogan Komering Ulu	14629
14	Empat Lawang	0
15	Pagar Alam	0

Sumber: BPS, Sumatera Selatan dalam Angka 2014. Diolah

Tabel 2.56 menyajikan populasi Ayam Pedaging menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2013. Populasi Ayam Pedaging mulai dari yang tertinggi terdapat di Kabupaten/Kota Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Lahat, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Palembang, OKU Timur, Musi Banyuasin, OKU Selatan, Lubuk Linggau, Prabumulih, dan Ogan Komering Ulu.

10. Ikan Patin

Tabel 2.57 berisi ranking dari banyaknya rumah tangga yang terlibat dalam Perikanan Umum (*inland water*), air tawar.

Tabel 2.57. Jumlah Rumah Tangga Perikanan menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Selatan, 2013

No.	Kabupaten/Kota	Perairan Umum
1	Muara Enim	16167
2	Ogan Komering Ilir	15328
3	Ogan Ilir	6349
4	Ogan Komering Ulu	3659
5	Musi Banyuasin	3021
6	Banyuasin	3009
7	Musi Rawas	1554
8	OKU Selatan	1171
9	OKU Timur	899
10	Palembang	423
11	Lubuk Linggau	204
12	Empat Lawang	35
13	Lahat	25
14	Prabumulih	18
15	Pagar Alam	0

Terlihat bahwa urutan keluarga yang bekerja atau terlibat dalam kelompok perikanan dalam bidang perikanan umum dari yang terbanyak dimulai dari Kabupaten/Kota Muara Enim, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Banyuasin, Musi Rawas, OKU Selatan, OKU Timur, Palembang, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Lahat, dan Prabumulih.

Budidaya/industri ikan patin dapat dikembangkan mulai dari Kabupaten/Kota dengan banyaknya keluarga yang terlibat dalam industri/ekonomi budidaya perairan umum.

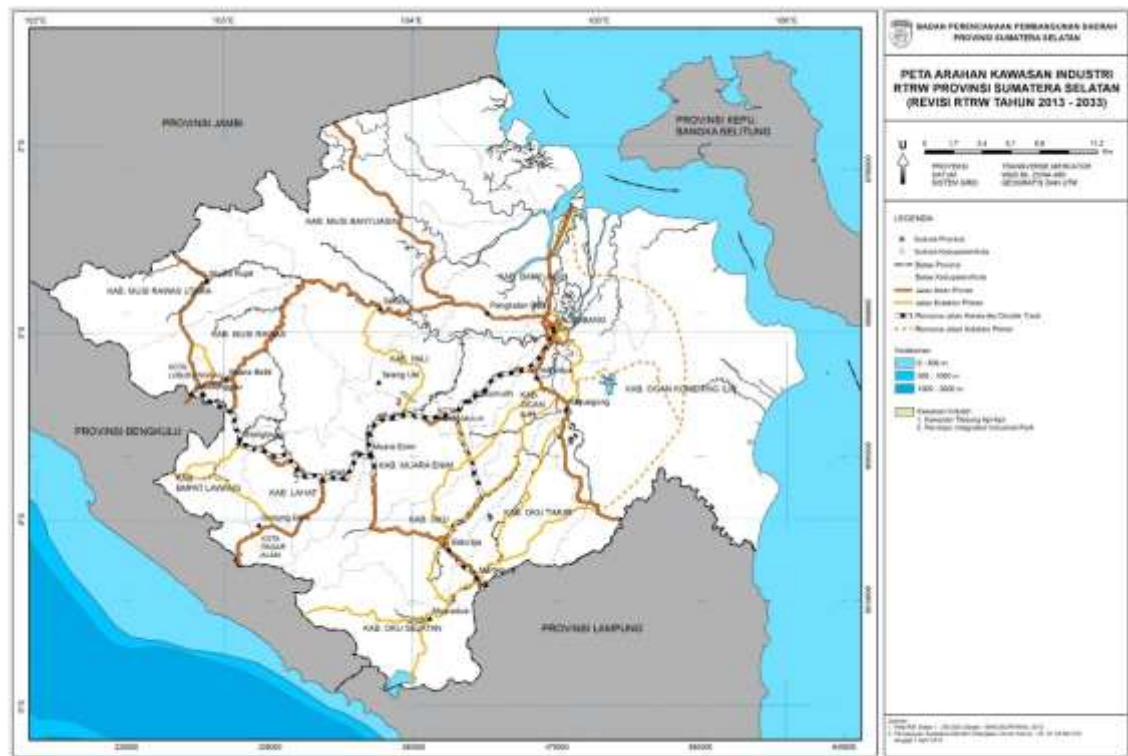
2.3.3. Unsur Penunjang

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/pengelolaan lingkungan. kawasan industri. lahan untuk industri. dan infrastruktur penunjang (lembaga uji. kawasan berikat. kawasan pergudangan). Perkembangan sarana dan prasarana industri di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

A. Kawasan Industri

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai (direncanakan) mempunyai 9 Kawasan Industri (Tabel 2.58). Kesembilan Kawasan Industri tersebut terdapat di Kabupaten/Kota Banyuasin, Muara Enim, Palembang, Lubuk Linggau dan Pali.

Kawasan Industri tersebut adalah Kawasan Tanjung Api-api, Kawasan Gasing dan Pangkalan Benteng, Desa Talang-taling, Gunung Megang, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Karya Jaya, Lubuk Linggau Selatan I, dan Pendopo. Gambar 2.30 memperlihatkan lokasi kesembilan Kawasan Industri tersebut.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

Gambar 2.30. Peta Lokasi Usulan Kawasan Industri Di Sumatera Selatan

Tabel 2.58. Lokasi Usulan Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sumatera Selatan

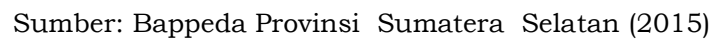
No.	Kabupaten/Kota	Banyak Lokasi	Kecamatan	Kawasan Industri
1	Banyuasin	2	Banyuasin II	Kawasan Tanjung Api-api
				Kawasan Gasing dan Pangkalan Benteng
2	Muara Enim	2	Gelumbang	Desa Talang-taling
			Gunung Megang	Gunung Megang

No.	Kabupaten/Kota	Banyak Lokasi	Kecamatan	Kawasan Industri
3	Palembang	3	Gandus	Kecamatan Gandus
			Sukarame	Kecamatan Sukarame
			Kertapati	Kelurahan Karya Jaya
4	Lubuk Linggau	1	Lubuk Linggau Selatan I	Lubuk Linggau Selatan I
5	Pali	1	Talang Ubi	Pendopo
	Jumlah	9		

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2014

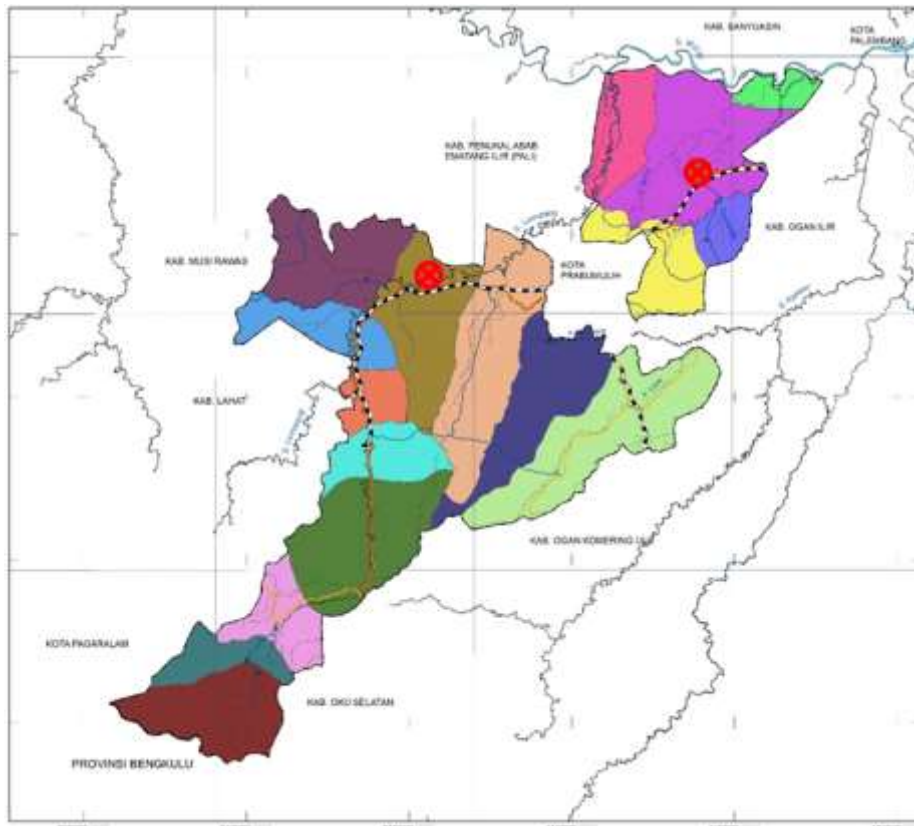
Kawasan Industri di Kabupaten Banyuasin

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kawasan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuasin diarahkan sebagai pusat pertumbuhan regional yang meliputi Provinsi Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung dengan ditopang pelabuhan Tanjung Api-Api/ Tanjung Carat sebagai Pelabuhan Internasional dan Pusat Distribusi Regional.



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2011 telah mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin dan ditingkatkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yaitu KEK Tanjung Api-Api seluas ± 2.030 Ha melalui PP Nomor 51 Tahun 2014.

Kawasan Industri di Kabupaten Muara Enim

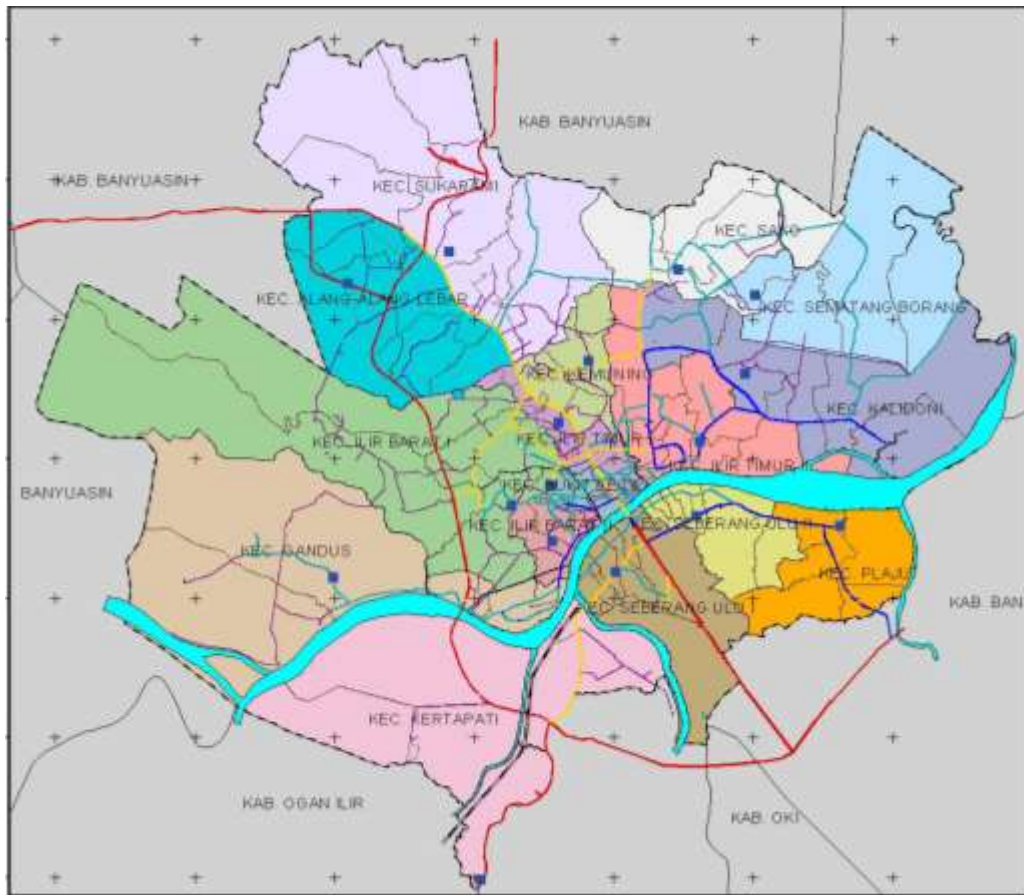


Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

Gambar 2.32. Kawasan Industri Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan

Arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 – 2032 terletak di Kecamatan Gelumbang dan Gunung Megang.

Kawasan Industri di Kota Palembang

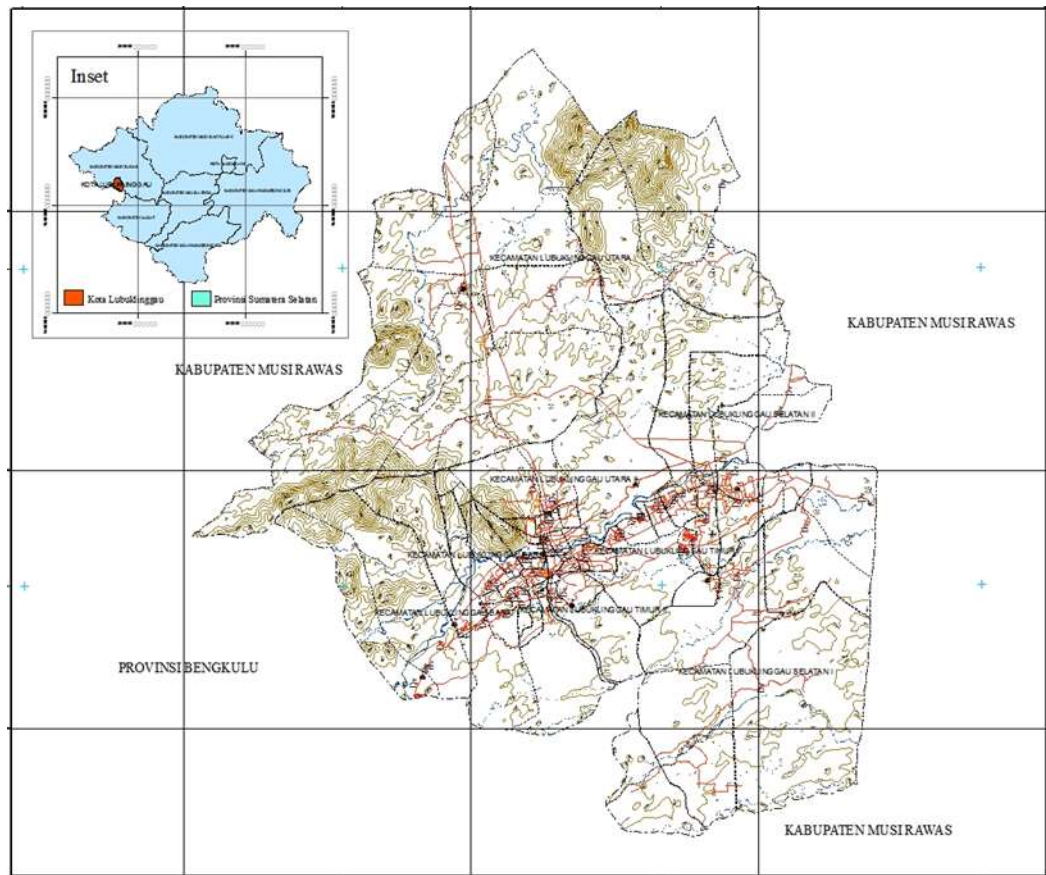


Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

Gambar 2.33. Kawasan Industri di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palembang Tahun 2012 – 2032. Kota Palembang menetapkan 3 (tiga) lokasi sebagai kawasan industri. yaitu : Sungai Lais, Keramasan – Karyajaya dan Kertapati.

Kawasan Industri di Kota Lubuk Linggau



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

**Gambar 2.34. Kawasan Industri Industri di Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan**

Kota Lubuklinggau melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 menetapkan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebagai kawasan industri berskala kecil dan menengah dengan fokus pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

Kawasan Industri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

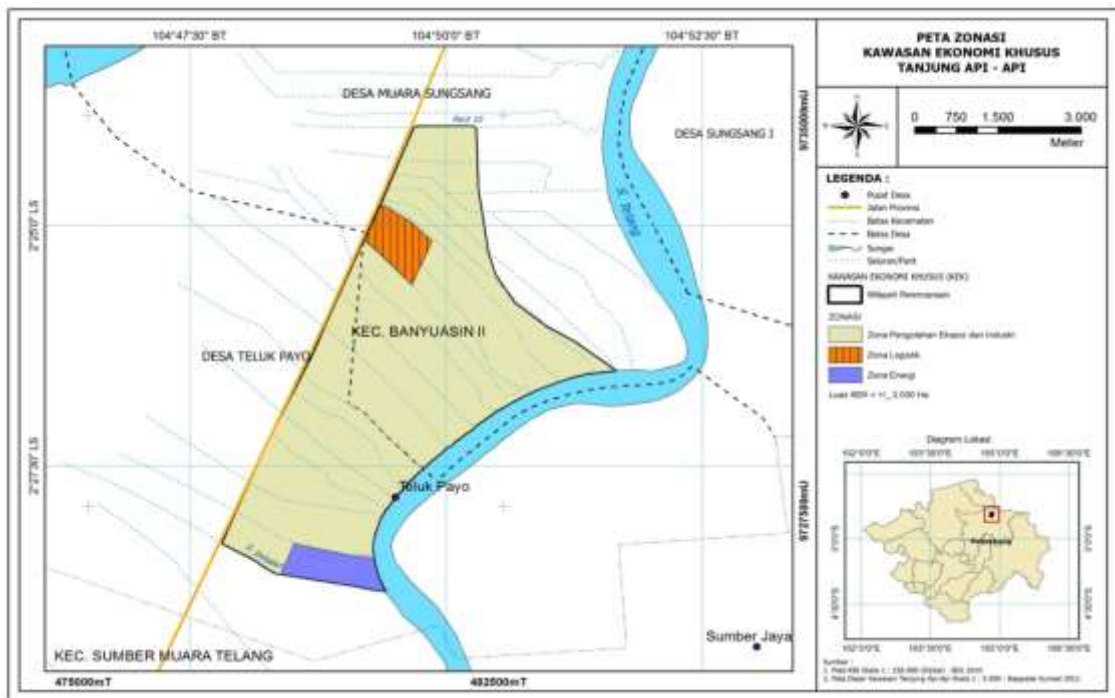


Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

Gambar 2.35. Kawasan Industri di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan

Arahan lokasi kawasan industri di Kabupaten PALI berdasarkan revisi RTRWP Sumatera Selatan terletak di Kecamatan Talang Ubi dengan nama Pendopo Integrated Industrial Park (PIIP) dengan fokus pada hilirisasi batubara menjadi energi dan gas.

B. Zona Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (2015)

Gambar 2.36. Zona KEK Tanjung Api-api Provinsi Sumatera Selatan

Dalam KEK Tanjung Api-Api telah ditetapkan zonasi pengembangannya, antara lain : Zonasi Pengolahan Ekspor dan Industri. Zonasi Logistik dan Zonasi Energi. Perkembangan perekonomian nasional pada masa ini masih bertumpu pada sektor permintaan dibandingkan dengan sektor penawaran barang dan jasa nasional. Sebesar 60.62% pada tahun 2008 menjadi 55% pada tahun 2014 (BPS) ditopang melalui sektor konsumsi. Tingkat konsumsi penduduk yang besar masih menjadi andalan dalam mendorong perekonomian nasional.

Dalam jangka panjang, kondisi ekonomi yang bertumpu pada permintaan akan meningkatkan jumlah impor. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi produksi dan produktivitas dalam negeri. Implikasi dari hal ini perekonomian tidak akan berjalan dengan baik dan beban negara akan semakin berat, karena akan terpaksa

menyediakan kebutuhan penduduk yang berasal dari luar negeri. Dengan mengkonsumsi produk luar negeri, berarti devisa Indonesia akan mengalir ke luar negeri dan hal ini merugikan perekonomian Indonesia. Industri yang baik harus merupakan industri yang mempunyai nilai tambah (value added) yang besar bagi Indonesia. Nilai tambah akan didapat jika industri Indonesia memproduksi barang yang sudah jadi untuk dikonsumsi. Indonesia harus membangun industri yang menghasilkan barang akhir agar nilai tambah sebesar-besarnya dapat dinikmati.

Dengan sumber daya ekonomi utama dari sektor pertanian dan pengolahan Indonesia. Indonesia perlu membenahi industrinya dengan memperhatikan potensi dan keunggulan daerah ke arah hilirisasi Industri. Hilirisasi industri merupakan konsep dimana nilai tambah sebesar-besarnya akan dinikmati oleh Indonesia. Hilirisasi bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri dimana negara tidak lagi menjual barang mentah dan atau setengah jadi tetapi menjual barang yang telah jadi. Barang yang dijual baik ke luar negeri maupun dikonsumsi di dalam negeri akan mendatangkan nilai tambah bagi daerah dimana industri itu dibangun. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan insentif dan fasilitas untuk mewujudkannya dengan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang diarahkan di Tanjung Api Api yang terletak pada Kabupaten Banyu Asin. Upaya pengembangan hilirisasi akan lebih mudah diwujudkan dukungan bahan baku baik bahan mentah dan bahan setengah jadi untuk kawasan Ekonomi Khusus akan dapat tersedia dengan mudah karena dukungan bahan baku yang sangat melimpah di Provinsi

Sumatera Selatan. Hal ini akan memberikan nilai tambah yang cukup besar pada komoditas yang dimiliki oleh daerah.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi pertanian. Perkebunan, pertambangan, perikanan, dan kehutanan yang sangat besar. Namun demikian, untuk memberikan nilai tambah yang besar bagi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka produk-produk unggulan tersebut akan lebih baik tidak diekspor dalam bentuk bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Untuk itulah pengembangan hilirisasi produk unggulan menjadi sesuatu yang sangat strategis bagi peningkatan nilai tambah produk unggulan tersebut.

Pengembangan hilirisasi produk unggulan yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan, tentunya harus dilakukan secara tepat dan terarah. Untuk itu, perlu disusun suatu roadmap pengembangan hilirisasi produk unggulan Provinsi Sumatera Selatan. Penyelenggaraan industri hilir yang didukung oleh sumberdaya alam sebagai pasukan utama akan memberikan manfaat bagi sektor hulu, tengah dan hilir. Pengembangan daerah sebagai satu kesatuan wilayah memiliki peluang yang sangat besar untuk diwujudkan dengan pembangunan industri hilir yang berbahan baku lokal dan unggul.

C. Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan

Tabel 2.59. Tempat Pengolahan Sampah, Provinsi Sumatera Selatan, 2012

No.	Kabupaten/Kota	Nama TPA
1	Ogan Komering Ulu	TPA Gn. Meraksa
2	Ogan Komering Ilir	TPA Kayu Agung
3	Muara Enim	TPA Bukit Kancil
4	Lahat	TPA Sukarami

No.	Kabupaten/Kota	Nama TPA
5	Musi Rawas	TPA
6	Musi Banyuasin	TPA Teladan
7	Banyuasin	
8	Ogan Komering Ulu Selatan	TPA Desa Bendi
9	Ogan Komering Ulu Timur	TPA
10	Ogan Ilir	TPA Palem Jaya
		TPA Tanjung Raja
11	Empat Lawang	
12	Penukal Abab Lematang Ilir	
13	Musi Rawas Utara	
14	Kota Palembang	TPA I Sukawinatan
		TPA II Karya Jaya
15	Kota Prabumulih	TPA Sungai Menang
16	Kota Pagar Alam	TPA Kota Pagar Alam
17	Kota Lubuklinggau	TPA Lubuklinggau
	Jumlah	15

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Selatan 2012.

Tabel 2.59 memperlihatkan Pembangunan TPA di Provinsi Sumatera Selatan. TPA akan dibangun sebanyak 15 unit yang tersebar pada beberapa Kabupaten/ Kota. Belum semua Kabupaten/Kota merencanakan TPA pada tahun 2012. Hal ini terjadi karena pemekaran Kabupaten/Kota yang dilakukan setelah tahun 2012.

Tabel 2.60. Rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampat Terpadu
Provinsi Sumatera Selatan, 2013-2014

No	Kabupaten/Kota	Rencana Pemangunan TPST (unit)								Jumlah
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ogan Komering Ulu		1	1	1	2	1	2	1	9
2	Ogan Komering Ilir		1	1	1	1	1	2	1	8
3	Muara Enim		2	2	2	1	2	1	1	11
4	Lahat		1	1	1	1	1	2	2	9
5	Musi Rawas		1	1	1	1	1	1	1	7
6	Musi Banyuasin		1	1	1	2	2	2	2	11
7	Banyuasin		1	1	1	2	2	1	1	9
8	Ogan Komering Ulu Selatan		1	1	1	1	1			5
9	Ogan Komering Ulu Timur		1	2	1	1	1	1	2	9
10	Ogan Ilir		1		1				1	3
11	Empat Lawang	1	1	1	1	1	1	1	1	8
12	Penukal Abab Lematang Ilir									-
13	Musi Rawas Utara									
14	Kota Palembang	1	2	2	1	1		1		8
15	Kota Prabumulih	1	2		1		1		1	6
16	Kota Pagar Alam	1	1	1	1					4
17	Kota Lubuklinggau	1	1	1	1					4
Tambahan di TPST		5	18	16	16	14	14	14	14	111

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sumatera Selatan. 2012.

Tabel 2.60 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan (direncanakan) pembangunan TPA Terpadu sebanyak 111 unit. Seluruh TPA ini direncanakan pembangunannya pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM Unit Pelayanan Teknis (UPT) peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Perkembangan pemberdayaan IKM di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.61. Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera selatan. 2014

No.	Kabupaten	Kecamatan	Produk
1	Ogan Komering Ulu	Lubuk Batang	Sentra Batu Akik
2	Muara Tara	Muara Rupit	Sentra Batu Akik
3	Banyuasin	Banyuasin I	Kerupuk udang.
			Pempek bahan dasar udang
4	Kota Palembang	Sebrang Ulu I	Songket
		Ilir Barat II	songket
5	Ogan Ilir	Indralaya Timur	Songket
6	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	Kerupuk Kemplang
			Pempek
7	Musi Banyu Asin	Lowong Wetan	Getah Gambir
8	Lubuk Linggau	Lubuk Linggau Barat	Kerupuk
			Kue Kering
			Pandai Besi
9	Ogan Ilir	Tanjung Batu	Pandai Besi
			Pandai Emas
			Alat dapur dari aluminium
10	Ogan Ilir	Payaraman	Bordir
			Baju Muslim
11	Ogan Ilir	Tanjung Batu (desa	Ruman Knock down
12	Ogan Ilir	Tanjung Pinang (desa	Pandai Besi Modern
13	OKU Timur	Belitang	Alat Mesin Ringan
			Makanan ringan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Provinsi Sumatera Selatan. 2014

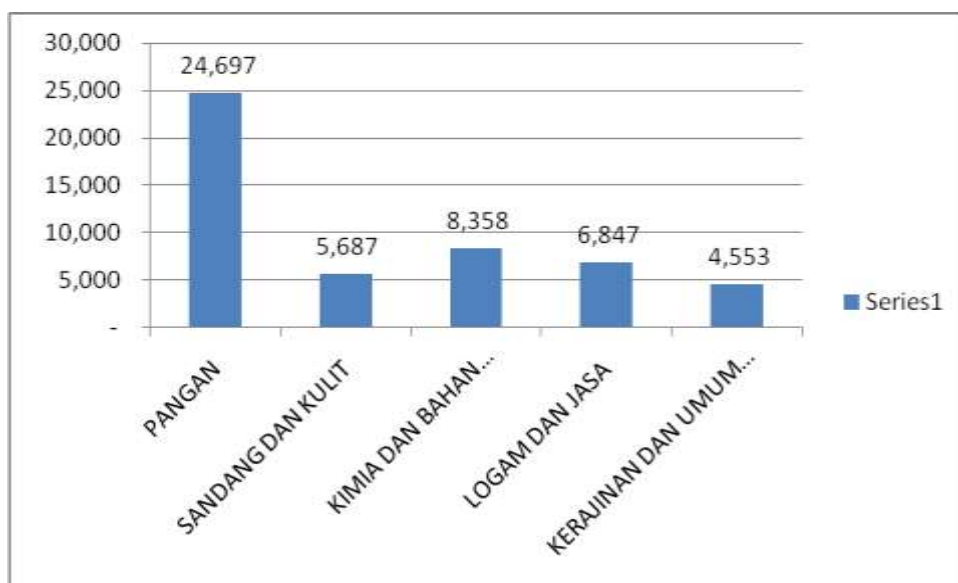
Tabel 2.61 menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 14 Sentra Industri Kecil dan Menengah. Sentra IKM tersebar pada 13 Kabupaten/Kota dengan berbagai produk.

Tabel 2.62. IKM di Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Jumlah IKM	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp. 000)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Nilai Bb/Bp (Rp. 000)
9863	23,769	387,882,621	28,364,540	20,522,714

Sumber: Kementerian Perindustrian, 2015

Tabel 2.62 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 di Provinsi Sumatera Selatan terdapat sebanyak 9863 IKM.



Sumber: Rekapitulasi Industri. Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Gambar 2.37. Jumlah Industril Kecil dan Menengah Formal dan Non-Formal, Menurut Lapangan Usaha, Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Sentra IKM di Provinsi Sumatera Selatan (2014) lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang Pangan (24.697 unit usaha). Kimia dan Bahan Bangunan (KKB) (8.358 Unit Usaha). Logam dan Jasa (6.847 Unit Usaha).

2.6. POTENSI DAN PERMASALAHAN UMUM PEMBANGUNAN INDUSTRI

2.6.1. Identifikasi Potensi Umum Dalam Pembangunan Industri Provinsi

Pembangunan Industri di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi yang sangat baik. Sumatera Selatan mempunyai lahan industri yang memadai dan SDM yang menunjang dan mendukung untuk pembangunan industri.

2.6.2. Identifikasi Permasalahan Umum Dalam Pengembangan Industri Provinsi

Permasalahan pembanguna industry di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibagi atas sektor unggulan yang dihasilkan dalam kegiatan ini.

Permasalahan umum adalah letak geografis yang tidak dilewati proyek tol laut yang merupakan program nasional yang diamanatkan oleh visi presiden pada saat ini.

Permasalahan dalam pengembangan industri karet :

- Kebutuhan ekspor Crumb Rubber dan RSS yang cukup besar, yang tidak linier dengan kebutuhan bahan baku untuk industri lokal, yang menyebabkan industri-industri lokal yang berbahan baku produk karet sering mengalami kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

- Masih terbatasnya ketersediaan bahan baku pelengkap (atau penolong) yang menyebabkan tingginya biaya produksi dan keterbatasan jumlah produksi.
- Daya saing produk industri karet lokal secara kualitas dan harga yang dihasilkan pengusaha lokal masih rendah karena belum efisiennya biaya produksi dan terbatasnya ketersediaan bahan baku akibat ekspor bahan mentah serta keterbatasan bahan penolong/pelengkap dalam produksi.
- Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang memiliki skill dan kemauan dalam mengelola industri hilir karet yang mayoritas memang masih diproduksi dalam bentuk produk akhir crumb rubber dan RSS.

Permasalahan dalam pengembangan industri kopi :

- Masih rendahnya penguasaan teknologi industri hilir kopi dan penguasaan teknologi pascapanen sehingga mutu rendah, dan meskipun sudah banyak mutu yang bagus namun cenderung belum konsisten.
- Pemasaran hasil industri hilir kopi belum berlangsung dengan baik, dimana mayoritas produk kopi yang dijual untuk pasar dalam negeri dari Sumsel masih berupa produk biji.
- Masih rendahnya tingkat konsumsi kopi masyarakat dalam negeri, diakibatkan masih minimnya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan cara minum kopi yang benar. Rendahnya konsumsi kopi tersebut berimbas pada rendahnya permintaan produk kopi pada pasar kopi dalam negeri.
- Masih lemahnya kelembagaan petani/pelaku pemasaran kopi, sehingga pelaku-pelaku pemasaran kopi dalam negeri cenderung melakukan aktifitasnya secara individu. Kondisi ini

mengakibatkan posisi tawar mereka masih cenderung rendah dan sulit untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

Permasalahan dalam pengembangan industri pakan :

- Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan baku maupun bahan campuran dari luar (impor) sehingga biaya produksi industri pakan masih tinggi.
- Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM lokal dalam mengelola bahan baku lokal khususnya jagung, ubi kayu, kedelai dan limbah sawit untuk dibuat pakan yang berkualitas.
- Masih kurangnya penelitian-penelitian tentang pakan yang berkualitas.
- Masih rendahnya adopsi teknologi pengolah pakan yang berkualitas.

BAB 3

VISI, MISI, STRATEGI DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Dalam RPJM Provinsi

Gambar 3.1. memperlihatkan thema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, 2014-2018. Diperlihatkan bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2018, thema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berturut-turut adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis, Percepatan dan Perluasan Hilirisasi Industri dan Pengembangan Pariwisata Berstandar Internasional, dan Sumatera Selatan Sejahteram Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional.



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2014

Gambar 3.1. Thema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan,
tahun 2014-2018

Gambar 3.2. Berikut menunjukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejak tahun 2003 hingga 2023..



Gambar 3.2. RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, 2003 – 2023

Dalam RPJMD 2013-2018 dikatakan bahwa Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pembangunan menyeluruh di semua bidang. Peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, Infrastruktur wilayah, Iptek, dan suasana wilayah yang kondusif. Sedangkan RPJMD 2018-2023 mengamanatkan Pemantapan Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul dan terdepan berbasis keunggulan kompetitif.

3.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang bercirikan:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;

4. menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. melakukan pembangunan industri hijau;
9. melakukan pembangunan industri strategis;
10. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
dan
11. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

3.1.3. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan

3.1.3.1. Visi

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka Visi Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan.

“ Industri Sumatera Selatan Sejahtera merupakan Motor Pembangunan, Iklusif, Kompetitif, Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta berdaya saing internasional “.

3.1.3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menjadikan Sumatera Selatan sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi regional.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan.
- c. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas.
- d. Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan.

3.1.3.3. Strategi Pembangunan Industri Provinsi

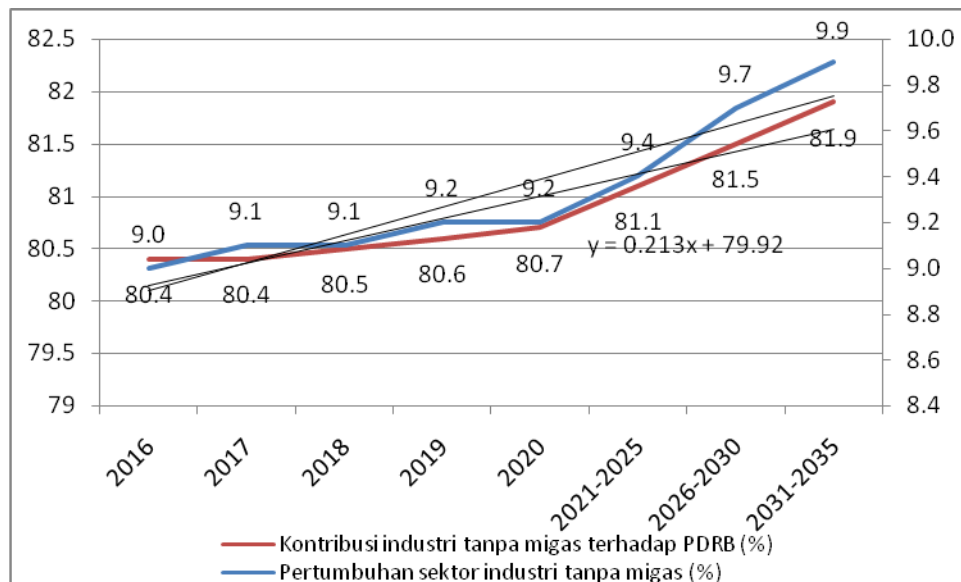
Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan.

1. Mengembangkan pertanian yang unggul dan berdaya saing
2. Mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian
3. Mengembangkan pariwisata
4. Mengembangkan pengelolaan pertambangan yang partisipatif dan berkelanjutan
5. Mengembangkan perusahaan daerah
6. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
7. Mengembangkan kerjasama ekonomi dan keterkaitan antarwilayah
8. Meningkatkan jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah

9. Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem

3.2. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sasaran pembangunan industri Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3. Proyeksi Kontribusi Industri tanpa Migas terhadap PDRB dan Pertumbuhan sektor Industri Tanpa Migas, Provinsi Sumatera Selatan, 2016-2015 – 2023

Gambar 3.3. memperlihatkan trend (sasaran) kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%) dan Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%) Provinsi Sumatera Selatan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan periode 2021-2025, periode 2026-2030, dan periode 2031-2035. Metode ini dibuat

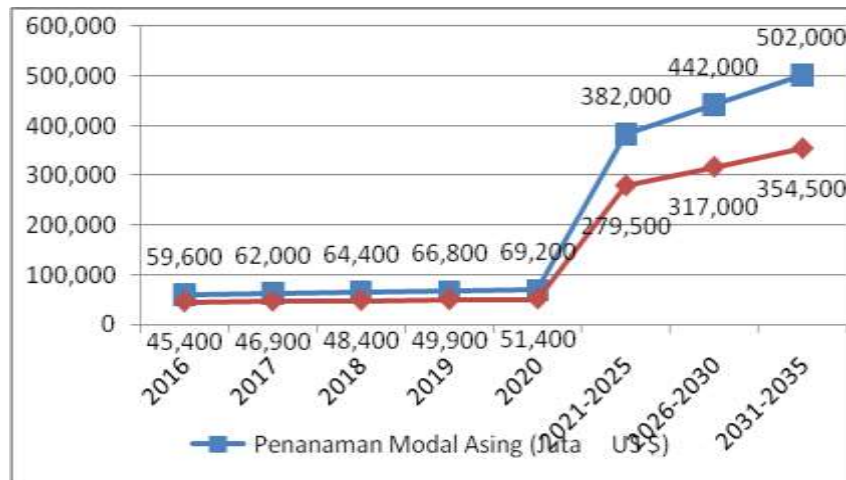
dengan tren linier, sesuai dengan data masa lalu (backward linkage) dari variabel yang diamati.

Gambar 3.4. memperlihatkan trend (sasaran) Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas (orang) dan Nilai Ekspor Industri Tanpa Migas (juta US \$), Provinsi Sumatera Selatan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan periode 2021-2025, periode 2020-2030, dan periode 2031-2035.



Gambar 3.4. Proyeksi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri Tanpa Migas dan Nilai Ekspor Industri Tanpa Migas, Provinsi Sumatera Selatan, 2016– 2023

Pada Gambar 3.5. ditunjukkan trend (sasaran)Proyeksi Penanaman Modal Asing dan Penanamam Modal Dalam Negeri, Provinsi Provinsi Sumatera Selatan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan periode 2021-2025, periode 2020-2030, dan periode 2031-2035.



Gambar 3.5. Proyeksi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Provinsi Sumatera Selatan, 2016– 2035



Gambar 3.6. Proyeksi Penambahan Populasi Industri Skala Besar yang Diciptakan, Provinsi Sumatera Selatan, 2016– 2035

Pada Gambar 3.5. ditunjukkan trend (sasaran) Proyeksi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, Provinsi Sumatera Selatan 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kemudian dilanjutkan dengan periode 2021-2025, periode 2026-2030, dan periode 2031-2035.

Pada tabel 3.1 disajikan rekapitulasi sasaran pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan 2016-2035. Metode perhitungan sasaran dibuat dengan metode *forecasting (tend)* linier.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2035

No.	Sasaran	Tahun					Periode		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	2031-2035
1	Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%)	9,0	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
2	Kontribusi industri tanpa migas terhadap PDRB (%)	80,4	80,4	80,5	80,6	80,7	81,1	81,5	81,9
3	Nilai ekspor produk industri tanpa migas (Juta US\$)	2.413,7	2.547,0	2.680,3	2.813,6	2.946,9	16.734,2	20.066,7	23.399,2
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang)	305.942	317.519	329.096	340.673	352.250	410.135	468.020	525.905
5	Nilai Investasi sektor industri tanpa migas (juta US \$)	2.414	2.547	2.680	2.814	2.947	16.734	20.067	23.399
	a. Penanaman Modal Asing (Juta US \$)	59.600	62.000	64.400	66.800	69.200	382.000	442.000	502.000
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Milyar)	45.400	46.900	48.400	49.900	51.400	279.500	317.000	354.500
6	Penambahan populasi industri skala besar yang diciptakan di Provinsi/Kabupaten/Kota (unit usaha)*	23	28	30	35	150	250	350	235

(*) Proyeksi dibuat dengan menggunakan data Industri Menengah dan besar di Provinsi Sumatera Selatan, 2006-2014

BAB 4

PROGRAM DAN RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

4.1. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 10 dan 11, mengamanatkan bahwa setiap gubernur dan bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIP dan RPIK mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2015 - 2019. RPIP disusun dengan paling sedikit memperhatikan: (a). potensi sumber daya Industri daerah; (b). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan (c). keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Sedangkan RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan: (a). potensi sumber daya industri daerah; (b). Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan (c). keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

RPIP ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan RPIK ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Rencana Pembangunan Industri Provinsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rancangan RPIP disusun oleh gubernur mengacu kepada RIPIN 2015-2035 dan KIN 2015-2019 serta memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan
2. Dalam penyusunan rancangan RPIP, gubernur dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang industri.
3. Rancangan RPIP disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri;
4. Menteri Dalam Negeri menelaah keselarasan antara Rancangan RPIP dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri menelaah keselarasan antara RPIP dengan RIPIN 2015 – 2035 dan KIN.
6. Persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri terhadap rancangan RPIP disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya bersama persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan RPIP disampaikan kepada Gubernur untuk

dibahas dan ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan.

7. Peraturan Daerah tentang RPIP disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Provinsi Aceh dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri. Program-program tersebut didukung dengan rencana aksi pada industri unggulan provinsi.

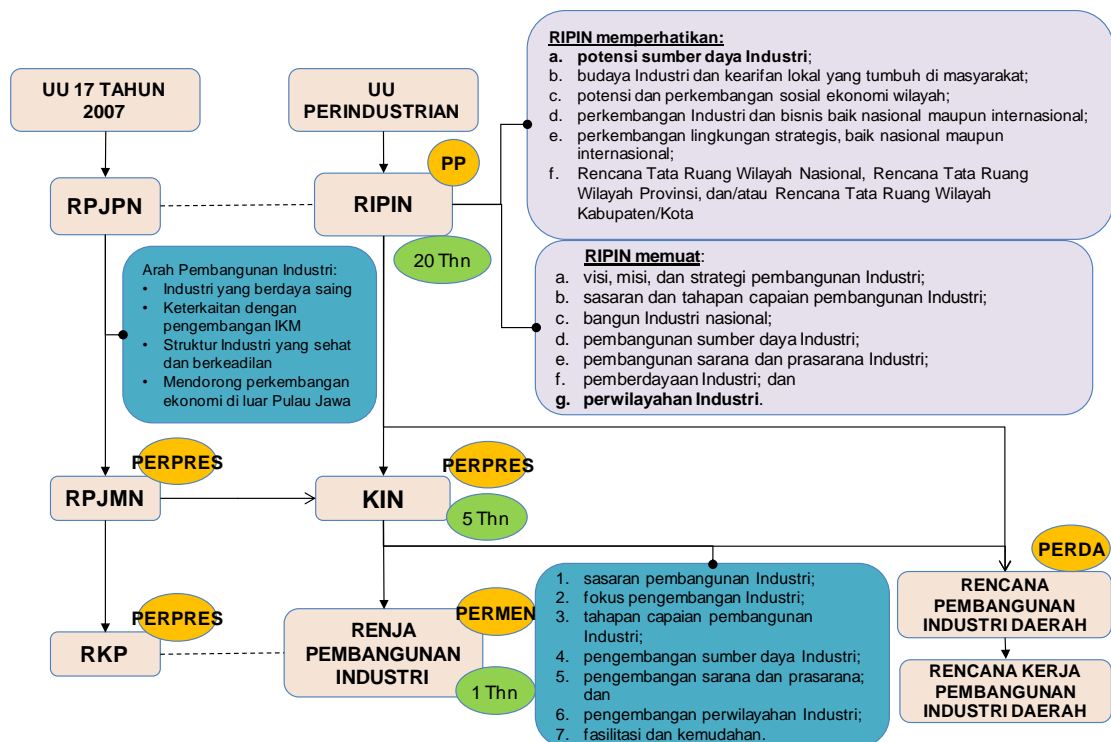
4.1.1. Pengembangan Perwilayahan Industri

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP atau RPIDA Provinsi) sebagaimana juga RPIDA Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIDA ini sebagaimana RIPIN disusun sebagai pedoman dengan memperhatikan: potensi sumberdaya industri daerah, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan rencana tata ruang wilayah provinsi juga rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

RIPIN memuat diantaranya visi, misi, sasaran pembangunan industri, bangun industri nasional hingga perwilayahan industri. Sedangkan KIN dan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Industri memuat diantaranya tahapan sasaran dan fokus

pengembangan industri, capaian pembangunan industri dan program-program yang tertuang pada rencana kerja. Selanjutnya RPIDA, yang memuat diantaranya visi, misi dan sasaran pembangunan daerah, hingga program-program pembangunan industri daerah untuk beberapa komoditas-industri pilihan daerah yang sudah sesuai dengan potensi sumberdaya industri daerah.

Seperti halnya RIPIN dan KIN yang harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM) nasional, RPIDA juga harus sesuai dengan RPJP dan RPJM daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Provinsi ini ditetapkan dengan PERDA.



Sumber : Dirjen Pengembangan perwilayahan industri, 2014

Gambar 4.1. Gambaran Rencana Induk Pembangunan Industri, RIPIN, KIN dan RPIDA

Pembangunan industri ini dilakukan dengan pendekatan pada upaya untuk menghasilkan produk-produk industri bernilai tambah dan berdaya saing dari sumberdaya keunggulan daerah yang berpeluang besar masuk ke dalam pasar dan mekanisme pasar serta persaingan yang terjadi di dalamnya. Dalam upaya untuk menghasilkan produk-produk industri bernilai tambah dan berdaya saing ini, tentu diperlukan berbagai analisis, khususnya terkait kondisi eksisting industri daerah (Kapabilitas Daerah) dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya/pembangunan industri itu sendiri. Dari analisis itu akan didapatkan 'gap' kompetensi. Gap inilah salah satu yang menjadi bagian dari acuan dalam menyusun strategi hingga program-program dalam RPIDA ini. Program-program yang disusun dalam Rencana Pembangunan Industri pada dasarnya adalah upaya-upaya khusus untuk mengeliminasi gap ini sehingga sampai pada kemampuan daya saing tadi.

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forward* sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri.

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah Suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu yang akan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) bagi pengembangan wilayah tersebut serta membawa peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi pada wilayah lain di sekitarnya dalam suatu wilayah regional atau provinsi dengan batas-batas yang jelas. Adapun kriteria WPPI :

- Potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas)
- Kelengkapan sistem logistik dan transportasi

- Kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa
- Penguatan dan pendalaman rantai nilai
- Kualitas dan kuantitas SDM
- Memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air)
- Memiliki potensi sumber daya air industri
- Memiliki potensi dalam pewujudan industri hijau
- Kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi

Industri penggerak utama untuk setiap WPPI dan industri lainnya haruslah dibangun dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Pengembangan KPI dilakukan dengan mengacu pada RTRW masing-masing kabupaten/kota. KPI adalah tempat berlokasinya kawasan industri dan industri-industri di daerah yang tidak memiliki kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam WPPI dan tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, pengembangan industrinya dapat dilakukan sepanjang berada di dalam KPI.

Pembangunan kawasan industri akan diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Dalam rangka percepatan penyebaran industri keluar Pulau Jawa, pemerintah membangun kawasan-kawasan industri sebagai infrastruktur industri di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan

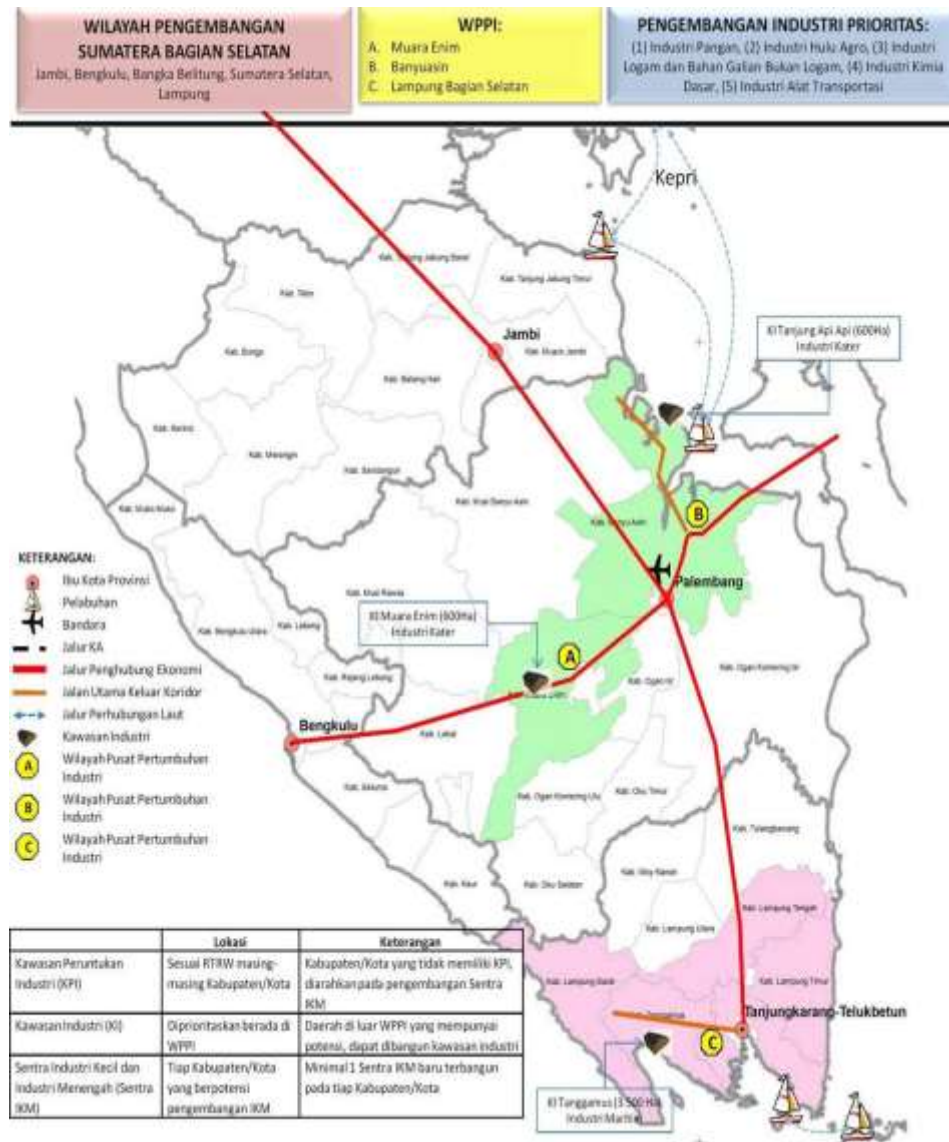
kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

RIPIN 2015 – 2035 telah menetapkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Sumatera Selatan di daerah Muara Enim dan Banyuasin. Selanjutnya RIPIN 2015-235 menetapkan industri prioritas nasional di Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- a. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara
- b. Industri Hulu Agro
- c. Industri Pangan

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).



Sumber: Lampiran RIPIN

Gambar 4.2. Perwilayahan Industri pada WPI Sumatera Bagian Selatan

Tabel 4.1. Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016 - 2035

No.	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
A	Pengembangan WPPI								
1	Penyusunan daerah yang masuk dalam WPPI pada RUTR Provinsi Sumatera Selatan	V							
2	Penyusunan Road Map Pengembangan industri di Kabupaten/Kota dalam WPPI	V	V						
3	Pengembangan Forum antar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya masuk dalam WPPI	V	V	V					
4	Penyederhanaan proses perizinan di daerah yang masuk dalam WPPI		V	V	V				
5	Pengembangan Sistem Pelayanan Satu Atap di daerah yang masuk dalam WPPI		V	V	V	V			
6	Pemberian insentif bagi investasi bidang industri yang masuk dalam WPPI			V	V	V	V	V	V
7	Promosi investasi industri berbasis masyarakat untuk masuk dalam WPPI			V	V	V	V	V	V
8	Penguatan konektivitas di Kabupaten/Kota antar WPPI			V	V	V	V	V	V

No.	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
9	Pengembangan Sekolah Menengah Keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga trampil di daerah yang masuk dalam WPPI			V	V	V	V	V	V
10	Pembangunan <i>data base</i> industri yang masuk dalam WPPI			V	V	V			
11	Revitalisasi sarana dan prasarana pendukung industri yang masuk dalam WPPI			V	V	V	V	V	V
12	Optimalisasi sistem <i>suply chain</i> hasil produksi di daerah yang masuk dalam WPPI			V	V	V	V	V	V
B	Pengembangan KPI								
1	Fasilitasi penyusunan RUTR kawasan peruntukan industri/KPI	V	V						
2	Fasilitasi penyusunan rencana penyediaan energi di kabupaten/kota untuk mendukung kawasan peruntukan industri/KPI		V	V	V				
3	Fasilitasi penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi tepat guna di tiap kabupaten/kota untuk mendukung kawasan peruntukan industri/KPI		V	V	V	V	V	V	V
4	Fasilitasi penyusunan pelayanan satu atap di kawasan		V	V	V	V			

No.	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	peruntukan industri/KPI								
5	Fasilitasi perumusan pemberian insentif dalam mendukung kawasan peruntukan industri/KPI			V	V	V	V	V	V
C	Pembangunan KI								
1	Penyusunan rencana induk pembangunan kawasan industri Banyuasin - Muara Enim	V	V						
2	Penyusunan rencana tata guna lahan dan pengembangannya di sekitar kawasan industri	V	V	V					
3	Pengoperasian bank tanah (<i>Land Bank</i>) untuk pembangunan kawasan industri		V	V	V				
4	Revitalisasi infrastruktur pengolahan limbah untuk mendukung kawasan industri			V	V	V	V	V	V
5	Revitalisasi infrastruktur energi dan telekomunikasi untuk mendukung kawasan industri			V	V	V	V	V	V
6	Revitalisasi sarana dan prasarana pengembangan SDM			V	V	V	V	V	V
7	Revitalisasi sarana dan prasarana pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi (RISTEKIN)			V	V	V	V	V	V
8	Revitalisasi kawasan industri yang sudah beroperasi			V	V	V	V	V	V

No.	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
9	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri			V	V	V			
D	Pengembangan Sentra IKM								
1	Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM	V							
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	V							
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota	V	V						
4	Pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pembangunan sentra IKM		V	V					
5	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM		V	V	V				
6	Pembangunan Sentra IKM Kopi berbasis masyarakat			V	V				
7	Pembangunan Sentra IKM pupuk organik dan dari limbah sawit di kelompok tani (KUD)			V	V	V	V	V	V
8	Pembangunan Sentra IKM listrik dari limbah sawit pada skala IKM			V	V	V	V	V	V
9	Pembangunan Sentra IKM pengalengan ikan di kelompok nelayan (Mina Bahari)			V	V	V	V	V	V
10	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM di Kabupaten/Kota				V	V	V	V	V

4.1.2. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan. penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

4.1.2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Tabel 4.2. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2016
– 2020; 2021-2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Membangun SMK Industri	V	V						
	Peningkatan peranan Litbang dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu produk.	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Pelatihan kemampuan SDM dibidang oleokimia, bio teknologi dan biomassa			V	V	V	V	V	V
3	Pelatihan Sumber Daya Manusia Bidang pertanian dan mekanikal	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Peningkatan kapasitas / manajemen usaha			V	V	V			
5	Pendidikan dan pelatihan Entrepreneur	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan			V	V	V	V	V	V

4.1.1.2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam memiliki sasaran mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan secara berkelanjutan sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi yang juga dinikmati semua penduduk dengan memperkecil jurang pendapatan penghasilan.

Tabel 4.3. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2016 – 2020; 2021-2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan	V	V						
2	Penelitian dan Pengembangan mengenai potensi Sumber Daya Alam Aceh;	V	V						
3	Pengembangan potensi SDA daerah melalui program OVOP (<i>one village one product</i>)		V	V	V	V	V	V	V
4	Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam			V	V	V	V	V	V
5	Pengembangan teknologi Transportasi dan Penyaluran Sumber Daya Alam				V	V	V	V	V

4.1.2.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Sebuah industri harus terus menerus memperbaiki teknologinya bila ingin bertahan (natural monopoly). Pengembangan industri di Provinsi Sumatera Selatan juga harus terus menerus

mengembangkan teknologinya. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri memiliki sasaran menciptakan teknologi industri yang tepat guna serta memiliki manfaat bagi teknologi agro industri sehingga menghasilkan produksi yang berdaya saing. Tabel 4.4. menyediakan program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri tahun 2016-2020.

Tabel 4.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Industri Tahun 2016 – 2020

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	V	V						
2	Pelaksanaan Uji coba Laboratorium dan produksi		V	V					
3	Pembuatan Paten dan HKI			V	V	V	V		
4	Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci			V	V	V	V	V	V
5	Pengembangan teknologi <i>renewable energy</i> yang ramah lingkungan secara berkelanjutan				V	V	V	V	V

4.1.2.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan wirausaha baru berbasis agro industri dan sumber daya lokal. Program ini perlu dilakukan agar industri Provinsi Sumatera Selatan mempunyai nilai kompetisi (*competitiveness*) yang tinggi.

Tabel 4.5. Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Kreativitas dan Inovasi Tahun 2016 – 2020; 2021-2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pengembangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset	V	V						
2	Pelaksanaan Uji coba Laboratorium dan produksi		V	V					
3	Pembuatan Paten dan HKI			V	V	V	V		
4	Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci			V	V	V	V	V	V
5	Pengembangan teknologi <i>renewable energy</i> yang ramah lingkungan secara berkelanjutan				V	V	V	V	V

4.1.2.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tabel 4.6. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun
2016 – 2020

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pengembangan lembaga keuangan berbasis masyarakat	V	V	V					
2	Pemanfaatan Perbankan Sumatera Selatan sebagai sumber pembiayaan		V	V	V	V	V	V	V
3	Kemudahan akses pemanfaatan Instrumen Keuangan untuk perbankan dalam dan luar negeri			V	V	V	V	V	V
4	Pinjaman Luar Negeri /offshore loan untuk pengembangan industri berbasis			V	V	V	V	V	V

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	masyarakat								
5	Pemanfaatan lembaga donor untuk program hibah pengembangan industri ramah lingkungan (<i>Green Prosperity</i>)			V	V	V	V	V	V
6	Pengembangan infrastruktur kredit untuk petani dan nelayan			V	V	V	V	V	V

4.1.2.6. Kerjasama antar lembaga dan antar Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan Lembaga Baik di Dalam maupun di Luar Negeri dan Antar Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri.

Tabel 4.7. Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2016 – 2020; 2021-2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Kerjasama Penelitian dengan Institut Pertanian Bogor, Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Kerjasama peningkatan produksi pertanian dengan Balai Pertanian	V	V	V	V	V	V	V	V
3	Fasilitasi nelayan dan petani tradisional melalui kementerian	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Kerjasama pengembangan bibit pertanian yang berkualitas dengan negara ASEAN		V	V	V	V	V	V	V
5	Kerjasama pemasaran produksi industri agro dengan Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu		V	V	V	V	V	V	V

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
6	Kerjasama pemasaran produksi industri baik dalam negeri maupun luar negeri (Pameran internasional dan Pameran produksi dalam negeri)			V	V	V	V	V	V
7	Afirmasi dengan lembaga donor dalam maupun luar negeri dalam pemanfaatan energi terbarukan			V	V	V	V	V	V

4.1.2.7. Perijinan dan Pajak Daerah yang menunjang pembangunan industri

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang pendaptannya rendah.

Pajak juga berperan sebagai pembantas suatu produk sehingga produk yang dianggap sifatnya dapat membahayakan kehidupan manusia dapat dicegah sehingga masyarakat suatu daerah terhindar dari bahaya akibat efek dari produk yang menjadikan generasi dari daerah tersebut masih sehat dan daerah juga akan aman. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan

maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat.

Disisi lain penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah perluasan usaha dibidang agro industri dan mempercepat pertumbuhan investasi di daerah Aceh.

**Tabel 4.8. Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang
Pembangunan Industri Tahun 2016 –2020; 2021- 2035**

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Penyederhanaan proses perizinan	V	V						
2	Pengembangan Sistem Pelayanan Satu Atap	V	V						
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal/SPM dalam Perijinan		V	V					
4	Pengembangan Insentif fiskal		V	V	V	V	V	V	V
5	Menyederhanakan prosedur izin ekspor dan memfasilitasi pelaksanaan izin ekspor			V	V	V	V	V	V
6	Peningkatan pendapatan pajak daerah				V	V	V	V	V
7	Pengembangan Single Identification Number (SIN) untuk wajib pajak					V	V	V	V

4.1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik dan telekomunikasi dan infrastruktur/pengelolaan lingkungan.

4.1.3.1. Transportasi (Jalan, Pelabuhan, Airport, Kereta Api, dan ASDP)

Tabel 4.9. Program Pembangunan Transportasi Tahun 2016 –2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Perencanaan Konektivitas Transportasi	V	V						
2	Pengembangan multimoda logistik secara terintegrasi			V	V	V	V	V	V
3	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi		V	V	V	V	V	V	V
4	Peningkatan sarana dan prasarana angkutan barang (<i>Dry Port</i>)			V	V	V	V	V	V
5	Penguatan mekanisme <i>Public Private Partnership</i> /PPP untuk percepatan pembangunan infrastruktur				V	V	V	V	V

4.1.3.2. Jaringan Air, Listrik dan Telekomunikasi

Pembangunan jaringan air, listrik, dan telekomunikasi pada kawasan industri dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri secara terintegrasi.

Tabel 4.10. Program Pembangunan Jaringan Air, Listrik dan Telekomunikasi Tahun 2016 – 2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pembangunan Jaringan Air Bersih	V	V	V					
2	Peningkatan infrastruktur Listrik Pedesaan		V	V	V	V			

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
3	Peningkatan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Serat Optik			V	V	V	V	V	
4	Pembangunan Pembangkit Listrik Energi terbarukan			V	V	V	V	V	
5	Peningkatan pengolahan air bersih dari air laut (desalinasi)				V	V	V	V	V

4.1.3.3. Infrastruktur / Pengelolaan Lingkungan

Infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang tidak dapat terpisahkan dalam kawasan industri. Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan agro industri di provinsi Aceh yang berwawasan lingkungan dengan tujuan menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkesinambungan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 4.11. Program Pembangunan Infrastruktur/Pengelolaan Lingkungan Tahun 2016 – 2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah	V	V	V					
2	Pembangunan <i>Electric Precipitator</i> sebagai penyaring partikel asap di industri manufaktur	V	V	V					
3	Penelitian <i>waste to energy</i> untuk infrastruktur pemukiman/landfill		V	V	V	V	V	V	V

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
4	Pemanfaatan limbah organik industri sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan		V	V	V	V	V	V	V
5	Standarisasi dan sertifikasi infrastruktur pengelolaan lingkungan di lingkungan industri			V	V	V	V	V	V

4.1.3.4. Penyediaan Lahan untuk industri

Penyediaan Lahan untuk Industri dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan untuk agro industri .

Tabel 4.12. Program Penyediaan Lahan untuk Industri tahun
2016 – 2020; 2021- 2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan regulasi yang berlaku	V	V	V					
2	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	V	V	V					
3	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan		V	V	V	V	V	V	V
4	Pembebasan lahan Kawasan Industri		V	V	V	V	V	V	V

4.1.3.5. Penyediaan Sistem Informasi untuk industri

Penyediaan Lahan untuk Industri dalam rangka mempercepat proses pembebasan lahan untuk agro industri .

**Tabel 4.13. Program Penyediaan Sistem Informasi untuk
Industri tahun 2016 – 2035**

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pembangunan data base industri	V	V	V					
2	Fasilitasi Penyediaan Sistem Informasi	V	V	V					
3	Penguatan infrastruktur Sistem Informasi secara terintegrasi		V	V	V	V	V	V	V
4	Pemanfaatan sistem informasi industri			V	V	V	V	V	V
5	<i>Upgrading</i> sistem informasi di kawasan industri			V	V	V	V	V	V

4.1.4. Pemberdayaan IKM

Pembangunan dan pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka pemerataan ekonomi.

Tabel 4.14. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2016 – 2035

No	Program	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Pembinaan dan pemberdayaan IKM berbasis ekonomi daerah (LQ tinggi) keunggulan komparatif dan kompetitif	V	V	V					
2	Peningkatan kapasitas	V	V	V					
3	Terbentuknya kemitraan (<i>linkage</i>) antar usaha / antar industri		V	V	V	V	V	V	V
4	Menciptakan IKM baru berbasis agro industri dan sumber daya lokal		V	V	V	V	V	V	V
5	Pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan		V	V	V	V	V	V	V

4.2. INDUSTRI UNGGULAN PRIORITAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

4.2.1. Penetapan Komoditas Unggulan

4.2.1.1. Analisis Komoditas Unggulan Provinsi

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.15. Faktor-faktor yang Digunakan untuk Menentukan Industri Unggulan Provinsi

No.	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan nilai tambah komoditas • Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud • Dorongan inovasi komoditas • Ketersediaan sumber energi
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :

No.	Faktor	Penjelasan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan tenaga kerja • Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat • Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat • Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah) • Volume Bahan Baku yang mencukupi • Kontinuitas pasok bahan baku • Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi • Rantai pasok • Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai • Ketersediaan bahan-bahan penolong • Dukungan letak geografis bagi komoditas • Dukungan kondisi iklim lokal

No.	Faktor	Penjelasan
		terhadap komoditas
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan/akses pasar regional • Jangkauan/akses pasar nasional • Jangkauan/akses pasar internasional • Kondisi persaingan • Dukungan infrastruktur pemasaran
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posisi komoditas dalam renstra daerah • Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait • Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari

No.	Faktor	Penjelasan
		<p>faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM daerah • Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi • Sertifikasi
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan/keunikan • Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah
8.	Kesiapan dan Kesiediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri • Kesiapan psikologis masyarakat
9.	Kesiapan dan Kesiediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)</p>
10.	Kesiapan dan Kesiediaan Pelaku	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah</p>

No.	Faktor	Penjelasan
	Usaha	<p>siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respon pelaku usaha • Kesiapan teknologi • Kompetensi pengusaha • Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha

4.2.1.2. Long List Komoditas Unggulan Provinsi

Long list komoditas Unggulan Provinsi Sumatera Selatan didaftarkan sesuai dengan ketersediaan komoditas tersebut. Komoditas tersebut dibagi dua:

A.....K
omoditas berbasis argo.

B.....K
omoditas berbasis bahan tambang atau galian

Tabel 4.16. Long list Komoditas Unggulan Argo, Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten	Karet		Kopi		Kelapa Sawit		Pinang		Tebu		jagung		Ubi Kayu		Kacang Kedele	
	Luas lahan	Produksi (ton)	Luas lahan	Produksi (ton)	Luas lahan (Ha)	Produksi (ton)	Luas lahan	Pro du	Luas lahan	Produksi (ton)	Luas lahan	Produksi (ton)	Luas lahan	Produksi (ton)	Luas lahan	Produk si (ton)
Ogan Komering Ulu	75.221	68.146	21.943	24.813	252.764	213.162	288									
Ogan Komering Ilir	166.579	203.995	1.115	614	912.386	823.752	438									
Muara Enim	227.618	246.578	23.444	12.566	1.239.824	1.231.264	54									
L a h a t	35.482	23.278	51.148	20.195	579.964	554.777	62									
Musi Rawas	334.639	264.178	3.935	2.079	1.208.544	1.214.156	-									
Musi Banyuasin	173.841	114.115	315	121	1.587.734	1.394.213	-									
Banyuasin	108.506	475.562	2.632	1.822	879.209	916.284	183									
OKU Selatan	4.995	2.228	70.799	32.949	-	389	14									
OKU Timur	79.098	37.724	2.318	1.250	163.146	146.591	-		11.050							
Ogan Ilir	36.545	41.056	-	-	115.671	110.500	-		12.036	792.075						
Empat lawang	19.081	-	5	-	122	874	-									
Palembang	1.680	13.969	8.323	11.375	-	-	1.583									
Prabumulih	13.921	310	1.463	531	-	235	-									
Pagar Alam	4.679	2.899	61.978	28.672	-	177	-									
Lubuk Linggau	1.220.928	9.504	249.418	-	-	257.359	-									
Total	2.502.813	1.503.542	498.836	136.987	6.939.364	6.863.733	2.622	-	23.086	792.075	32.558	167.457	9.397	165.250	8.698	13.710

Tabel 4.17. Long List Komoditas Bahan Tambang, Provinsi Sumatera Selatan

No.	Komoditas	Lokasi
1	Minyak Bumi	Prabumulih,
		Muara Enim,
		Muba,
		Lahat, OKU
2	Gas Bumi	Prabumulih,
		Muara Enim,
		Muba,
		Lahat,
		OKU
3	Batu Bara	Muara Enim,
		Lahat

4.2.2. Penetapan Industri Unggulan

Industri unggulan ditetapkan dengan metode LQ dan Indeks RCA. Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode LQ, RCA, Dukungan Kebijakan Pemerintah melalui hasil *Focus Group Discussion* (FGD pertama dan kedua) untuk komoditi yg sulit diperoleh data kuantitatifnya dan memerlukan alasan yg bersifat subjektif, maka didapat unggulan industri Sumsel.

Tabel 4.18. Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Industri Perkebunan
1.	Industri Karet
2.	Industri Kopi

Industri Pertanian Tanaman Pangan		
1.	Industri Jagung	
2.	Industri Ubi kayu	Industri pakan
3.	Industri Kedelai	
4.	Industri berbahan baku Batubara	

Selanjutnya atas dasar analisis dan hasil FGD dipilih industri yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel 4.19 berikut.

Tabel 4.19. Industri Prioritas dan Jenis Industrinya di Sumatera Selatan

No	Industri Prioritas	Jenis Industri Turunan yang Telah Eksis	Potensi Diversifikasi Industri
1	Industri karet	- Industri crumb rubber dan RSS	- Sepatu karet, botol, dan alat-alat kesehatan.
		- Industri cinderamata	Berbagai industri karet yang dapat dikembangkan dalam skala UKM (terdapat dalam Masterplan Pengembangan Pusat Unggulan Inovasi Karet Tahun 2012) :
		- Industri kompon dan vulkanisir ban	
		- Industri spare part otomotif	
		- Industri kompon padat yang telah diujicobakan untuk membuat produk boneka	
		- Industri kayu karet dengan turunannya : industri perabotan rumah tangga	
			- Industri serta sabut kelapa berkaret (sebutret)
			- Industri flinkote berbasis karet alam
			- Industri karet busa alam di kelompok tani (KUD)
			- Industri kompon

			karet dari lateks
2	Industri kopi	- Industri kopi bubuk	- Industri permen kopi
		- Industri kopi mix	- Industri minuman kopi kemasan kotak/kaleng
		- Industri kopi ginseng	- Industri roti/kue rasa kopi (seperti roti boy)
		- Industri kopi durian	
		- Industri kopi luwak	
		- Industri kopi pinang	
3	Industri pakan	- Industri pakan ternak sapi dan unggas	- Industri pakan ikan
4	Industri kelapa sawit	-Minyak Kelapa Sawit - Margarine - Sabun	-Minyak Kelapa Sawit -Margarine -Sabun -Gliserin dan industri fatty - Acid -Olein -Tocopherol -Surfaktan - Fatty alcohol dan turunannya -Beta Carotene
5	Industri Batu bara	-Gasifikasi, -Amoniak - Pupuk - Briket	-Gasifikasi -Amoniak -Pupuk -Polipropilena - Briket -Konversi Energi

4.2.3. Rencana Aksi Pembangunan Industri Unggulan

Berikut disajikan Rencana Aksi Pembangunan Industri Unggulan di Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat lima komoditas unggulan yang terpilih akan dikembangkan, yakni industri (berbahan) Karet, Industri (berbahan) Kopi, Industri Pakan, Industri (berbahan) Kelapa Sawit, dan Industri (berbahan) Batu Bara.

4.2.3.1.....Ind ustri Pengolahan Industri Aneka (Pengolahan Karet), Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet

Tabel 4.20. Lokus Pembangunan Industri Karet Provinsi Sumatera Selatan

Jenis	Lokus yang Sudah Eksis	Lokus Potensi
Industri karet	Kota Palembang, Kabupaten OKU,	Kota Lubuk Linggau,
	UKM Citra Souvenir Talang	-Kota Palembang
	Kedondong Kota Palembang	-Kabupaten Banyuasin
		(Kawasan Industri
		Tanjung Api-Api)
		-Kota Lubuk Linggau
	Kabupaten Ogan ilir	Kota Palembang
		Kabupaten Banyuasin
		Kota Lubuk Linggau
	UKM Al Amalul Khair Bukit Besar	Kabupaten Banyuasin
	Palembang	Kota Lubuk Linggau
	UKM Sukawinatan Kota	Kabupaten Banyuasin
	Palembang	Kota Lubuk Linggau
	Kota Palembang	Kota Lubuk Linggau
		Kabupaten Banyuasin

Lokus pembangunan berupa lokus yang sudah eksis dan lokus potensi industri karet di Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabe. 4.20.

Selanjutnya Tabel 4.21 menyajikan identifikasi kebutuhan engembangan Industri Karet Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.21. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Karet

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
1	Industri Karet :		
	1. Industri crumb rubber	Pada industri besar rerata semua peralatan tersedia hanya kemampuan SDMnya terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan SDM - Pelatihan pengelolaan crumb rubber dengan benar - Fasilitasi kerjasama - Fasilitasi kerjasama pasar
	2. Industri turunan : <ul style="list-style-type: none"> - Industri cinderamata - Industri kompon dan vulkanisir ban - Industri spare part otomotif - Industri kompon padat yang telah diujicobakan untuk membuat produk boneka - Industri kayu karet dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan untuk setiap industri tersedia namun masih dalam kapasitas kecil karena pasar hasil produksi masih terbatas - SDM yang memiliki skill teknis pengolahan industri karet tersedia namun masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> - Computer Servo Motor Tensile Testing Machine Model UTS-S200, JTM Technology - Pneumatic Punch Press Tester - Aging Oven JTM-RP1259 - Temperature & Humidity Chamber JTM-1291 - Radwag Analytical balance model AS 220/C/2 - Peningkatan jumlah SDM yang memiliki skill - Fasilitasi pasar - Fasilitasi kerjasama IKM

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
	turunannya : industri perabotan rumah tangga		denga industri besar - Peningkatan pengetahuan dan ketermapilan SDM IKM - Laboratorim untuk riset - Set Dipping Process Machine dan Cetakan Sarung - Bahan baku compound

Permasalahan dalam pengembangan industri karet :

- Kebutuhan ekspor Crumb Rubber dan RSS yang cukup besar, yang tidak linier dengan kebutuhan bahan baku untuk industri lokal, yang menyebabkan industri-industri lokal yang berbahan baku produk karet sering mengalami kekurangan dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.
- Masih terbatasnya ketersediaan bahan baku pelengkap (atau penolong) yang menyebabkan tingginya biaya produksi dan keterbatasan jumlah produksi.
- Daya saing produk industri karet lokal secara kualitas dan harga yang dihasilkan pengusaha lokal masih rendah karena belum efisiennya biaya produksi dan terbatasnya ketersediaan bahan baku akibat ekspor bahan mentah serta keterbatasan bahan penolong/pelengkap dalam produksi.
- Masih terbatasnya ketersediaan SDM yang memiliki skill dan kemauan dalam mengelola industri hilir karet yang mayoritas

memang masih diproduksi dalam bentuk produk akhir crumb rubber dan RSS.

- Belum tersedianya lokus spesifik industri hilir karet yang mendekati lokasi bahan baku, yang menyebabkan biaya transportasi menjadi lebih mahal.
- Kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi dalam hal penyediaan infrastruktur (jalan, gas, listrik dan air) dan fasilitasi permodalan investasi belum konsisten.
- Penelitian dan pengembangan produk industri hilir masih lemah dan yang telah berkembang di dalam negeri, khususnya untuk industri ban masih dikuasai perusahaan asing/PMA
- Keterkaitan antara industri hulu dan industri hilir ataupun antara skala kecil hingga besar belum padu/kuat. Masing-masing lebih mengutamakan kepentingannya sendiri.
- Kualitas produksi dan pengolahan belum mampu bersaing di pasar dunia maupun dengan produk impor. Hal itu dipersulit oleh ketatnya persaingan di negara tujuan ekspor dan di dalam negeri dengan produk impor.
- Belum terbangunnya struktur klaster industri (industrial cluster) yang saling mendukung.
- Masih tingginya ketergantungan industri karet pada impor bahan penolong
- Masih dikenakannya BMAD (bea masuk anti dumping) carbon black sebesar 10-17%.
- Masih rendahnya motivasi dan kemampuan wirausaha di kalangan pelaku bisnis komoditi tersebut.

- Tiap negara meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya demi keunggulan komparatif dan kompetitif
- Negara-negara maju, dengan alasan melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen telah menetapkan standar mutu internasional.

Tabel 4.22. Analisis SWOT Industri Karet

<div> <div>Faktor Internal</div> <div>Faktor Eksternal</div> </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan bahan baku -Ketersediaan alat pengembangan -Ketersediaan tenaga kerja -Dukungan pemerintah -Permintaan Pasar -Kemampuan Teknis -Sudah ada pelaku usaha dan inkubator bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> -kepercayaan Konsumen masih rendah. -Insentif Pengembangan -SDM Trampil masih kurang -Penguasaan Teknologi masih rendah. -Kesulitan mendapatkan bahan penolong. -kontinuitas bahan baku belum terjamin
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> -Permintaan pasar cukup bagus -Dukungan Teknologi -Sudah tersedia Masterplan sistem inovasi industri karet Pengembangan kawasan Industri Jenis produk bervariasi -Kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> -Menciptakan produk berkualitas -Penetrasi pasar -Peningkatan Kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha -Pemberdayaan Kelompok untuk kerjasama dengan sektor on farm karet. -Pembentukan klaster karet -Riset pasar -Peningkatan Promosi 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknis pengolahan dan penggunaan teknologi -Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan. -Penyediaan bahan penolong lokal -Pembentukan kerjasama antar pengusaha bahan baku karet dengan industri karet
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi WT
<ul style="list-style-type: none"> -Persaingan dari negara luar yang masuk pasar nasional dan regional. -Konversi tanaman karet -selera konsumen yang berubah 	<ul style="list-style-type: none"> -membuat jenis produk industri karet yang unggul dan memiliki ciri khas. -melakukan riset pasar untuk mengetahui selera konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> -efisiensi biaya -perbaikan manajemen. -Penguasaan pasar. Penyediaan bahan penolong. -Kerja sama dengan industri sejenis di seluruh dunia

Tabel 4.23. Sasaran Pembangunan Industri Karet, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 - 2035

No	Sasaran	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Nilai tambah (Rp milyar)	212,4	227,016	330,084	437,4	459,72	639,135	909,324	1098,432
2	Pertumbuhan (%)	9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	697,2	737,664	782,988	833,736	890,592	1190,592	1490,592	1910,592
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	44.993	46.460	47.928	49.396	50.864	276.336	313.032	349.727
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.147	1.284	1.438	1.611	1.805	3.353	4.253	5.153

Tabel 4.24. Rencana Aksi Pengembangan Industri Karet Tahun 2016 – 2035

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Linierisasi kebutuhan bahan baku untuk industri lokal dengan kebutuhan ekspor Crumb	Dinas Perindag, Dinas Pertanian	Dinas Perindag, Dinas Petania	Perusahaan	Kadin, Asosiasi Industri	V	V	V	V	V	V	V	V

	Rubber dan RSS												
2	Penelitian dan pengembangan bibit karet yang berkualitas	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
3	Pengembangan dan produksi bahan baku pelengkap untuk industri karet	Dinas Perindag		Perusahaan		V	V	V	V				
3	Melakukan diversifikasi produk olahan Karet			Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang			V	V	V	V	V	V
4	Mendorong peningkatan produksi Karet	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan			V	V	V	V	V	V	V
5	Mengembangkan budidaya Karet secara berkelanjutan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian		Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V
6	Mengembangkan	Dinas	Dinas	Perusahaan	Asosiasi			V	V	V	V	V	V

	industri berbasis karet yang bernilai tambah dan berdaya saing	Perindag	Perindag	aan									
7	Melakukan pendalaman struktur industri karet	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
8	Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan			V	V	V	V	V	V	V
9	Menyusun konsep pemasaran bersama anggota klaster dan serikat petani	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Asosiasi		V	V	V	V	V	V	V
10	Mengembangkan entrepreneurship dalam industri karet	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	LSM dan Asosiasi		V	V	V	V	V	V	V

4.2.3.2.....I

ndustri Pengolahan Industri Kopi

Tabel 4.25. Lokus Pembangunan Industri Kopi, Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Industri	Lokus yang Sudah Eksis	Lokus Potensi
Industri kopi bubuk	Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, OKU Selatan, dan Kota Lubuk Linggau	Kabupaten Lahat
		Kota Pagar Alam
Industri kopi mix	Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim	Kabupaten OKU Selatan, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau
Industri kopi luwak	Kabupaten OKU Selatan	Kabupaten Empat Lawang
Industri kopi pinang	Kabupaten OKU Selatan	Kabupaten Empat Lawang
Industri kopi ginseng	Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Muara Enim	Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau
Industri kopi durian	Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau	Kabupaten OKU Selatan

Tabel 4.26. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Kopi

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
2	Industri Kopi		
	<ul style="list-style-type: none"> - Industri kopi bubuk - Industri kopi mix - Industri kopi luwak - Industri kopi pinang - Industri kopi ginseng - Industri kopi durian 	<p>Kabupaten Muara Enim telah tersedia :</p> <p>dryer, huller, grader, digi most, roaster, silo, blebding, grinder, packing roll, mesin kritalisator, peralatan pendukung</p> <p>Kabupaten Empat Lawang telah tersedia :</p> <p>Dryer, roaster, grinder, peralatan penyimpan biji kering, peralatan packing, mesin pencampur kopi mix (three ini one), mesin genset (generator)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realokasi peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (kapasitas terlalu besar dan bahan bakar boros) - Pembinaan kelompok pengelolaan mesin - Pelatihan penggunaan mesin yang tersedia <ul style="list-style-type: none"> - Realokasi peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (kapasitas terlalu besar dan bahan bakar boros) dan mesin pencampur kopi mix karena tidak memproduksi kopi mix - Pembinaan kelompok pengelolaan mesin - Pelatihan penggunaan mesin yang tersedia - Mengubah perilaku masyarakat tentang cara menjemur/mengeringkan kopi

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
		Kabupaten OKU Selatan, telah tersedia : dryer, huller, grader, digi most, roaster, silo, blebding, grinder, packing roll, mesin kribalisator, peralatan pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Realokasi peralatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (kapasitas terlalu besar dan bahan bakar boros) dan mesin pencampur kopi mix karena tidak memproduksi kopi mix - Pembinaan kelompok pengelolaan mesin - Pelatihan penggunaan mesin yang tersedia - Mengubah perilaku masyarakat tentang cara menjemur/mengeringkan kopi

Permasalahan dalam Pengembangan Industri Kopi

- Masih rendahnya penguasaan teknologi industri hilir kopi dan penguasaan teknologi pascapanen sehingga mutu rendah, dan meskipun sudah banyak mutu yang bagus namun cenderung belum konsisten.
- Pemasaran hasil industri hilir kopi belum berlangsung dengan baik, dimana mayoritas produk kopi yang dijual untuk pasar dalam negeri dari Sumsel masih berupa produk biji.
- Rantai perdagangan antara produsen kopi dari tingkat petani dengan industri kopi masih panjang. Sehingga proporsi nilai tambah yang dinikmati petani menjadi kecil. Hal ini berdampak pada kesejahteraan petani kopi yang dapat ditingkatkan pada masa mendatang.

- Masih rendahnya tingkat konsumsi kopi masyarakat dalam negeri, diakibatkan masih minimnya sosialisasi dan edukasi tentang manfaat dan cara minum kopi yang benar. Rendahnya konsumsi kopi tersebut berimbas pada rendahnya permintaan produk kopi pada pasar kopi dalam negeri.
- Masih lemahnya kelembagaan petani/pelaku pemasaran kopi, sehingga pelaku-pelaku pemasaran kopi dalam negeri cenderung melakukan aktifitasnya secara individu. Kondisi ini mengakibatkan posisi tawar mereka masih cenderung rendah dan sulit untuk memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.
- **Specialty coffee** belum dikelola secara optimal, sehingga belum memiliki merk dagang khas daerah
- Terbatasnya akses permodalan para petani/keompok tani, sehingga usaha industri hilir kopi masih sulit berkembang karena keterbatasan modal.
- Tata niaga kopi masih didominasi oleh tengkulak, rantai pemasaran pasih panjang
- Permintaan pasar mayoritas dalam bentuk biji, yang menyebabkan pengusaha kopi cenderung kurang termotivasi untuk menghasilkan produksi kopi olahan.
- Bahan-bahan penolong dan penunjang industri kopi harganya masih relatif mahal, Diversifikasi produk kopi olahan yang sesuai dengan permintaan pasar masih kurang, disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha terhadap selera konsumen serta masih mahalnya bahan penolong dan penunjang

- Promosi pemasaran dan pameran produk di dalam dan luar negeri masih kurang, menyebabkan produk kopi Sumsel kurang mampu bersaing dengan daerah lain.
- Masih lemahnya riset dan pengembangan pasar kopi di Sumsel,
- Pasokan bahan baku belum stabil dari sisi kualitas maupun kuantitas,
- Pasar ekspor kopi di untuk Sumatera Selatan belum berkembang dengan baik sebagai akibat:
 - kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) penunjang ekspor khususnya pelabuhan, standar kualitas dan syarat-syarat administratif yang diterapkan negara-negara pengimport kopi cukup bervariasi, ketat dan sulit ditembus oleh eksportir kopi Sumsel
 - Image buruk negara produsen, yang dianggap belum mampu menghasilkan produk olahan sesuai dengan permintaan pasar, disamping ketatnya persaingan pasar produk olahan.
 - Sulitnya menembus jaringan pasar ekspor produk hilir kopi
 - Terbatasnya informasi pasar ekspor
- Adanya hambatan dalam peraturan khususnya ketenagakerjaan, perpajakan dan perdagangan yang diterapkan negara importer
- Kurangnya motivasi dari pengusaha kopi Sumsel untuk menembus pasar ekspor dikarenakan masih rendahnya dukungan yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku usaha ini untuk melakukan ekspor, ditambah pengetahuan dan informasi yang mereka miliki terhadap pasar ekspor masih tergolong minim.

- Kekurangan modal
- Teknologi pengolahan dan pengemasan yang belum dikuasai sepenuhnya
- Kualitas SDM untuk pemasaran produk hilir yang belum memadai.
- Belum optimalnya peranan asosiasi eksportir kopi
- Produksi kopi yang masih didominasi jenis Robusta, sedangkan permintaan pasar dunia menyukai kopi Arabika

4.27. Analisis SWOT Industri Kopi

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan bahan baku -Ketersediaan alat pengolah -Ketersediaan tenaga kerja -Dukungan Pemerintah -Permintaan pasar. -Kemampuan Teknis. -Sudah ada pelaku usaha dan inkubator bisnis. -Tersedia speciality coffe yang khas. -Jenis Produk kopi sudah bervariasi. -Sudah terapat industri kopi yang menembus pasar internasional 	<ul style="list-style-type: none"> -Produk belum memiliki brand daerah -SDM Trampil masih kurang -Penguasaan Teknologi masih rendah. -Kesulitan mendapatkan bahan penolong. -kontinuitas bahan baku belum terjamin -Produksi biji kopi masih dilakukan secara tradisional -Produk akhir masih dominan kopi roasted. -Pemasaran belum kontinue. -Promosi Masih minim. -tingkat konsumsi kopi masyarakat masih rendah. -rantai pemasaran sebagian dikuasai daerah lain.
Faktor Eksternal		
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> -Permintaan pasar cukup bagus -Dukungan Teknologi -Sudah tersedia Masterplan 	<ul style="list-style-type: none"> -Menciptakan produk berkualitas -Penetrasi pasar -Peningkatan Kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknis pengolahan dan penggunaan teknologi

<p>sistem inovasi industri karet</p> <p>Pengembangan kawasan Industri</p> <p>Jenis produk bervariasi</p> <p>-Kebijakan Pemerintah</p>	<p>eknis dan manajemen pelaku usaha</p> <p>-Pemberdayaan Kelompok untuk kerjasama dengan sektor on farm karet.</p> <p>-Pembentukan klaster karet</p> <p>-Riset pasar</p> <p>-Peningkatan Promosi</p>	<p>-Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan.</p> <p>-Penyediaan bahan penolong lokal</p> <p>-Pembentukan kerjasama antar pengusaha bahan baku karet dengan industri karet</p>
Ancaman (T)	Strategi (ST)	Strategi WT
<p>-Persaingan dari negara luar yang masuk pasar nasional dan regional.</p> <p>-Konversi tanaman kopi</p> <p>-selera konsumen yang berubah</p>	<p>-membuat jenis produk industri kopi yang unggul dan memiliki ciri khas.</p> <p>-melakukan riset pasar untuk mengetahui selera konsumen</p>	<p>-efisiensi biaya</p> <p>-perbaikan manajemen.</p> <p>-Penguasaan pasar.</p> <p>Penyediaan bahan penolong.</p> <p>-Kerja sama dengan industri sejenis di seluruh dunia</p>

Tabel 4.28. Sasaran Pembangunan Industri Kopi, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 - 2035

No.	Sasaran	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Nilai tambah (Rp milyar)	188,8	201,792	293,408	388,8	408,64	568,12	808,288	976,384
2	Pertumbuhan (%)	9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	522,9	553,248	587,241	625,302	667,944	892,944	1117,944	1432,944
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	44.993	46.460	47.928	49.396	50.864	276.336	313.032	349.727
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.465	1.641	1.838	2.059	2.306	4.284	5.434	6.584

Tabel 4.29 Rencana Aksi Pengembangan Industri Kopi, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Menerapkan GMP dan HACCP	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan		V	V	V					
2	Penelitian dan pengembangan bibit kopi arabika	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	yang berkualitas												
3	Melakukan diversifikasi produk olahan kopi			Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang			V	V	V	V	V	V
4	Mendorong peningkatan produksi biji kopi Arabica	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan			V	V	V	V	V	V	V
5	Mengembangkan budidaya kopi arabika secara berkelanjutan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian		Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V
6	Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi)	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Asosiasi			V	V	V	V	V	V

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
7	Melakukan pendalaman struktur industri kopi	Dinas Perindag			Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
8	Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Kadin		V	V	V	V	V	V	V
9	Menyusun konsep dan rantai pemasaran bersama anggota klaster	Dinas Perindag, Bappeda	Dinas Perindag	Perusahaan	Asosiasi		V	V	V	V	V	V	V

4.2.3.3.....I

ndustri Pengolahan Industri Pakan

Tabel 4.30. Lokus Pembangunan Industri Pakan, Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Industri	Lokus yang Sudah Eksis	Lokus Potensi
Industri Pakan	Kabupaten OKI	Kabupaten OKU Timur
	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten Musi Rawas
		Kabupaten Empat Lawang

Tabel 4.31. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Industri Pakan

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
3	Industri Pakan	1. Kabupaten OKI : - Mixer dengan kapasitas 100-200 kg - Chooper dengan kapasitas 100-200 kg - Mesin pengering berbahan bakar LPG	1. Kabupaten OKI (Pabrik di Desa Mulya Jaya dan Desa Sukasari Kec. Mesuji Raya) memerlukan : - alat pengering berbahan baku biomasa (modifikasi alat pengering sekarang yg masih berbahan bakar LPG dan solar) - mesin chooper dan mixer dengan kapasitas 500 kg – 1000 kg per hari, (kapasitas yg 100 kg, - fasilitasi kerjasama bahan baku dari limbah industri padi (dedak), ubi kayu (onggok), jagung - fasilitasi dengan perusahaan CPO untuk mendapatkan limbah pabrik (solid) untuk bahan baku pakan - Mesin pengemasan (packing) - Fasilitasi kerjasama pasar - Informasi/pengetahuan inovasi bahan pelengkap untuk pengolah

No	Jenis Industri Agro Unggulan	Peralatan/SDM yang Tersedia	Kebutuhan Pengembangan
			pabrik pakan yang memanfaatkan sumberdaya lokal
		2. Kabupaten Banyuasin : - Mixer dengan kapasitas 100-200 kg - Chooper dengan kapasitas 100-200 kg - Mesin pengering berbahan bakar solar	1. Kabupaten Banyuasin, memerlukan : - Fasilitas ke pabrik sumber bahan baku khususnya solid, - Fasilitas kerjasama dengan petani sawit - Mesin packing - Mesin chopper untuk jagung dan kedelai (yang baru tersedia chopper untuk pelepah sawit)

Permasalahan dalam Pengembangan Industri Pakan

- Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap bahan baku maupun bahan campuran dari luar (impor) sehingga biaya produksi industri pakan masih tinggi.
- Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan SDM lokal dalam mengelola bahan baku lokal khususnya jagung, ubi kayu, kedelai dan limbah sawit untuk dibuat pakan yang berkualitas.
- Masih kurangnya penelitian-penelitian tentang pakan yang berkualitas
- Masih rendahnya adopsi teknologi pengolah pakan yang berkualitas

Tabel 4.32. Analisis SWOT Industri Pakan, Provinsi Sumatera Selatan

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan bahan baku yang variatif -Ketersediaan alat pengolah -Ketersediaan tenaga kerja -Dukungan Pemerintah -Permintaan pasar. -Kemampuan Teknis. -Sudah ada pelaku usaha dan inkubator bisnis. -perkembangan usaha ternah 	<ul style="list-style-type: none"> -SDM Trampil masih kurang -Penguasaan Teknologi masih rendah. -Kesulitan mendapatkan bahan penolong. -kontinuitas bahan baku belum terjamin -pemasaran belum kontinu -Promosi masih minim -tingkat kepercayaan masih rendah
Faktor Eksternal		
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> -Permintaan pasar cukup bagus -Dukungan Teknologi -Kebijakan dan dukungan Pemerintah. -usaha peternakan unggas dan perikanan cukup berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> -meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pakan -diversifikasi jenis pakan (untuk ruminasia, unggas, dan ikan). _penetrasi pasar. -Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha.\-Pemberdayaan kelompok untuk bekerja sama dengan industri lain sebagai sumber bahan baku. -Riset pasar. -Peningkatan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknis pengolahan dan penggunaan teknologi -Meningkatkan kualistas SDM melalui pelatihan dan pembinaan. -Penyediaan bahan penolong lokal -Pembnetukan kerjasama antar pengusaha bahan baku dengan industri pakan
Ancamaman (T)	Strategi (ST)	Strategi WT

-Persaingan produk dari negara luar yang masuk pasar nasional dan regional. -Konversi tanaman bahan pakan -selera konsumen yang berubah	. -melakukan riset pasar untuk mengetahui selera konsumen	-efisiensi biaya -perbaiki manajemen. -Penguasaan pasar. -Penyediaan bahan penolong. -Kerja sama dengan industri sejenis di seluruh dunia
---	--	---

Tabel 4.33. Sasaran Pembangunan Industri Pakan, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 - 2035

No.	Sasaran	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Nilai tambah (Rp milyar)	153,4	163,956	238,394	315,9	332,02	461,5975	656,734	793,312
2	Pertumbuhan (%)	9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	261,45	276,624	293,6205	312,651	333,972	446,472	558,972	716,472
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	44.993	46.460	47.928	49.396	50.864	276.336	313.032	349.727
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.096	1.227	1.374	1.539	1.724	3.204	4.064	4.924

Tabel 4.34. Rencana Aksi Pengembangan Industri Pakan, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Mengembangkan industri bahan baku dan bahan campuran dalam negeri	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Perguruan tinggi, dan Litbang	V	V	V					
2	Penelitian dan pengembangan bibit jagung, ubi kayu, kedelai, dan limbah sawit	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
3	Meningkatkan penelitian tentang pakan yang berkualitas	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dinas Pertanian dan Peternakan	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang			V	V	V	V	V	V
4	Mendorong peningkatan adopsi teknologi pengolahan pakan	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Perguruan tinggi		V	V	V	V	V	V	V
5	Meningkatkan akses pasar internasional melalui misi dan promosi dagang	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Kadin		V	V	V	V	V	V	V

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/Kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
6	Menyusun konsep dan rantai pemasaran bersama anggota klaster	Dinas Perindag, Bappeda	Dinas Perindag	Perusahaan	Asosiasi		V	V	V	V	V	V	V

4.2.3.4. Industri Pengolahan Industri Kelapa Sawit

Permasalahan dalam Pengembangan Industri Kelapa Sawit

- Masih rendahnya penguasaan teknologi industri hilir kelapa sawit
- Rantai perdagangan antara produsen Kelapa Sawit dari tingkat petani dengan industri kelapa sawit masih panjang. Sehingga proporsi nilai tambah yang dinikmati petani menjadi kecil. Hal ini berdampak pada kesejahteraan petani kopi yang dapat ditingkatkan pada masa mendatang.
- Terbatasnya akses permodalan para petani/keompok tani, sehingga usaha industri hilirisasi masih sulit berkembang karena keterbatasan modal.
- Tata niaga kelapa sawit masih didominasi oleh industri besar, sehingga nilai tambah kurang dinikmati petani kelapa sawit.
- Kekurangan modal.
- Teknologi pengolahan dan pengemasan yang belum dikuasai sepenuhnya.
- Kualitas SDM untuk pemasaran produk hilir yang belum memadai.
- Belum optimalnya peranan asosiasi petani kelapa sawit.
- Produksi kopi yang masih didominasi jenis Robusta, sedangkan permintaan pasar dunia menyukai kopi Arabika.

Tabel 3.35. Analisis SWOT Industri Kelapa Sawit

Faktor Internal Faktor Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan lahan dan bahan baku -Ketersediaan alat pengolah -Ketersediaan tenaga kerja -Dukungan Pemerintah -Permintaan pasar. -Kemampuan Teknis. -Sudah ada pelaku usaha dan inkubator bisnis. -perkembangan usaha ternah 	<ul style="list-style-type: none"> -SDM Trampil masih kurang -Penguasaan Teknologi masih rendah. -Kesulitan mendapatkan bahan penolong. -kontinuitas bahan baku belum terjamin -pemasaran belum kontinu -Promosi masih minim -tingkat kepercayaan masih rendah
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> -Permintaan pasar cukup bagus -Dukungan Teknologi -Kebijakan dan dukungan Pemerintah. - Usaha industri berbahan Kelapa Sawit tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> -meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kelapa sawit -Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha. -Pemberdayaan kelompok untuk bekerja sama dengan industri lain sebagai sumber bahan baku. -Riset pasar. -Peningkatan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknis pengolahan dan penggunaan teknologi -Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan. -Penyediaan bahan penolong lokal -Pembentukan kerjasama antar pengusaha bahan baku kelapa sawit dengan industri turunannya

Ancamaman (T)	Strategi (ST)	Strategi WT
-Persaingan produk dari negara luar yang masuk pasar nasional dan regional. -Konversi tanaman bahan pakan -selera konsumen yang berubah	. -melakukan riset pasar untuk mengetahui selera konsumen	-efisiensi biaya -perbaikan manajemen. -Penguasaan pasar. -Penyediaan bahan penolong. -Kerja sama dengan industri sejenis di seluruh dunia

Tabel 4.36. Sasaran Pembangunan Industri Kelapa Sawit, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 - 2035

No.	Sasaran	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Nilai tambah (Rp milyar)	259,6	277,464	403,436	534,6	561,88	781,165	1111,396	1342,528
2	Pertumbuhan (%)	9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	697,2	737,664	782,988	833,736	890,592	1190,592	1490,592	1910,592
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	29.995	30.974	31.952	32.931	50.864	184.224	208.688	233.151
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.338	1.498	1.678	1.880	2.105	3.911	4.961	6.011

Tabel 4.37. Rencana Aksi Pengembangan Industri Kelapa Sawit, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah tinggi	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan		V	V	V					
2	Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D	Dinas Perindag		Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
3	Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan kelapa sawit	Dinas Perindag	Dinas Perindag					V	V	V	V	V	V
4	Penguatan <i>linkage</i> antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan			V	V	V	V	V	V	V
5	Mendorong		Dinas	Perusahaan	Perguruan		V	V	V	V	V	V	V

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	kegiatan penelitian pasar (<i>market research</i>) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan bernilai tambah tinggi		Perindag		tinggi dan Litbang								
6	Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi	Dinas Perindag	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V
7	Mengembangkan produkminyak goreng yang mengandung beta karotin sebagai	Dinas Perindag		Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	sumber vitamin A												
8	Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran	Dinas Perindag	Dinas Perindag					V	V	V	V	V	V
9	Mempermudah akses kredit untuk petani sawit	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Perbankan	V	V	V	V	V	V	V	V
10	Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel	Dinas Pertambangan & Energi	Dinas Pertanian	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V
11	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan yang berasal dari limbah padat maupun limbah cair kelapa sawit	Dinas Pertambangan dan Energi	Dinas Pertambangan dan Energi	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang			V	V	V	V	V	V

4.2.2.5. Industri Pengolahan Industri Batubara

Tabel 4.38. Produksi Batu Bara Di Provinsi Sumatera Selatan, 2008-2012

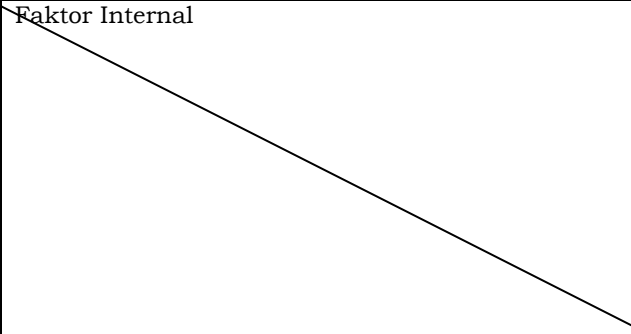
Jenis Barang	Lokasi	Satuan	Produksi				
			2008	2009	2010	2011	2012
1. Batubara	M.Enim, Lahat	Ton	10.310.772,00	10.869.870,00	15.365.659,00	20.020.669,41	25.300.000,00

Permasalahan dalam Pengembangan Industri Batubara di Provinsi Sumatera Selatan.

- Potensi Batubara belum teraudit dengan baik.
- Produk batu bara masih dominan dalam bentuk industri hulu.
- Batubara Sumatera Selatan masih dominan dijual dalam bentuk industri hulu. Merubah komoditas barang mentah menuju barang jadi tentunya memerlukan penelitian dan teknologi, hal ini yang sering dilupakan keberadaannya, padahal memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi. Keberadaan Riset & Teknologi dalam industri Batubara merupakan bagian terdepan dari keberhasilan hilirisasi Perwujudan diversifikasi produk hanya akan mampu ditempuh dengan baik apabila disertai dengan pengembangan riset & teknologi yang memadai. Industri Batubara di Provinsi Sumatera selatan belum mempunyai badan penelitian dan pengembangan.
- Keberadaan sumber bahan baku memiliki peranan yang paling penting dalam rangka berjalannya aktivitas hilirisasi di Sumatera Selatan. Sumberdaya bahan baku Batubara yang tidak dapat diperbaharui perlu dilindungi dengan pengawasan yang ketat terhadap eksploitasinya, sehingga kontinuitas produksi dapat terus berjalan dengan baik, begitu pula dengan teknologi yang digunakannya adalah teknologi yang mampu memaksimalkan eksploitasi tanpa membuat pemborosan.

- Banyaknya pertambahan industri baru dalam bidang Batubara akan berimplikasi pada bertambahnya permintaan logistik, seperti Port, Pengangkutan, gudang, packing, labeling, dll. Industri Batubara Provinsi Sumatera Selatan belum mempunyai system transportasi yang mandiri.
- Industri Batubara banyak menghasilkan sisa atau limbah sering kali memicu pada tingginya harga produk akhir yang dipasarkan, sehingga sulit untuk bersaing. Industri Batubara belum mempunyai teknologi yang memadai dalam hal mengurangi sisa dan menjadikan sisa atau limbah menjadi lebih berharga, sehingga meningkatkan penerimaan kembali adalah cara yang lebih bijaksana, agar industri mampu bersaing.
- Industri Batubara belum mempunyai ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri Batubara, menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan produksi dan efisiensi produksi.
- Industri Batubara Provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan lingkungan. Industri Batubara umumnya masih menghasilkan gas emisi CO₂ yang cukup tinggi.

Tabel 3.39. Analisis SWOT Industri Batubara

<div style="text-align: center;"> <p>Faktor Internal</p>  <p>Faktor Eksternal</p> </div>	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ul style="list-style-type: none"> -Ketersediaan bahan baku dalam bumi Sumatera Selatan -Ketersediaan alat pengolah -Ketersediaan tenaga kerja -Dukungan Pemerintah -Permintaan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> -SDM Trampil masih kurang -Penguasaan Teknologi masih rendah. -Kesulitan mendapatkan bahan penolong. -kontinuitas bahan baku belum terjamin, karena Batubara merupakan SDA foil yang suatu saat akan habis. -produk yang dominan dijual masih dalam industri hulu -pemasaran belum kontinu -Promosi masih minim -Penguasaan Teknologi
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ul style="list-style-type: none"> -Permintaan pasar cukup bagus -Dukungan Teknologi -Kebijakan dan dukungan Pemerintah. - Usaha industri berbahan Batubara cukup tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> -meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi batubara -Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pelaku usaha. \- - Pemberdayaan kelompok untuk bekerja sama dengan industri lain sebagai sumber bahan baku. -Riset pasar. -Peningkatan promosi 	<ul style="list-style-type: none"> -Meningkatkan kualitas produk melalui perbaikan teknis pengolahan dan penggunaan teknologi -Meningkatkan kualistas SDM melalui pelatihan dan pembinaan. -Penyediaan bahan penolong lokal -Pembentukan kerjasama antar pengusaha bahan baku batubara dengan industri turunannya

Ancamaman (T)	Strategi (ST)	Strategi WT
-Sebagai sumber daya terbarukan, suatu saat akan habis.	- Melakukan riset teknologi untuk meningkatkan kualitas	-efisiensi biaya -perbaikan manajemen. -Penguasaan pasar. -Penyediaan bahan penolong. -Kerja sama dengan industri sejenis di seluruh dunia

No.	Sasaran	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Nilai tambah (Rp milyar)	342,2	365,748	531,802	704,7	740,66	1029,718	1465,022	1769,696
2	Pertumbuhan (%)	9	9,1	9,1	9,2	9,2	9,4	9,7	9,9
3	Nilai ekspor (Rp milyar)	871,5	922,08	978,735	1042,17	1113,24	1488,24	1863,24	2388,24
4	Penyerapan tenaga kerja (orang)	44.993	46.460	47.928	49.396	50.864	276336,5	313031,7	349727
5	Nilai Investasi (Rp milyar)	1.911	2.141	2.397	2.685	3.008	5.588	7.088	8.588

Tabel 4.40. Rencana Aksi Pengembangan Industri Batubara, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016 – 2035

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
1	Diversifikasi produk Batubara yang bernilai tambah tinggi	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan		V	V	V					
2	Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D	Dinas Perindag		Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang	V	V	V					
3	Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan Batubara	Dinas Perindag	Dinas Perindag					V	V	V	V	V	V
5	Mendorong kegiatan penelitian pasar (<i>market research</i>) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan		Dinas Perindag	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V

No	Rencana Aksi	Pemangku Kepentingan				Tahun							
		Propinsi	Kab/kota	Swasta	Lain-Lain	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035
	bernilai tambah tinggi												
6	Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan Batu bara yang terintegrasi	Dinas Perindag	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V
8	Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran	Dinas Perindag	Dinas Perindag					V	V	V	V	V	V
9	Mempercepat investasi dalam industri Batubara	Dinas Perindag	Dinas Perindag	Perusahaan	Perbankan	V	V	V	V	V	V	V	V
10	Melakukan kerja sama dengan asosiasi produsen Batubara dunia	Dinas Pertambangan & Energi	Dinas Pertanian	Perusahaan	Perguruan tinggi dan Litbang		V	V	V	V	V	V	V

BAB 5

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2035 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2035 khususnya terkait dengan pembangunan industri. RPIP menjadi pedoman untuk dijabarkan kedalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan.

RPIP Provinsi Sumatera Selatan ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sector industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.